

MENJADI

APA YANG HARUS DILAKUKAN?!

IKUT
DISKUSI

MELEK
TEKNOLOGI

IKUT
AKSI

TOLAK!

KRITIS
PROGRESIF

IKUT
LATIHAN
SMACK
DOWN



SILO



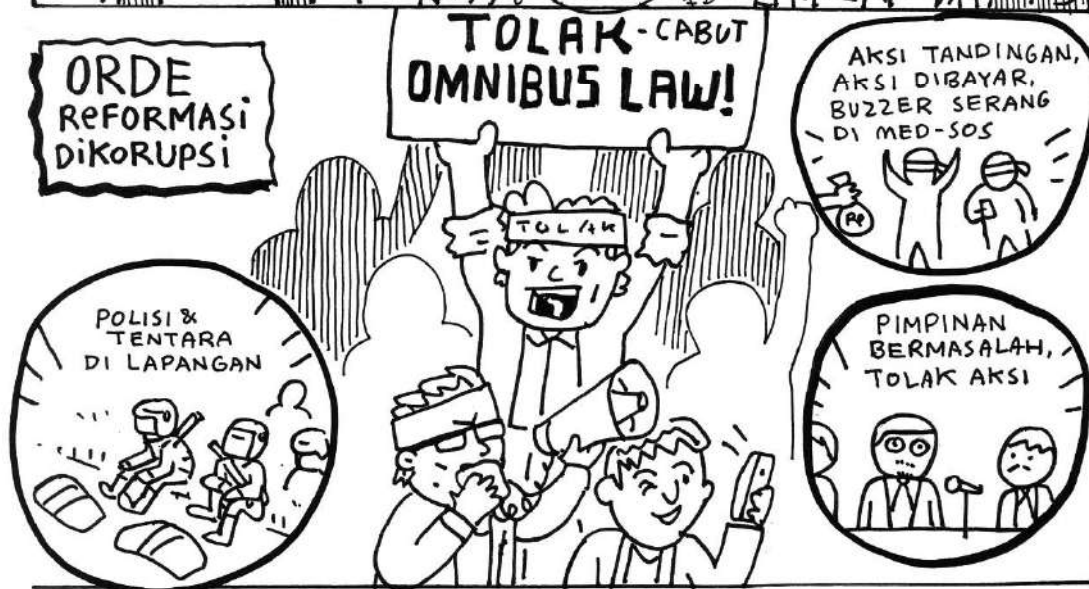
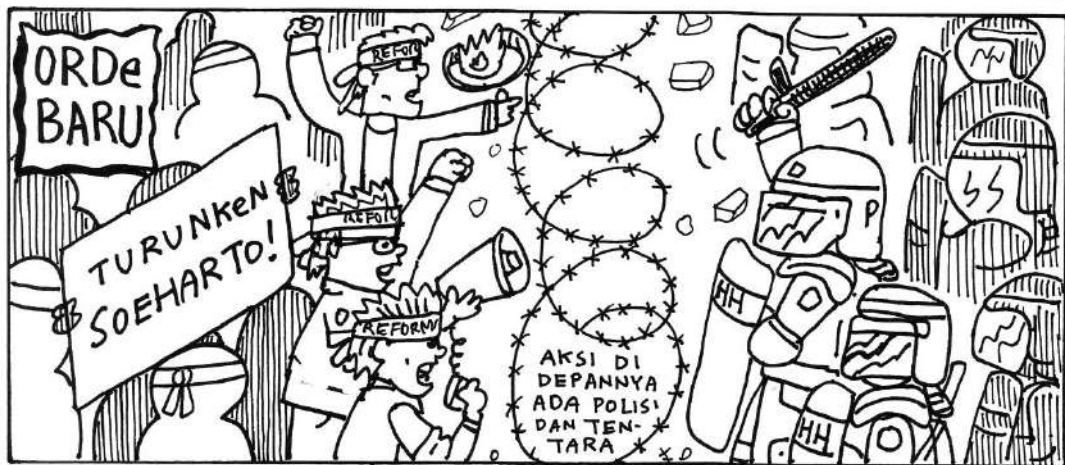
3



MENJADI AKTIVIS

APA YANG HARUS DILAKUKAN?

MELAWAN DARI ZAMAN ke ZAMAN



*Penghormatan buta
pada kekuasaan
adalah musuh besar
kebenaran...*

Albert Einstein

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

KETENTUAN PIDANA

Pasal 112

Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan/atau Pasal 52 untuk Penggunaan Secara Komersial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

MENJADI AKTIVIS APA YANG HARUS DILAKUKAN?

Joko Susilo
Eko Prasetyo
Terra Bajraghosa



AKADEMI
AMARTYA



{ KURAWAL }
FOUNDATION

MENJADI AKTIVIS

Apa yang harus dilakukan?

Joko Susilo, Eko Prasetyo

Desain Sampul : Terra Bajraghosa

Desain Isi : Joko Supriyanto

Ilustrasi : Terra Bajraghosa

Akademi Amartya, Kurawal Foundation

Katalog dalam terbitan

(xiv+ 86 hlm; 21 x 28 cm)

PENGANTAR

Gerakan sosial di Indonesia harus menghadapi pukulan telak ketika berhadapan dengan pemerintahan hari ini. Kemunduran demokrasi, yang diperlihatkan oleh pemerintah beriringan dengan konsolidasi oligarki, berlangsung dalam kawalan segenap aparatus milik negara–militer, birokrat, teknokrat, dan buzzer. Semua tampak bagaikan tembok tebal bagi usaha demokratisasi yang disuarakan oleh gerakan sosial, dan advokasi mereka terhadap kelompok rentan dan marjinal yang menjadi korban pertama dan terlama segala praktik korupsi, perusakan lingkungan, dan otoritarianisme.

Di sisi lain, gerakan sosial kerap bergesekan satu sama lain karena perbedaan ideologi, taktik, basis massa, dan pola relasi dengan negara. Hal ini menyeret sebagian aktor gerakan pada perdebatan yang justru tampak melangit karena berada di ranah teoritis. Meski demikian, hal-hal teoritis bukan sesuatu yang tabu. Ada banyak kasus keberhasilan gerakan sosial, baik di Indonesia maupun wilayah lain, yang bermula dari kemampuan memahami situasi teoritis dan penerapannya secara taktis di ranah praksis. Karena itu, analisis yang tepat mengenai kekuatan dan kelemahan gerakan sosial, baik yang muncul dari dalam maupun luar tubuh gerakan, adalah tahap pertama yang harus ditempuh untuk mewujudkan perjuangan demokratisasi di hadapan tantangan negara.

Setelah melewati berbagai diskusi publik tematik dan *focus group discussion*, Amartya menerbitkan modul gerakan sosial yang ditujukan untuk pembaca pemula dan menyemai semakin banyak inisiasi gerakan sosial dari lintas spectrum politik, orientasi isu, dan latar belakang. Sebuah kekuatan resistensi yang potensial memengaruhi opini umum, agenda kebijakan publik dan menggerakkan massa untuk terlibat, baik dari pelajar (siswa dan mahasiswa), buruh, simpul pro-demokrasi, komunitas, dan berbagai basis lainnya secara inklusif sekaligus kolektif.

Modul ini mencoba memberikan wawasan teoritis, pedoman praktis, dan kesadaran baru dalam bergerak bagi kaum muda dalam dinamika kontemporer saat ini. Secara umum, modul berisikan praksis pendidikan kritis, logika dasar, analisa sosial dan riset partisipatif, pendekatan gerakan sosial secara teori dan praktik, agitasi-propaganda-kampanye gerakan, taktik dan strategi perlawanan gerakan serta refleksi terhadap gerakan sosial yang kontekstual, relevan dan aktual.

Yogyakarta, 30 Desember 2021

Yayasan Amartya

TAKTIK- TAKTIK MELAWAN



DAFTAR ISI

Pengantar - vii

Daftar Isi - ix

Pesat Kawat : Aktivisme – x

BAB 1 Praksis Pendidikan Kritis - 2

1. Politik Pendidikan dan Perlawanan - 2
2. Pendidikan Kritis - 5
3. Pendidikan Kaum Tertindas - 10

BAB 2 Analisa Sosial dan Riset Aksi - 14

1. Analisa Sosial melalui Riset Aksi - 15
2. Hubungan Struktur dan Agen - 18
3. Realitas Sosial Kini : Dominasi, Represi dan Pemasungan Kebebasan - 21
4. Perubahan Sosial : Berjuang Meraih Demokrasi - 23

BAB 3 Gerakan Sosial, Teori menuju Praktik Aksi - 27

1. Pendekatan Gerakan Sosial - 28
2. Keterlibatan Aktor dan Capaian Gerakan - 34
3. Spectrum Ideologi-Politik Gerakan - 35
4. Pendekatan dan Pembangunan Gerakan Mahasiswa - 39
5. Kaum Milenial dan Aktivisme Digital - 43

BAB 4 Logika, Agitasi-Propaganda, Kampanye Massa - 49

1. Logika Dasar dan Logical Fallacy - 50
2. Varian Agitas-Propaganda - 52
3. Creative Campign dan Crowdfunding - 56
4. Retorika Reasioner – Kontra Wacana - 58

BAB 5 Taktik dan Strategi Perlawanan Gerakan - 61

1. Pertarungan Wacana - 62
2. Judicial Review - 64
3. Advokasi, Lobi, Negosiasi, Mediasi - 67
4. Aksi Pendudukan/Okupasi - 71
5. Kiri Luas - Front Populer - 73

BAB 6 Refleksi Gerakan - 77

PESAN KAWAT: AKTIVISME

“Pemujan yang sejati adalah bekerja untuk keadilan dan kepedulian bagi orang yang miskin dan tertindas” —Yesaya

Apa nikmatnya jadi aktivis? Sering kali kita mendapat pertanyaan itu pertama kali dari Orang Tua. Disusul kemudian oleh dosen yang memang tak punya pengalaman organisasi-gerakan. Lalu ditambah oleh teman-teman yang memang kegiatannya hanya kuliah saja. Jawaban para eksponen aktivis dulu indah dan sederhana: menjadi aktivis memberikan pengalaman yang lebih kaya dan niscaya akan membantu membentuk masa depan yang lebih baik. Biasanya orang-orang sekitar mendebat hal itu tapi semuanya memaklumi jika memang itu pilihan pribadi yang orang lain tak bisa mengusiknya. Kini pertanyaan yang sama muncul dari anak saya yang sudah kuliah: kenapa kita musti jadi aktivis? Mungkin sekarang kita tak bisa menjawab seperti dulu lagi.

Dalam konteks aktivisme mahasiswa—basis masa muda potensial yang selalu diperbaharui dan hadir silih berganti setiap tahun, misalnya, suasana kampus memang beda dan soal yang dihadapi lebih gawat ketimbang dulu. Kampus tak sebebas dulu lagi: kuliah boleh dalam waktu yang panjang, uang kuliahnya murah dan dosen punya banyak waktu untuk berdebat hal apa saja. Sekarang kuliah dipaku dalam jadwal yang padat, singkat dan cepat. Dosen bukan kolega tapi guru yang kekuasaannya absolut. Sedangkan organisasi mahasiswa tidak semewah dulu lagi: bersikap kritis sekarang bisa berbuah hukuman. Singkatnya hidup mahasiswa sekarang ini dikelilingi oleh kekuatiran dan kecemasan tentang masa depannya. Sebuah masa depan yang dihantui oleh berbagai krisis sosial dan politik yang akut. Krisis yang terjadi di seputar kampus adalah ruang kebebasan akademik yang makin menyempit. Berbagai kasus pelanggaran kebebasan akademik terjadi di sejumlah tempat. Dosen dikriminalisasi hingga pers mahasiswa dibredel terjadi berulang kali. Belum lagi para aktivis yang sibuk melakukan protes malah ditangkapi oleh aparat keamanan bahkan diantara mereka di DO segala. Kampus yang beraroma penindasan itu malah memberi kemudahan pada elite politik untuk memanfaatkan posisinya. Sejumlah ketua Parpol diberi anugerah gelar Doctor Honoris Causa, pejabat dengan mudah meraih gelar tertinggi dan mereka yang protes atas gejala itu semua tidak dihiraukan sama sekali. Iklim kampus yang makin elitis dan otoriter itu membawa efek bahaya: kehidupan akademis terus dipadati oleh konflik dengan mahasiswa dan tak jarang aparat keamanan terlibat ikut menanganinya.

Krisis itu diawali dari catatan buram tentang situasi demokrasi. Berbagai lembaga International dan nasional mencatat indeks demokrasi di Indonesia yang makin menurun. Terutama pada aspek kebebasan berpendapat dan budaya politik. Makin banyak kita menyaksikan kriminalisasi atas sejumlah

orang yang menyatakan pandangan berbeda maupun peretasan di media sosial terhadap mereka yang bersikap kritis. Begitu pula budaya politik ditandai oleh meluasnya praktek kekerasan hingga perluasan peran aparat bersenjata. Jangkauan urusan mereka meyentuh pada soal-soal di luar keamanan yang mengingatkan kita pada era Dwi Fungsi ABRI di masa Orba. Sebuah era yang dipenuhi oleh catatan pelanggaran HAM yang jumlahnya raksasa. Berhadapan dengan situasi yang padat masalah itu membuat banyak kaum muda-pelajar-mahasiswa berfikir ulang untuk menjadi aktivis. Bukan hanya tingginya resiko yang dihadapi tapi berhadapan dengan struktur politik yang amat kuat. Seorang pengamat bahkan mengatakan inilah kekuasaan yang memonopoli segalanya: wewenang, kekerasan hingga kapital. Mustahil menaklukkan sistem ini jika mengandalkan nyali dan praktek aksi massa? Berulang-ulang banyak bukti memberitahu bagaimana desakan aksi massa tidak berhasil memenangkan tuntutan. Sebagian malah mulai berfikir untuk menanggalkan aksi massa hanya karena efeknya yang bahaya. Muncullah pandangan untuk memperbaiki lewat cara terlibat sepenuhnya pada lembaga negara. Mereka mau menciptakan perubahan bukan dengan konfrontasi tapi terlibat bersama. Jika berkaca sejarah Republik mereka memutuskan untuk menggunakan taktik-istilahnya-kooperatif. Tampilah sejumlah aktivis yang memilih untuk menjadi penghuni parlemen dan istana. Rasa percaya diri bahwa semua soal bisa diperbaiki jika ada partisipasi tidak benar sepenuhnya. Istana dan Parlemen bukan aktivis saja yang menghuni tapi ada pengusaha dan politisi. Pengaruh mereka bahkan lebih besar dan luas. Mereka punya kontribusi yang nyata: penguasa memberi banyak modal untuk berkuasa dan politisi punya partai yang mampu menggalang dukungan. Sedang aktivis mungkin hanya diperlukan saranya atau tenaganya untuk memadamkan aksi yang digalang oleh juniornya. Jika berkaca pada menurunnya Indeks Demokrasi kentara kalau keberadaan aktivis disana tidak memberi kontribusi yang berarti. Muncul kecurigaan jangan-jangan kehadiran mereka sengaja dimanfaatkan untuk aksesoris kekuasaan saja. Tidak hanya itu ditaklukkanya aktivis oleh kekuasaan membawa gelombang yang bahaya. Mereka membawa demokrasi sebagai nilai yang semu hingga politik kehilangan mandat rakyat. Sikap mereka berubah drastis dan pandangan mereka melompat dari logika: menyetujui apa saja langkah penguasa, membenarkan berbagai tindakan otoriter bahkan memberi motif 'mulia' pada semua kebijakan politik. Julian Benda menyebutnya sebagai pengkhianatan karena keingkaran mereka pada nilai-nilai ideal yang dulu diperjuangkan bersama. Tauladan yang buruk jika kemudian aktivis itu dengan gampang berubah posisi dan berganti pandangan: dari yang demokratis jadi intoleran, dari yang terbuka pandangan jadi menyerang yang beda pandangan, dari yang berani mempertahankan prinsip jadi orang yang berubah-ubah keyakinan. Mereka malah menambah dosis kekuasaan untuk korup dan sewenang-wenang.

Tapi situasinya tak selalu muram. Masih banyak kaum muda-pelajar-mahasiswa yang berani. Ikut protes di jalanan, bersama-sama menolak pengekangan bahkan secara antusias ikut membela posisi rakyat. Mereka bertaruh resiko apa saja: kena pukulan aparat hingga pemenjaraan. Bagi mereka menjadi aktivis itu bukan sekedar pilihan tapi jalan hidup yang musti dialami sebagai anak muda. Pertimbangannya tidak sekedar keinginan mendapatkan pengalaman yang mendebarkan melainkan pengabdian pada tugas kemanusiaan. Sebagai seorang terpelajar mereka tidak mau dilatih dengan logika laba dan rugi tapi adil atau tidak. Mustahil mereka berdiam diri menyaksikan kesewenang-wenangan yang beredar begitu mudah dan kekerasan yang dibiarkan begitu saja. Akal dan nurani sebagai seorang terpelajar membuat mereka meyakini bahwa pengetahuan yang dimiliki bukan punya misi mendapat pekerjaan tapi juga peran pembebasan. Apa yang menginspirasi mereka?

“ Yang membuat seseorang senantiasa pasif dan patuh adalah rasa takut dihukum, tapi begitu kita melepaskan keterikatan kita pada hal-hal yang pada esensinya tidak penting- uang, karir, keselamatan fisik-kita bisa mengatasi rasa takut itu ” – Snowden

Kenapa menjadi aktivis? Mungkin itulah yang membawa sebagian kaum muda untuk berada di luar kekuasaan. Mereka memilih untuk berlabuh bersama rakyat dengan ikut melibatkan diri dalam menangani soal yang dihadapi. Tanpa ragu mereka menemani rakyat saat berada dalam tekanan, ketika berhadapan dengan aparat hingga bersama-sama ikut diringkus ketika aksi bersama. Bagi mereka kebersamaan dengan rakyat bisa membentuk jiwa, pengalaman dan mengasah kepedulian. Rohani mereka jauh lebih kaya ketika hidup bersama dengan yang menderita. Secara obyektif mereka ingin menyatakan perlawanan pada segala bentuk penindasan. Bagi mereka ikut terlibat memperjuangkan keadilan bukan hanya memperkaya jiwa tapi juga terlibat dalam perubahan sosial yang nyata. Turut campurnya kita dalam persoalan masyarakat membawa mereka untuk terlibat aktif dalam mencegah rusaknya tatanan sosial. Di samping itu menjadi aktivis adalah upaya kita belajar menjadi manusia merdeka. Kemerdekaanya dibentuk oleh keberaniannya untuk meletakkan siapa saja dalam posisi setara. Sikap merdeka ditentukan oleh pengharganya pada nilai demokrasi. Karena itu mereka sangsi dan kritis pada otoritas yang wujudnya bisa apa saja: negara, kampus hingga orang tua. Mereka mengerti kalau kekuasaan mustahil bertahan jika terus-menerus melakukan represi, korupsi hingga menyuburkan politik dinasti. Bukan kebencian yang memicu tindakan mereka tapi nilai demokrasi yang dipertaruhkan. Demokrasi itu mewujudkan bukan pada kegiatan pemilu dan berdirinya partai politik saja: demokrasi itu memberi kebebasan tiap orang untuk menyatakan keberatan, demokrasi membiarkan anak muda berorganisasi tanpa diganggu dan melalui demokrasi kekuasaan dituntut untuk memperlakukan rakyatnya dengan cara bermartabat.

Demokrasi bisa menjamin masa depan mereka karena tiap orang punya hak yang sama. Itulah alasan berikutnya kenapa memilih jadi aktivis: memperjuangkan hak kita sebagai manusia merdeka. Sebuah perjuangan yang pasti tak mudah dan beresiko tapi itulah kehidupan yang pantas diperjuangkan. Kehidupan yang tidak didasari oleh rasa takut, teror dan ancaman undang-undang. Buah kehidupan merdeka itu bisa memberi seseorang kesempatan untuk berorganisasi dengan leluasa, dapat mengemukakan pendapat secara bebas dan tidak diintimidasi jika menyatakan kritik. Cermin pantulan kehidupan yang merdeka itu tampak di awal reformasi: parpol dibebaskan untuk berdiri, KPK diberi wewenang yang luas untuk menangkap pejabat yang curang dan politik dinasti dibatasi oleh ketentuan perundang-undangan. Sayang semua itu tiba-tiba dikubur oleh sistem otoriter. Demokrasi diperlemah bukan saja oleh rezim politik yang menang dalam pertarungan tapi juga oleh para aktor yang dulu ikut memperjuangkannya. Mereka tak ingin demokrasi jadi berantakan dan tidak bisa ditegakkan. Sistem yang ditandai oleh menguatnya tradisi represi, kriminalisasi dan peretasan. Maka pilihan jadi aktivis dibenarkan karena kita mau melawan itu semua. Keinginan untuk melawan yang keliru itu adalah dasar moral mengapa memilih jadi aktivis. Tanpa perlawanan pada kesewenang-wenangan hidup akan seperti dalam sistem jajahan: semua yang dilakukan penguasa dibiarkan begitu saja, semua yang diucapkan pejabat tidak bisa dibantah dan semua aturan yang muncul dianggap punya maksud baik. Melawan tidak lagi sebuah pilihan tapi keharusan di tengah macetnya fungsi oposisi hingga meluasnya cengkraman penguasa dimana-mana. Bersamaan dengan itu melawan melatih kita untuk hidup dengan cara terhormat dan bermartabat. Tanpa upaya keras melawan sistem yang otoriter maka semua orang bisa takluk oleh sistem ini.

“ Senjata yang paling kuat yang sebenarnya dimiliki seorang pejuang adalah keyakinan dan konsekuensi” – Tan Malaka

Bagaimana memulainya? Ikut terlibat dalam organisasi-gerakan. Di organisasi akan tersemat bukan hanya nilai-nilai yang patut diperjuangkan tapi bagaimana kita mengubah diri dari yang egois jadi yang peduli. Disana orang dilatih untuk tidak mempercayai pendapatnya saja melainkan juga menghargai pendapat yang beda. Tiap orang hidup bukan untuk kepentingan dirinya sendiri tapi bagaimana kepentingan organisasi bisa lebih diutamakan. Pada organisasi gerakan kita semua dilatih untuk menjadi makhluk sosial yang percaya dengan utopia yang terus diperjuangkan perwujudannya. Tak hanya itu organisasi gerakan mengantarkan kita untuk selalu mengambil posisi dalam soal apapun: berdiri bersama pembuat masalah atau ikut bergerak dengan para korban. Bersedia untuk mengurbankan kepentingan diri. Jelas organisasi-gerakan bukan tempat yang tentram dan nyaman. Malah bisa tambah beban masalah kalau ikut organisasi: tapi beda masalah yang ditanggungnya. Bukan masalah pribadi atau masalah yang kunci penyelesaiannya ada di kita. Tapi soal yang lebih besar dan tampak mewah: keadilan, penghormatan atas nilai kemanusiaan hingga kepedulian pada rakyat kecil. Problem etis ini yang jadi biang keladi kegelisahan: mengapa peraturan bukan melindungi mereka yang lemah, mengapa kekuasaan cenderung otoriter atau bagaimana kita berhadapan dengan aparat yang kian brutal. Hari demi hari organisasi melatih kita untuk tidak gampang menggadaikan prinsip dan melatih kita untuk berani berhadapan dengan pihak yang bertentangan pandangan. Jelaslah kalau Organisasi membawa kita untuk menjadi manusia yang jauh lebih berguna bagi orang lain yang membutuhkan. Dalam organisasi kita diajak untuk mengasah kepedulian:

Pertanyaan yang menarik bukanlah “Apakah kita peduli pada orang lain? Melainkan ‘Seberapa pedulilah kita dan siapa orang lain yang nasibnya kita peduli?’ – Frank Hahn

Terjunksan dirimu untuk terlibat dalam berbagai persoalan kemanusiaan. Menerjunksan diri itu dalam arti yang sebenarnya: ikut turun lapangan hidup dengan rakyat, merasakan apa yang mereka derita, terlibat membela posisi mereka dan bahkan aksi membantu pemenuhan kebutuhan mereka. Tentu tidak terus-terusan karena kalian pasti punya tugas lainnya juga. Hanya mulai sekarang persoalan mereka masuk dalam prioritasmu untuk ikut ditangani, minimal difikirkan. Setidaknya masalah mereka ikut kamu suarakan melalui cara apa saja: berbagi pesan di grup WA, tuliskan itu di Twitter, masukan dalam foto profile hingga membuat status tentang masalah itu. Pokoknya kamu mulai sibuk untuk mengangkat masalah itu kemana-mana. Misalnya yang paling aman tapi penting adalah ikut aksi Kamisan. Aksi simbolik untuk menuntut pengusutan atas berbagai perkara HAM. Berikan sugesti pada dirimu bahwa semua itu memberi manfaat dan pengalaman penting. Terlibat dalam urusan kemanusiaan, berhadapan dengan perangai otoriter aparat hingga mendapatkan tekanan melalui media sosial bisa membuat kita berfikir ulang pada aktivitas yang dilakukan. Tapi tekanan itu tidak terjadi hanya pada dirimu melainkan orang-orang yang mengerjakan hal serupa. Sukarno bersama Hatta dan Sjahrir dibuang karena aktivitas politiknya. Di masa sesudahnya banyak mahasiswa juga dikurung dalam penjara karena protes yang dilakukannya. Bahkan menjelang kejatuhan Orde Baru banyak mahasiswa harus dihilangkan secara paksa. Saat demokrasi tampil jadi norma seorang aktivis HAM Munir Thalib diracun dalam pesawat. Tentu kalian tidak harus kehilangan nyawa jika menjadi aktivis tapi selalu ada resiko yang didapatkan kalau menjalani garis hidup sebagai orang pergerakan.

Memang ada banyak aktivis yang sekarang ini berada di dalam ancaman. Catatan di banyak organisasi pembela HAM menyebut ada tekanan luar biasa yang dilakukan dari mana-mana

untuk meng-intimidasi para aktivis. Ada yang rumah orang tuanya dilempar bom molotov hingga penganiayaan sampai pembunuhan segala. Resiko itu terus bermunculan seiring dengan kegiatan para aktivis yang mulai membuka fakta, membongkar masalah hingga mengungkapkan tragedi. Muncul kini tuntutan untuk perlindungan bagi aktivis. Tapi pengurbanan mereka selalu menghidupkan norma baru yang lebih baik ketimbang sebelumnya.

Tiap pengurbanan yang mereka berikan telah muncul kehidupan baru yang berbeda dengan sebelumnya. Hilangnya penyair Wiji Thukul tidak membuat puisinya hilang dari ingatan dan protes atas militerisme malah makin bergema. Berkat Wiji Thukul, Munir hingga kematian mahasiswa Trisakti tertanam gagasan akan perlunya penegakan HAM. Dari tangan para aktivis yang dihilangkan secara sewenang-wenang muncullah aksi kamisan yang menyebar di berbagai kota dan pulau. Adalah andil para penulis seperti Pramodya Ananta Toer yang menghidupkan tradisi literer di kalangan banyak anak muda. Begitu pula berkat tayangan film besutan Joshua Openheimer, Senyap dan Jagal kita jadi lebih mengerti apa yang terjadi pasca 30 September 1965. Ditegaskan lagi oleh Watchdog yang dengan tayangan film-filmnya kritisnya telah membentuk lapisan masyarakat yang sadar akan kacaunya kekuasaan dan bahayanya para oligarkh.

Beda kan hidup yang disentuh oleh para aktivis membuat kita semakin sadar akan perlunya dunia yang lebih beradab. Melalui tulisan hingga perbuatan mereka muncul pandangan baru yang lebih segar dan melindungi. Sebuah pandangan yang selalu mengutamakan kehidupan rakyat bukan kepentingan akumulasi. Kehidupan yang tidak dimulai dengan keyakinan akan adanya pertumbuhan ekonomi tapi kesangsian ada tidaknya keadilan. Melalui buah karya para aktivis hidup kita dikembalikan pada jalur sebagai tatanan yang memiliki utopia bukan tatanan hidup yang berlimpah segalanya.

Mereka percaya bahwa sebuah jalan hidup itu bukan dilalui semata-mata dengan rencana tapi masalah sosial yang mau dipecahkan. Keyakinan itu terpupuk tidak melalui kuliah saja tapi pergaulan, pengalaman dan rasa keingin-tahuan. Dibimbing oleh buku dan diskusi maka kematangan berfikir itu mengkristal menjadi daya penggerak bersama. Jika daya penggerak itu dihidupkan dalam organisasi yang berkembang melalui praktek pembelaan dan pendampingan maka jiwa aktivis itu akan menemukan momentumnya. Momentum itu bukan saja ketika kekuasaan menelurkan kebijakan yang sewenang-wenang tetapi saat kalangan aktivis percaya bahwa penyadaran atas situasi sosial itu perlu dihidupkan pada setiap saat dan setiap waktu. Itulah masa dimana menjadi aktivis itu buah dari kesadaran bukan upaya untuk mendapatkan pengalaman semata.

.....Pesan dari kawan untuk kawan

I TAHUN PERTAMA DISKUSI

DIARY AKTIVIS

POKOKNYA KITA HARUS REVOLUSI. PEMERINTAH WAJIB KITA LAWAN!

Tekatnya meyakinkan. Masih miskin, suka puasa, naiknya motor.

II TAHUN KEDUA IKUT MEMIMPIN AKSI

HANYA SATU KATA: LAWAN!

TOLAK

Penampilan makin gagah, tetapi masih miskin

III TAHUN KETIGA DITEMUI PEJABAT

ANDA BISA BANTU KAMI RUMUSKAN PERUBAHAN

Penampilan sudah lumayan, motor baru

IV TAHUN KEEMPAT DIANGKAT JADI PEJABAT

Penampilan Necis

SAYA HANYA MENCOBA KERJA SECARA... KRITIS

IYA, KRITIS!

RUMAH MOBIL, LENGKAP!

V TAHUN KELIMA ...

GONDENGAN ERAT dengan PENGUSAHA

SAYA RASA Sikap melawan ITU SUDAH KUNO. MARI KITA KERJA-SAMA !!

INI BENER, ORANGNYA sama. MAAF PERUT BUNCIT (KARENA saking enakNYA, BUKAN KARENA BUSUNG LAPAR)

KALO INI PENGAMAT...

MAU KITA SEBUT SIAPA, MEREKA INI ?!

Yang ini RUMAHNYA kemarin mau DIGUSUR

BAB 1

PRAKSIS PENDIDIKAN KRITIS

Overview

Tentu pendidikan bukanlah ruang hampa yang bebas nilai. Ketika narasi dominan telah mengkerdilkan pendidikan dan kerja mendidik itu sendiri, maka kebutuhan akan pendidikan kritis dan proses yang memerdekakan perlu kita ramu kembali? Apa itu pendidikan kritis, bagaimana proses belajar yang seyogyanya dilalui? Kerja-kerja pendidikan semacam apa yang perlu kita gagasan bersama? Proses pembelajaran yang berbasis pada kesadaran kritis menjadi penting guna membongkar kesadaran naif dan fungsional yang hidup dalam praktek pembelajaran sekolah atau kampus pada umumnya.

Substansi

Sub-bab pertama mengenai praksis pendidikan kritis terdiri dari tiga sub-materi:

1. Politik Pendidikan dan Perlawanan
2. Pendidikan Kritis
3. Pendidikan Kaum Tertindas

Melalui pembahasan ini diharapkan dapat memberikan literatur kajian mengenai gagasan pendidikan kritis, memerdekakan dan humanis serta berbagai praktik.

1. POLITIK PENDIDIKAN DAN PERLAWANAN

Pendidikan adalah berfikir kritis dan berani melawan. Kredo ini bukan muncul dari mulut Lenin tapi terbit dari prakarsa Tan Malaka. Pejuang kiri yang mendirikan Sekolah Rakyat dan kelak dibubarkan oleh rezim kolonial Belanda. Bangunan pendidikannya tidak semewah sekolah hari ini tapi pelajarannya lebih tepat ketimbang kurikulum sekarang ini. Tan Malaka membuat sekolah bukan untuk melahirkan pegawai tapi orang yang bisa merdeka dan mandiri. Baginya sekolah itu musti memuat pelajaran yang membuat peserta didik mencintai pengetahuan, mengenal kebaikan dan bisa berfikir kritis. Kategori pelajarannya kalau diringkas hanya di logika, etika dan estetika. Upaya radikal itu dilanjutkan oleh Taman Siswa. Taman Siswa percaya jika peserta didik itu perlu diberi ruang untuk

berpetualang, berhubungan secara egaliter dan menggali pengetahuan dari yang ada di sekitar. Soewardi Soerjaningrat—pengagas Taman Siswa, seorang yang percaya kalau pendidikan itu langkah untuk menuju manusia yang merdeka. Maka pendidikan itu bukan mencangkokkan pengetahuan apalagi menanam informasi tetapi membangkitkan prakarsa peserta didik. Upayanya bukan menyeragamkan tapi mengakomodasi tiap keunikan. Maka disana guru bukan pusat pengetahuan dan murid tidak objek sasaran pengetahuan. Guru dan murid itu hidup dalam pola pengasuhan yang setara.

Ide kalau pendidikan itu adalah senjata juga dipahami oleh Moh Hatta bahwa kemerdekaan itu bisa diraih jika kaum pergerakan memahami pendidikan adalah cara untuk menghasilkan manusia merdeka. Lewat pendidikan maka rakyat terlatih untuk memahami situasi, melawan keadaan dan sanggup berfikir radikal. Partai politiknya sangat unik karena jelas-jelas punya program pendidikan. Sampai sekarang tak ada Partai Politik yang serupa dengan PNI-nya Hatta dan Sjahrir. Jika menjadi anggota harus menjawab formulir pertanyaan segala dan mengikuti pendidikan partai yang sudah mirip seperti kuliah filsafat dasar. Pendidikan merupakan dasar upaya pembebasan. Menjadi seorang pendidik di masa kolonial lebih dari seorang prajurit: mengenalkan apa itu pembangkangan sosial, memahami teori marxisme dan kejamnya kapitalisme sampai mencoba untuk memilih strategi perlawanan yang manjur melawan penguasa kolonial. Di antara mereka membaca buku sudah jadi kewajiban utama dan menuliskan gagasan setara nilainya dengan meledakkan senjata. Pengetahuan yang membimbing Soekarno mencetuskan pidato yang kelak dinamai Pancasila dan pengetahuan pula yang menerbitkan gagasan ekonomi kerakyatan Moh Hatta. Singkatnya para pendiri Republik adalah orang terdidik, yang secara militan mampu merakit gagasan yang sama bahayanya—bahkan lebih bahaya—dengan rakitan senjata api.

Secara sederhana bisa dikatakan pendidikan itu jalur pengorganisasian awal terbitnya kesadaran. Mendidik itu beda dengan melatih, yang disibukkan oleh metode ketimbang kandungan materi dan mendidik tidak harus berujud sekolah, yang urusanya ada pada bangunan dan kepatuhan. Mendidik lebih dari itu: tidak saja menanam kebiasaan untuk berfikir kritis atau mengenalkan gagasan sosial yang besar melainkan memerankan diri sebagai seorang terpelajar. Orang yang memahami kalau proses berfikir itu bukan menghafal atau menganalisa tapi juga berpihak pada kepentingan kemanusiaan. Itu sebabnya mendidik kemudian bukan mengarahkan dan tidak hanya memfasilitasi, tapi mengantarkan orang untuk berani melakukan tindakan perubahan dan tentu juga melakukan perlawanan.



STUDI KASUS:

Pada tahun 1933 di Hindia Belanda dilakukan penelitian ilmiah oleh para akademisi tentang 'ekonomi rakyat'. Penelitian selesai diadakan dan pada tanggal 26 Oktober 1933 lalu diumumkan hasilnya oleh Direktur *Binnenlandsbestuur* (Kemendagri Hindia Belanda) dalam sebuah laporan kepada *Volksraad* (Dewan Rakyat). Penelitian menyimpulkan bahwa menjadi mungkin bagi orang dewasa hidup dengan biaya dua setengah sen sehari. Sampel penelitian itu sudah ditentukan yaitu terdiri dari 5 keluarga pekerja yang diteliti selama lima bulan berturut-turut, ditambah 15 keluarga petani.

2. PENDIDIKAN KRITIS

“ Berpikir benar adalah bertindak benar” – Paulo Freire

Pasti kita sering mendengar ucapan ini: berfikir kritis-lah! Supaya kamu tidak gampang dibohongi atau mudah dimanipulasi. Juga ada alasan yang lebih tepat lagi kenapa kita musti berfikir kritis: zaman ini zaman hoax. Lebih banyak propaganda palsu yang bertebaran ketimbang kebenaran yang diungkapkan. Mengatakan kalau punya laboratorium PCR untuk tujuan kemanusiaan padahal itu bukan milik negara jelas pengibulan yang terang-terangan. Mengatakan kalau anti kritik tapi saat dikritik malah dilapor ke Polisi jelas itu bukan pernyataan yang jujur. Jika hendak disebut ada banyak ungkapan palsu yang disamakan sebagai ungkapan resmi dan ada banyak kebenaran tapi harus berhadapan dengan sanksi hukum. Porak porandanya berita itu yang membikin kita gampang sekali dibohongi. Mengapa kita mudah ditipu? Kali ini ada penjelasan yang meyakinkan dan berbasis penelitian yang mumpuni. Kita mudah dibohongi karena kita paling suka dengan informasi yang menyenangkan. Muncul survai yang menyebut ini pemimpin yang peduli, suka bercengkrama dengan rakyat bahkan hidupnya sederhana. Nama si calon pemimpin meroket ke bursa survai. Spontan kita percaya karena kita butuh pemimpin macam begitu. Di tengah ada banyak pejabat korup, elit politik yang hidup sesukanya dan praktek aparat yang represif pastilah kita butuh jenis pemimpin seperti ini. Andai pemimpin ini jadi penguasa kita bayangkan hidup akan terjamin segalanya. Media membungkus tingkah si pemimpin dengan canggih dan pemilih dengan ikhlas memilihnya. Di kemudian hari kita tahu kalau si pemimpin bukan seperti yang kita harap. Ingat kita gampang dibohongi karena percaya dengan informasi yang menyenangkan.

Sebab berikutnya kita malas untuk bertanya. Kita tidak ingin bertanya lebih jauh: kenapa di masa pandemi rakyat hidup melarat tapi kekayaan pejabat bisa berlipat-lipat. Setiap ada laporan soal kekayaan pejabat yang membumbung tinggi kita percaya memang itu 'takdirnya'. Jadi pejabat kaya itu wajar. Jadi pejabat kok jadi jutawan memang begitu adanya. Bahkan kita tidak sempat bertanya kenapa bisa seorang pemimpin punya anak yang juga terpilih untuk memimpin, lalu punya menantu yang jadi pemimpin. Begitu luar biasakah keluarga itu sehingga semua keturunannya jadi pejabat semua. Ini sistem demokrasi atau dinasti. Benarkah tidak akan muncul masalah jika bapak pemimpin, anak jadi pemimpin lalu istri juga ikut memimpin. Teori mana yang membenarkan gejala itu semua kecuali teori kekuasaan yang otoriter. Kita malas bertanya atau takut bertanya tentang fenomena itu semua. Sudah begitu kita terlalu percaya pada otoritas. Kalau yang omong itu pejabat, rohaniawan atau mereka yang punya titel lengkap seolah semua ucapannya sudah seperti sabda. Tiap kali pejabat bilang bahwa semua usaha yang ia lakukan itu demi rakyat, ikhlas dan tidak mencari keuntungan seakan itu semua seperti sebuah kejujuran yang dibuka terang-terangan. Kita percaya atau setidaknya kita tidak membantahnya. Padahal masalahnya bermula dari sana bahwa pemegang otoritas itu omongannya perlu dikritisi bukan benar-tidak saja tapi juga logis-tidaknya dan apa memang implementasinya selama ini seperti itu. Berulang kali kita menyaksikan elite yang mengucapkan retorika menawan seolah itu adalah pandangannya yang sesungguhnya dan kita malas mendebatkannya. Melihat sebab itu semua maka penting kita untuk berfikir kritis. Apa itu berfikir kritis? Bagaimana berfikir kritis itu dan manfaat apa dari pola berfikir kritis?

Mungkinkah kita berfikir kritis di tengah situasi pendidikan yang memasung diri mahasiswa untuk selalu patuh? Bagaimana berfikir kritis jika lingkungan sekitar malah menuntut kita untuk tidak banyak bertanya dan percaya pada niat baik semata? Bagaimana berfikir kritis kalau yang dihadapi adalah argumentasi yang menyerang pribadi bahkan menghakimi? Untuk menjawab ini semua mari kita beranjak pada bagaimana sebenarnya berfikir kritis itu serta bagaimana menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.

Paulo Freire, tokoh pendidikan Amerika Latin, mengutarakan proses berfikir itu dari problematisasi. Problematisasi adalah menyoal hal-hal yang nyata, mengangkat problem sosial yang konkrit, menyentuh kehidupan sehari-hari. Melalui langkah problematisasi berfikir kritis dimulai dengan dialog secara terbuka atas masalah nyata yang dihadapi. Dengan mendialogkan masalah orang diajak untuk terlibat sebagai subyek bukan objek yang semata-mata ditumpahi informasi. Lewat masalah yang konkret orang diajak terlibat seputar masalah di lingkungannya, bagaimana dirinya sebagai subyek yang berdaulat dan caranya memerankan diri. Langkah problematisasi yang membuat seseorang tidak mudah dijebak oleh propaganda atau pesan palsu yang dikatakan berulang-ulang. Tiap ada informasi atau pernyataan selalu ada upaya untuk melihatnya sebagai masalah yang perlu didiskusikan. Bahkan jika itu adalah peraturan atau ketentuan hukum sekalipun. Problematisasi mengantarkan orang untuk berfikir kontradiksi. Sebab setiap gejala sosial pasti menimbulkan efek yang berbeda pada setiap orang. Meski keputusan politik untuk menerbitkan UU Cipta Kerja itu didasari oleh keinginan membuka lapangan kerja tapi pada kenyataannya upah para pekerja setelah pemberlakuan UU Cipta Kerja menimbulkan persoalan yang bahaya. Upah tidak didasarkan pada pemenuhan kebutuhan hidup tapi pertumbuhan ekonomi. Ukuran yang lebih abstrak serta tidak memihak pada kepentingan para pekerja. Itu artinya ketentuan dalam UU Cipta Kerja tidak menguntungkan para pekerja malah dianggap memberi kekuasaan berlebihan pada pengusaha. Begitu pula dalam revisi UU KPK yang dampaknya pada diamputasinya wewenang komisioner KPK bahkan dikeluarkannya pegawai KPK yang punya integritas segala. Semua itu punya arti sederhana: tiap keputusan politik selalu punya efek yang kontradiktif, baik untuk penguasa apalagi rakyatnya. Melalui pengenalan kontradiksi kita akan belajar lebih mendalam akar dan penyebab masalah sosial.

Karena itu berfikir kritis itu selalu praxis. Selalu ada kaitan antara teori dengan praktek. Percuma kita bicara soal keadilan kalau tidak menuju pada upaya melawan ketidak-adilan. Karena berfikir kritis itu selalu berkait erat dengan kehidupan masyarakat sehari-hari. Disini berfikir kritis itu mengajak orang terlibat dalam proses perubahan: ajakannya tidak hanya orang memahami persoalan tapi mengajak orang terlibat aktif mengatasi masalah. Melalui pola berfikir kritis subyek diajak untuk secara langsung terlibat menggerakkan perubahan lewat cara apa saja: propaganda atas masalah yang muncul, mengajak orang untuk terlibat hingga bagaimana berjuang untuk sebuah perubahan. Mengerti masalah bukan dalam pemahaman teoritis melainkan melibatkan diri untuk mengatasi dan memecahkan masalah. Tahu bahwa revisi UU KPK membawa petaka maka tindakan yang nyata adalah berkampanye atau melibatkan diri dalam protes menentangnya. Maka berfikir kritis selalu curiga pada semua praktek kapitalisme. Segala bentuk akumulasi modal itu mengundang bahaya dan membawa problem ketidak-adilan itu menjalar kemana-mana. Didasarkan atas praktek brutal kapitalisme yang memeras tenaga kerja untuk keuntungan lebih dan merusak lingkungan demi ekspansi modal terciptalah manusia yang dinamai Homo

Economicus. Tipe manusia yang dicirikan sebagai berikut: kepentingan diri sendiri adalah penggerak utama tindakan manusia, jadi semua tindakan dibenarkan asalkan untuk pemenuhan kepentingan diri sendiri. Membiarkan anak dan menantu jadi pejabat di saat bersamaan dirinya menjadi penguasa adalah cerminan tindakan ini. Kedua meletakkan diri sendiri sebagai pusat pengetahuan segalanya sehingga preferensi kepentingan diri merupakan dasar penetapan aturan apa saja. Ketiga efeknya adalah segala tindakan ukurannya adalah 'kalkulasi rasional': usaha sistematis menimbang prospek keuntungan, kerugian dan pemuasan preferensi.¹ Berfikir kritis juga selalu menentang positivisme. Positivisme yang dipahami sebagai 'penyerahan realitas sosial kepada bentuk-bentuk yang dapat dikalkulasi dan dikontrol' dan mereduksi 'dunia sosial menjadi pola sebab-akibat, seolah-olah pengetahuan itu tidak punya kepentingan'. Di balik perubahan regulasi yang hanya menguntungkan kaum investor tersembunyi cara berfikir positifis: datangkan investor sebanyak-banyaknya pastilah kemakmuran akan tercipta. Gaya berfikir ala Orba itu tidak berhitung sama sekali kerusakan lingkungan yang ditimbulkan, hilangnya sumber nafkah yang menghidupi warga sehari-hari hingga bagaimana proses pendidikan yang berpusat pada pemenuhan kepentingan pasar. Seluruh praktek pembangunan yang bertumpu pada peningkatan pertumbuhan ekonomi itu niscaya akan menimbulkan bencana alam yang kini mulai dirasakan dimana-mana. itulah praktek pembangunan yang dituntun oleh ideologi positivisme.

Karenanya berfikir kritis sekaligus memberikan kritik ideologi. Ideologi sering dianggap sebagai kesadaran palsu, atau keyakinan yang tidak ilmiah. Padahal ideologi bisa menjelaskan hubungan sosial dan mengungkapkan kepentingan dalam kekuasaan. Ideologi memiliki kekuasaan untuk memperkenalkan, menghasilkan, menentang dan mengubah makna. Secara umum melalui penentangan itulah berfikir kritis mulai melontarkan pertanyaan-pertanyaan dasar tentang bagaimana masyarakat ini tumbuh kalau hanya bertumpu pada sendi hukum yang tidak adil, didukung oleh elite politik yang korup serta regulasi yang mengundang bahaya. Bagaimana masyarakat bisa tumbuh sehat kalau dikelilingi oleh rasa kecewa pada layanan publik, tidak diberi ruang kebebasan menyatakan pandangan hingga kekuasaan hanya diduduki oleh orang itu itu saja. Pernyataan J.K Galbraith memberi wawasan kritis atas pembangunan yang tidak mengindahkan demokrasi. Pernyataanya seperti mewakili keresahan kita atas situasi hari ini:

Bagaimanakah seharusnya masyarakat yang baik itu? jika dirumuskan se jelas mungkin, hal-hal apa yang seharusnya kita tuju? Sesudah mengakui adanya jurang yang dalam antara yang si kaya dan si miskin, secara praktis bagaimanakah jurang itu bisa ditutup? Bagaimana dengan pelayanan negara: bagaimana hal itu bisa diberikan lebih merata dan efisien? Bagaimana lingkungan hidup bisa terpelihara, sekarang dan nanti? Bagaimana dengan imigrasi, migrasi dan para migran? Bagaimana dengan kekuatan militer?² Jadi jika dirangkum dalam bahasa yang mudah dan singkat: ajakan berfikir kritis menantang kita untuk mempertanyakan secara tandas situasi sosial yang kita alami sehari-hari. Tiap pertanyaan itu akan membawa kita untuk menyadari tatanan struktur ekonomi dan politik

¹ Lihat B Herry Priyono dalam *Homo Oeconomicus: dari Pengandaian ke Kenyataan*, dalam I Wibowo & B Herry Priyono (editor). (2006). *Sesudah Filsafat (Esai-Esai untuk Franz Magnis Suseno)*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.

² Lih Donald B. Calne, *Batas Nalar (Rasionalitas dan Prilaku Manusia)*, KPG, 2004

yang kerap kali harus dihadapi, ditaklukkan dan dilawan. Melalui praktek berfikir kritis kita sebenarnya diajak untuk terlibat aktif menggerakkan perubahan, menampilkan tatanan alternatif dan melawan status quo. Sikap kritis pula yang muncul belakangan saat sejumlah aktivis mengutuk praktek otoriter Rezim Suharto. Lewat Forum Demokrasi muncul himbauan agar masyarakat tidak bersikap *nerimo* (menerima) saja, masyarakat perlu menumbuhkan budaya kritis dan membebaskan diri dari sikap apatis. Uraian apa itu berfikir kritis dibebankan dengan bahasa propagandis:

Daya kritis adalah kemampuan untuk meninjau persoalan dengan lengkap, jernih dan tajam. Untuk mampu memisahkan antara mana yang benar dan tidak, mana kulit dan mana isi, antara penampilan dan inti... daya kritis adalah memeriksa, menyelidiki, menguji, mengungkapkan yang terselubung. Dan tidak pasrah atau terserah... maksud sebenarnya daya kritis adalah membuka dan menguraikan masalah, sehingga jelas yang semu dan yang asli...

Jadi jelaslah berfikir kritis merupakan tradisi berfikir aktivis pergerakan. Tentu kesadaran kritis tak bisa dicangkokkan begitu saja: butuh dilatih, dihidupkan dalam praktek sehari-hari dan dirasakan manfaatnya. Dengan kata lain melalui berfikir kritis rakyat tidak gampang dimanipulasi, diindoktrinasi dan bahkan dinodai harkat kemanusiaannya. Sedang bagi para aktivis berfikir kritis akan membuat mereka keluar dari sikap apatis, atau oportunistis. Tapi bagaimana melatih untuk berfikir kritis? Berfikir kritis ditandai dengan keterkaitannya pada realitas yang konkrit. Realitas yang akan membuatnya bertemu dengan dominasi kelompok elit tertentu pada rakyat kebanyakan, hegemoni pada pendidikan, kebudayaan hingga sistem ekonomi serta membesarnya perjuangan untuk emansipasi. Di atas realitas konkret itulah akan berjumpa kita dengan serangkaian masalah ketidak-adilan yang meyentuhkan semua ranah kehidupan. Perjumpaan dengan realitas konkret memunculkan modus berfikir 'membongkar'. Di atas realitas konkret ada kesadaran atas kontradiksi-kontradiksi yang muncul secara terang-benderang: mengapa di saat pandemi rakyat makin miskin tapi sebaliknya harta kekayaan pejabat tambah berlipat? Itu contoh yang paling menyolok bagaimana kontradiksi muncul.

Maka modus berfikir kritis biasanya dikaitkan dengan penggunaan idealitas masa lalu untuk menilai situasi sekarang: teori kritis tidak menafikan masa lalu sepanjang nilai-nilai itu bermanfaat bagi proyek emansipasi. Melalui sejarah kita dapat belajar banyak bukan pada 'peristiwanya' tapi 'proyek emansipasi' yang secara berhasil dilakukan. Sebagaimana Takashi Shiraizhi membeberkan episode perjuangan kaum pergerakan di masa awal-awal Abad 19: sebuah perlawanan yang secara intensif mampu meruntuhkan hegemoni Hindia-Belanda. Masa dimana kaum pergerakan menemukan 'musim seminya' yang dapat digunakan sebagai pelajaran penting untuk para aktivis dalam menentang era otoriter.

Melalui tradisi kritis itulah keberpihakan mewujudkan: menolak dengan keras tiap praktek politik yang otoriter dan diskriminatif. Bentuknya adalah melawan segala bentuk aneksasi terhadap para petani yang tanahnya dirampas, buruh yang hak hidupnya dipotong, mahasiswa yang dijebak oleh komersialisasi kampus hingga pembakaran tempat ibadah oleh mereka yang selalu menganggap diri benar. Keberpihakan ini wujud dari berfikir benar,

3. PENDIDIKAN KAUM TERTINDAS

“Segala apa yang dilakukan kaum tertindas adalah benar” –George Orwell

Siapa yang disebut sebagai orang tertindas? Freire mengatakan orang tertindas itu cirinya: *pertama*, mereka mengalami alienasi dari diri dan lingkungannya, tidak mampu menjadi subyek yang otonom, tetapi hanya mampu melegitimasi orang lain; *kedua* orang tertindas itu mengalami *self depreciation*, merasa bodoh, tidak mengetahui apa-apa, bahkan selalu merasa sebagai bejana kosong saat berhubungan dengan orang lain. Definisi ini membawa kita pada serangkaian kenyataan betapa banyaknya jumlah orang yang ditindas itu: pekerja yang diabaikan hak untuk hidup bermartabat, petani yang dirampas tanahnya hingga rakyat yang dikorupsi anggarannya melalui setoran pajak pada negara.

“Tiap pemimpin yang menyerbukkan dirinya ke dalam golongan rakyat telah mengetahui lebih dahulu, bahwa hidupnya tidak akan senang, bahwa ia tidak selama-lamanya akan tidur di atas kasur kapas yang enak” – Bung Hatta

Saat para pemimpin itu dibuang ke Boven Digul ada banyak pelajaran yang dapat dikutip—sebagain rangkaian bentuk penindasan kolonialisme Belanda. Boven Digul bukan tempat yang elok: tapi kawasan yang masih berbentuk hutan belantara. Tempat yang saat itu masih primitif tetap mampu membuat para pejuang Republik itu tidak menyerah dan takluk. Hatta dalam buah pemikirannya seperti memberi petunjuk pada kita yang ada di saat ini. Ketika penindasan terjadi dengan luar biasa maka seorang aktivis musti pulang kembali pada pikiran atau keyakinan-keyakinan dasar. Sebuah suaka yang membuat seorang aktivis tidak gampang tunduk apalagi menyerah. Hatta menuliskan itu dengan kalimat yang dalam:

“...siapa yang hidup dalam dunia pikiran, dapat melepaskan dirinya daripada gangguan hidup sehari-hari..”

Pemerintah Hindia Belanda yang otoriter itu bukan hanya mengutit semua tindakan para pejuang Republik, tapi memenjarakan hingga membuang tanpa proses peradilan yang adil dan terbuka. Gaya pemerintahan yang otoriter itu pasti melukai dan mengancam setiap hari aktivis yang melawannya. Maka kata Hatta usaha untuk keluar dari kukungan perasaan terancam itu bisa diperoleh jika seorang kembali pada alam pikiran dan hati nurani, bukan untuk melarikan diri tapi ‘penerangan pikiran dan hati’. Itu sebabnya dalam masa-masa pembuangan yang keji semua tokoh Republik malah melahirkan karya-karya terbaiknya: Sjahrir menulis traktat perjuangan waktu dibuang ke Banda Neira, Soekarno saat dibuang ke Ende dan Tan Malaka waktu diburu-buru oleh penguasa kolonial.

Keberanian hidup dengan mempertahankan prinsip itu yang langka. Prinsip itu tidak didapat hanya dari pengetahuan atau bacaan melainkan lingkungan dan realitas kehidupan. Pada diri pendiri Republik situasinya memungkinkan: dipadati oleh aktivis yang dibesarkan di lingkungan gerakan yang masih bersih dari ambisi rakus, berdebat dengan disiplin pengetahuan yang cukup lalu keberanian untuk tetap mempertahankan ide yang didasarnya sebagai kebenaran. Maka keyakinannya bukan lagi tegas tapi teguh sehingga tidak gampang takluk apalagi dibujuk. Resiko selalu menjadi buah perhitungan yang pasti

dalam bertindak. Hatta mengatakanya dengan gamblang: 'siapa yang takut dilamun ombak, jangan berumah di tepi air'

Sehingga ketika Sjahrir akhirnya dibuang, dijauhkan dari keluarga dan dipaksa hidup dalam pengasingan ia menulis dengan keyakinan bulat:

".....diingatkan pada segala sesuatu yang mengikat aku pada nasib dan penderitaan bangsa yang berjuta-juta ini...bukankah kesedihan kita pada akhirnya hanya sebagian kecil saja dari penderitaan umum yang besar, yang umum itu? bukankah justru penderitaan itu merupakan ikatan kita yang semesra dan sekuat-kuatnya? Justru sekarang-pada saat aku barangkali harus berpisah untuk selamanya dengan yang paling kucintai dan yang paling indah bagiku di dunia ini— justru sekarang inilah aku merasa lebih terikat pada bangsaku, aku semakin mencintainya lebih daripada yang sudah-sudah..."

Mengingat itu semua amat penting pada hari-hari otoriter ini. Tiap saat akan ada resiko yang ditanggung pada siapa saja yang menggerakkan perubahan. Nasib mereka bisa saja sama dengan pejuang sebelumnya: dikriminalisasi, di penjara atau dihilangkan. Tapi mengikuti hikmah dari semua itu kita jadi ingat apa yang dituangkan oleh Hatta saat di pembuangan: *ada topan menanti di depan, jangan kehilangan akal dan jangan kehilangan kepala*. Frasa ini yang menutup semua pernyataan akan pentingnya bertahan pada prinsip dan tidak takluk hanya karena teror. Tiap pembangkangan selalu berlawanan dengan kepentingan kekuasaan dan karenanya akan ada banyak usaha untuk menyudahinya. Sekali lagi kuncinya adalah bagaimana aktivis bertahan dengan prinsipnya sembari menakar resiko serta cara untuk mengatasi jika persoalan makin gawat.

"Tergantung kepada kekuatan jiwa manusia, apakah ia akan tunduk kepada kemauan yang gelap, ataukah ia akan menaklukkan yang menindasnya" - Walther Rathenau



STUDI KASUS:

Pada tahun 1933 di Hindia Belanda dilakukan penelitian ilmiah oleh para akademisi tentang 'ekonomi rakyat'. Penelitian selesai diadakan dan pada tanggal 26 Oktober 1933 lalu diumumkan hasilnya oleh Direktur *Binnenlandsbestuur* (Kemendagri Hindia Belanda) dalam sebuah laporan kepada *Volksraad* (Dewan Rakyat). Penelitian menyimpulkan bahwa menjadi mungkin bagi orang dewasa hidup dengan biaya dua setengah sen sehari. Sampel penelitian itu sudah ditentukan yaitu terdiri dari 5 keluarga pekerja yang diteliti selama lima bulan berturut-turut, ditambah 15 keluarga petani. Melalui pengumuman penelitian tersebut Pemerintah Hindia Belanda hanya ingin mengesahkan tindakannya untuk menaikkan pajak rakyat. Hasil penelitian yang muncul dari pemerintah kolonial Hindia Belanda itu dikritik oleh Soekarno dan Hatta. Bung Karno dengan gelagar pidatonya menyerang hasil penelitian konyol itu, dituduhnya Belanda tidak mampu membedakan antara terpaksa hidup dengan dua setengah sen sehari dan cukup hidup dengan biaya sebesar itu, membongkar taktik licik di balik upaya penelitian yang seolah-olah ilmiah. Di sisi berbeda dengan Bung

Hatta yang mengorek lebih mendalam. Penelitian yang dikatakan ilmiah itu dianggap 'ilmunya salah pasang' dan kalau penelitian itu hanya mengamati 20 keluarga untuk mewakili seluruh Nusantara maka 'praktiknya salah ukur'. Hatta berkata, kalau mau berhitung sebenarnya bukan saja dengan dua setengah sen, dengan nol sen pun rakyat bisa hidup kalau ia sudah terbiasa hidup dengan memetik buah dari pohon-pohon, dengan umbut atau daun rumput. Hatta dengan jeli membongkar pengetahuan sebagai alat kekuasaan, maka pertanyaan yang penting menurut Hatta, bukanlah dengan beberapa orang dapat hidup, akan tetapi dengan berapakah orang dapat hidup selayaknya sebagai manusia. Dua sosok ini mewakili tradisi kritis dalam berfikir. Paling tidak mereka telah mempersoalkan ideologi di balik "cara ilmiah" yang dilakukan pemerintah Hindia Belanda dalam 'mengelabui' rakyat serta mempertanyakan 'metode' yang diterapkan. Cara Hatta mengungkapkan kritik telah menyatukan beragam faksi dalam pergerakan: seenggol sehari memberi dampak signifikan untuk melucuti keculasan pemerintah kolonial Hindia Belanda. Dikemudian hari Hatta tetap mempertahankan sikap kritisnya, bahkan terhadap kebijakan Soekarno pada masa Demokrasi Terpimpin. Sikap kritis itulah yang menjadi panduan berpolitik para aktivis pergerakan dan kaum terdidik di era Soekarno-Hatta.



BERIKAN PENDAPATMU?

Apakah Praksis Pendidikan Kritis ada di sekitarmu? Tulis analisa singkatmu dibawah ini kawan:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

TAKTIK-TAKTIK KAMPANYE:



ISINYA TERGANTUNG SIAPA YG NULIS



Ayo ikuti aksi ini. Merapat!
*Aksi Solidaritas
*Turun_ke.Jalan

Sebarakan! Yang nyebarkan dapat pahala.



Mastekko Left

Parahadirin Left

BAB 2

ANALISA SOSIAL DAN RISET AKSI

“bila kaum muda yang telah belajar di sekolah dan menganggap dirinya terlalu tinggi dan pintar untuk melebur bersama rakyat ...dan hanya memiliki cita-cita yang sederhana, maka lebih baik pendidikan itu tidak diberikan sama sekali” - Tan Malaka.

Overview

Gap teoritis dengan kondisi empiris selalu menghantui—benalu dalam gerakan atas sikap menara gading antara “intelektual” dengan akar rumput. Di sisi lain ketidakcukupan memahami peta sosial-politik yang dihadapi oleh aktor-aktor gerakan, berkelindan ditengah kemerosotan demokrasi, pengekangan kebebasan sipil hingga meluasnya praktek-praktek represi. Sub-bab ini memberikan ulasan mengenai alternatif ‘cara’ dalam melakukan analisis sosial, memahami perubahan ekonomi-politik dan mengidentifikasi aktor-aktor yang terlibat pada perubahan serta kemungkinan kolektif yang bisa dilakukan.

Substansi

Sub-bab kedua mengenai Analisa Sosial terdiri dari empat substansi yang terdiri dari:

1. Analisa Sosial melalui Riset Aksi
2. Hubungan Struktur dan Agen
3. Realitas Sosial Kini: Dominasi, Represi dan Pemasungan Kebebasan
4. Perubahan Sosial: Berjuang Meraih Demokrasi

Melalui pembahasan ini diharapkan dapat merumuskan riset-kajian yang ilmiah-emansipatif-partisipatif guna membangun gerakan kolektif yang kontekstual.

1. ANALISIS SOSIAL MELALUI RISET AKSI

“ Di bawah pemerintahan yang memenjarakan orang secara tidak adil, tempat yang sebenarnya bagi seseorang yang benar adalah juga di penjara ” – Henry David Thoreau

Analisis Sosial: Kenapa Perubahan Progresif Tidak Muncul? Kalau kita melihat fenomena sosial belakangan ini pasti muncul banyak pertanyaan. Baik itu bersangkut paut dengan situasi ekonomi, politik maupun sosial. Aliran pertanyaan itu bisa menyangkut hal apa saja dan dapat disebabkan oleh faktor apa saja. Di bidang ekonomi semua pertanyaan tidak bisa dijawab hanya dengan perspektif tunggal: misalnya sebab kemiskinan yang dapat diketahui melalui berbagai faktor. Bukan hanya kemalasan, keterbelakangan tapi juga bangunan ekonomi yang membawa orang terjerembab dalam kemiskinan. Upaya untuk memahami itu semua secara mudah didefinisikan sebagai analisis sosial. Jika disederhanakan analisis sosial itu cara kita memahami struktur, proses bahkan realitas sosial yang kita alami setiap hari. Analisa sosial secara sederhana dapat dimaknai sebagai sebuah perangkat pengetahuan dan ketrampilan di dalam memahami, menafsir, menjelaskan realitas dan gejala sosial. Ruang lingkup dan orientasi analisa sosial adalah untuk mewujudkan sebuah perubahan sosial melalui prasyarat target aktor yang disematkan memiliki relevansi dan kontekstual dengan target perubahan yang direncanakan berlandaskan pada konsensus atas nilai bersama.

Terhadap sebuah perubahan sosial, rakyat kini bukan himpunan yang sepenuhnya bisa dikendalikan. Teror atau ancaman bukan senjata yang efektif. Bahkan upaya untuk melakukan kriminalisasi akan dilawan dengan berbagai cara. Sekarang pemerintahan berdiri diatas penilaian yang rutin: survai tentang kompetensi pemerintah diadakan lebih sering, skor tentang penegakan hukum, kemampuan mensejahterakan hingga penilaian atas kebijakan publik dilakukan secara berkala. Seluruh hasil survai itu punya dampak ganda: memberi kekuatan pada masyarakat untuk terlibat dalam penilaian kinerja dan kekuasaan tidak bisa bekerja dengan caranya sesuka mereka sendiri. Tapi seburuk apapun hasil survai tak selamanya pemerintah mengikutinya. Pada soal korupsi yang skornya menurun tidak ada gelagat pemerintah memperbaikinya. Malah revisi UU KPK hingga pemecatan pegawai KPK muncul di tengah buruknya penilaian kinerja.

Ketika telah memahami realitas sosial dan pisau analisa sosial yang ada, sebenarnya berada dalam realitas sosial seperti apakah kita sekarang ini? Pandemi memang menghancurkan banyak kehidupan ekonomi rakyat tapi tidak meletupkan revolusi sosial. Walau banyak pengangguran dicetak oleh pandemi tapi kemarahan sosial mampu diredam begitu rupa. Meski angka kematian melonjak secara mengejutkan tapi itu tidak melahirkan protes berkepanjangan. Bahkan meski survai menunjukkan kepercayaan publik merosot pada pemerintah tapi tidak menerbitkan gejolak sosial yang berarti. Segaris dengan itu meski banyak mahasiswa memutuskan cuti-di awal pandemi—karena tidak lagi mampu orang tuanya membiayai tapi aksi massal mendorong kampus murah tidak terjadi. Paling maksimal keluhan itu muncul melalui demonstrasi yang hanya bertahan beberapa hari atau mural yang kemudian dihapus oleh aparat itu sendiri. Mungkinkah kekuasaan itu makin kuat dan sulit untuk ditekan begitu saja? tidak semudah itu menjawabnya karena kekuasaan juga diguncang oleh gempa. Korupsi yang dialami oleh sejumlah menteri dan anggota parlemen memberi skor merah pada penguasa. Begitu pula kritik yang muncul melalui berbagai media yang kemudian langsung dibungkam menunjukkan rapuhnya benteng demokrasi. Sorotan media sosial dengan mudah tertuju pada aparat yang berlaku sewenang-wenang, tanpa kontrol dan nyaris tak terkendali. Kekerasan Polisi diantaranya atau laporan yang tajam dengan tagar percuma lapor polisi. Kini media sosial menjadi salah satu medium protes yang cekatan, handal bahkan mahir dalam mobilisasi opini. Media sosial memudahkan orang-orang yang kesal mengorganisir diri untuk menjatuhkan kredibilitas aparat yang berlaku keji. Kini kekuasaan tak lagi mudah membangun tirani.

Lalu kenapa peran sosial kritis masyarakat tidak mempengaruhi perubahan signifikan di aparat pemerintah? Mengapa luasnya kritik atas kinerja peran pemerintah tidak membuahkan perubahan yang besar dan menyeluruh? Di konteks yang lebih luas mengapa pertumbuhan nilai demokrasi tidak sejajar dengan keberadaan institusi demokrasi? Mungkinkah Institusi itu yang bermasalah atau orang yang duduk di dalamnya yang tidak mampu beradaptasi dengan nilai Institusi? Kalau perubahan itu memang mengacu pada upaya untuk menemukan orang terbaik mengapa situasinya tidak berubah meski orang terbaik itu ada di dalamnya? Mana dulu yang sebenarnya harus diubah orang atau institusi? Dalam bahasa yang lebih sistematis bagaimana hubungan antara orang dan sistem sebenarnya? Pemahaman menyeluruh atas kondisi sosial semacam ini dan tindak lanjut pada pengorganisasian gerakan membutuhkan kerja analisa sosial yang bertautan dengan riset aksi. Analisis sosial sebagai bagian dari kerja-kerja riset memiliki irisan dengan riset akademik maupun riset aksi, yang secara umum dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

Aspek	Riset Akademik	Riset Aksi
Pengumpulan Data	Pengumpulan pengetahuan dengan prosedur formal	Pengumpulan pengetahuan dengan prosedur lebih fleksibel
Aktor	Umumnya dilakukan oleh civitas akademika/kampus	Riset bersama kalangan non-akademik, ataupun bauran basis organik
Tujuan	Menjelaskan realitas	Emansipasi

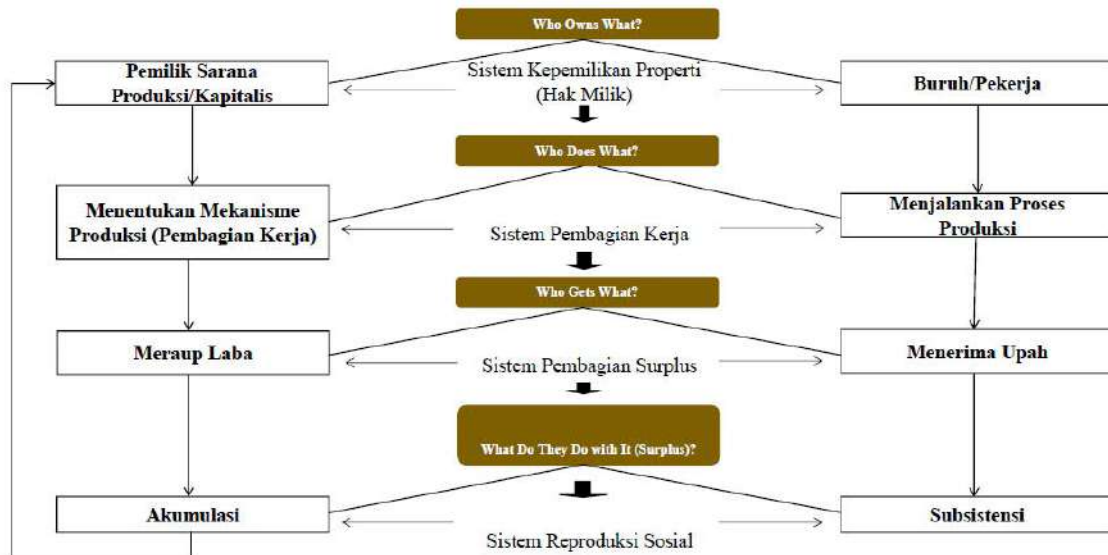
Secara khusus riset-aksi sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari gerakan sosial bekerja dalam konteks produksi pengetahuan yang terintegrasi dengan aksi—praxis melalui agenda pembelajaran bersama guna mewujudkan kehidupan yang lebih adil dan demokratis—emansipatif. Riset aksi memiliki dua paradigma utama yaitu:

Aspek	Pendekatan <i>Social Reform</i>	Pendekatan <i>Radical-Marxism</i>
Posisi Politik	Pragmatisme	Pengumpulan pengetahuan dengan prosedur lebih fleksibel
Fokus	Pusat Kapitalis	Dunia Pinggiran, perperi
Orientasi	Perubahan sosial dalam tatanan yang ada	Pembebasan kaum tertindas
Agenda Strategis	Memperluas partisipasi politik	Perombakan secara radikal struktur ekonomi politik
Teoritikus	Kurt Lewin	Paulo Freire
Tujuan	Menjelaskan realitas	Pembebasan kaum tertindas

(sumber: Muhctar Habibi, 2021)

Pembebasan kaum tertindas sekaligus perlawanan gerakan terhadap rezim penindas melalui perombakan struktur ekonomi politik menjadi nilai sekaligus agenda utama dari kerja riset aksi radikal. Identifikasi awal terhadap kaum tertindas dapat dilakukan dengan cara melihat kesadaran kelas yang dimiliki: merasa inferior dan seolah “butuh” bantuan dari penindas. Setelahnya untuk melihat dan mengkerangkai basis materiil yang dimiliki antara kaum tertindas dan penindas dapat dilakukan melalui pertanyaan riset ekonomi-politik:

Pertanyaan Penelitian (*Research Question*) Ekonomi-Politik



(sumber: Henry Bernstein, 2010; Muhctar Habibi, 2021)

Riset aksi melalui pendekatan ekonomi-politik akan memberikan pemahaman yang memadai tidak hanya pada soal relasi kuasa, perebutan sumber daya dan bagaimana kontradiksi serta reproduksi kelas sosial ada disekitar kita, tetapi juga memiliki implikasi logis pada gerakan sosial dan perubahan sosial macam apa yang akan kita bangun bersama: perombakan secara struktural—menyeluruh.



STUDI KASUS:

Salah satu analisa-sosial dengan pendekatan riset aksi yang dikontekstualisasikan dengan kondisi sosial-budaya Indonesia pernah secara efektif dilakukan oleh Barisan Tani Indonesia pasca kemerdekaan Indonesia, termasuk didalamnya terlibat DN. Aidit. Mengenalkan sebuah metode riset-aksi dengan pendekatan *3 Sama-4 Jangan-4 Harus*. *3 Sama* teraktualisasi dengan cara: (1) *sama* bekerja, (2) *sama* makan, dan (3) *sama* tidur bersama buruh tani atau tani miskin. *4 Jangan* yaitu (1) *jangan* tidur di rumah kaum penghisap di desa, (2) *jangan* menggurui kaum tani, (3) *jangan* merugikan tuan rumah dan kaum tani, (4) *jangan* mencatat di hadapan kaum tani. *4 Harus* meliputi: (1) *Harus* melaksanakan “3 Sama” secara penuh, (2) *harus* rendah hati-sopan santun-suka belajar dari kaum tani, (3) *harus* tahu bahasa dan adat istiadat, (4) *harus* membantu memecahkan kesulitan-kesulitan kaum tani dan gerakan sosial/partai progresif setempat.

Dalam studi kasus kontemporer, misalnya, Serikat Pekerja Media dan Industri Kreatif untuk Demokrasi (Sindikasi) didirikan tahun 2017 sebagai upaya bagi buruh media dan industri kreatif di Indonesia untuk mengorganisir diri—menjadi jaring pengaman dalam menghadapi kerentanan yang dihadapi para buruh

digital. Disamping itu Sindikasi juga melakukan kerja advokasi dan riset-aksi sebagai upaya memahami apa yang sedang mereka dihadapi dan langkah/gerakan apa yang mesti diambil oleh anggotanya. Riset oleh Sindikasi ini salah satunya diterbitkan pada tahun 2021 dengan judul “Pekerja Industri Kreatif Indonesia: Flexploitation, Kerentanan, dan Sulitnya Berserikat”, hasil temuan riset bahwa fleksibilitas yang dijalani para buruh digital justru semakin menekan kondisi mereka, kalkulasi jam kerja justru sangat panjang, tidak mendapatkan jaminan kerja yang memadai—mendorong perlu hadirnya peran dan pembentukan serikat pekerja. Temuan riset Sindikasi ini secara umum menandai realitas sosial sekaligus kontradiksi kapitalisme kontemporer yaitu *precarious work* sebuah pekerjaan yang tidak pasti, tidak stabil, dan tidak aman.



BERIKAN PENDAPATMU?

Bagaimana realitas sosial di sekitar kawan? Apakah ditemui kondisi ketimpangan sosial dan praktik penindasan? Tulis analisa singkat menggunakan pisau analisa ekonomi-politik dibawah ini:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

2. HUBUNGAN STRUKTUR DAN AGEN

Dalam melakukan analisis sosial dan riset aksi hal yang juga penting dipahami dan kaji adalah menyoal relasi struktural dan aktor kepentingan. Orang dan Institusi itu hubungannya pastilah timbal balik, saling mempengaruhi.³ Orang menghidupkan peristiwa sedang insitusi membuat peristiwa itu berulang dan menjadi kebiasaan. Tapi hubungan itu dipengaruhi oleh ruang dan waktu tertentu. Di masa Orde Baru Militerisme hidup melalui kebijakan Dwi Fungsi ABRI. Hampir semua posisi sipil yang penting didominasi oleh ABRI. Waktu ABRI berkuasa maka semua pendekatannya selalu mengacu pada stabilitas. Begitu pula di era otoriter ini dimana peran aparat keamanan tetap mendominasi. Kekuasaan membutuhkan aparat keamanan untuk apa saja: menjamin stabilitas, kepatuhan bahkan menekan jika ada yang membangkang. Itu semua bisa dikerjakan karena agen dan struktur itu memperkuat pengaruhnya melalui serangkaian modus.

Serangkaian modus ini, dalam kondisi aktual terkini telah diciptakan aturan main ala penguasa secara struktural. Melalui bingkai interpretasi para aktor dan struktur itu membangun hubungan timbal-balik. Misalnya, di masa pandemi banyak regulasi diterbitkan. Mula-mula untuk alasan penanganan pandemi tapi lama kelamaan dimanfaatkan sebagai sarana dominasi. Sebagian aturan itu bentuknya pengekangan kebebasan, peningkatan kontrol pada masyarakat bahkan perluasan wewenang negara. Saat masyarakat keberatan atas aturan itu maka dipersilahkan untuk

³ Lihat B.Herry Priyono. (2002) *Anthony Giddens: Suatu Pengantar*. Jakarta: KPG

menggunakan mekanisme yudisial yang disediakan, contohnya melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi atau PTUN. Semua mekanisme yang disediakan itu belum tentu memenuhi harapan masyarakat sipil tapi itulah pola aturan main yang disediakan. Artinya upaya untuk membuat aturan main merupakan cara aktor mempengaruhi struktur. Tapi aturan main yang disediakan membutuhkan 'bingkai-interpretasi' yang penafsirannya bisa menimbulkan polemik. Saat UU Cipta Kerja disahkan bingkai interpretasi yang dinyatakan oleh pemerintah adalah kemudahan membuka lapangan kerja tapi bagi para pekerja UU itu instrumen untuk membelenggu hak-hak para pekerja. Hal yang sama terjadi pada test wawasan kebangsaan pada pegawai KPK yang oleh Ombudsman maupun Komnas HAM dianggap cacat prosedur bahkan melanggar HAM. Tapi semua lampiran rekomendasi itu oleh pemerintah tidak dihiraukan karena ada 'bingkai-interpretasi' yang berbeda. Artinya bingkai interpretasi selalu berkait dengan penolakan dan penerimaan sebuah aturan. Bingkai interpretasi adalah cara aktor dan struktur itu membangun hubungan timbal-balik. Hanya siapa yang bisa memenangkan itu semua sangat tergantung dari bagaimana praktek dominasi dan penguasaan. Jelas penguasa jauh lebih punya fasilitas untuk melakukan penguasaan maupun dominasi. Seperti penguasaan pada parlemen juga kontrol pada partai politik yang ada bahkan penempatan posisi pendukung di komisaris BUMN. Seluruh upaya ini bukan untuk melestarikan kekuasaan tapi penerimaan atas status kekuasaan. Taktik memperluas kekuasaan itu muncul dan meluas seiring dengan kepatuhan orang pada negara. Bagaimana kepatuhan itu terbentuk bukan karena ancaman tapi keyakinan kolektif bahwa semua orang memang 'musti' melakukannya. Bisa karena tuntutan efisiensi atau memang sangat beresiko jika melawan. Jadi struktur dan agen membentuk hubungan timbal melalui berbagai 'sarana-antara'. Itu sebabnya sistem otoriter itu bukan muncul tiba-tiba tapi melalui serangkaian proses timbal balik. Begitu pula jika kita ingin melakukan perubahan dapat diawali dengan mempertanyakan, menyangsikan bahkan mengganggu rutinisasi kekuasaan. Perubahan bisa memunculkan kesadaran ketika muncul pemahaman kalau bangunan politik yang tersedia tidak mampu menopang aspirasi masyarakat yang sedang tumbuh. Prinsip pemaksaan atau bingkai informasi yang disediakan oleh negara tidak lagi dipercaya bahkan cenderung dianggap sebagai berita bohong semata. Sebaliknya hal yang sama bisa terjadi ketika upaya perlawanan itu mengguncang pola 'aturan main'. Ketika tagar lapor polisi percuma itu viral bukan semata-mata gugatan atas profesionalisme Polisi melainkan ketidakpercayaan pada struktur dan aturan main hukum.

Mengikuti Herbert Marcuse dalam susunan masyarakat selalu ada dua dimensi: dimensi afirmatif dan dimensi negatif.⁴ Dimensi afirmatif terdiri atas semua unsur yang membenarkan dan mendukung sistem kekuasaan yang bersangkutan. Sedangkan dimensi negatif terdiri atas unsur-unsur yang menentang struktur masyarakat, misalnya karena mereka merasakan diri diperlakukan tidak adil. Bagi kalangan pendukung perubahan sosial dimensi negatif itulah yang penting, Marcuse bahkan mengatakan: 'kekuatan negatiflah yang menentukan pengembangan pemikiran.' Tapi melalui hubungan timbal balik struktur dan agen itulah maka dimensi negatif itu bisa diintegrasikan. Marcuse menyebut kekuasaan mampu memanipulasi dua nilai paling khas dalam masyarakat modern yakni rasionalitas dan kebebasan. Rasionalitas memberi kesempatan pada semua orang untuk memenuhi kebutuhannya sedang kebebasan telah menjamin seseorang untuk menyatakan pandangannya. Tapi dua nilai itu yang sekarang mulai mengalami kehancuran. Rasionalitas itu dimanipulasi oleh rasionalitas teknologis sehingga menciptakan aturan main yang tak seimbang. Semua aturan main bukan ditentukan oleh tujuannya tapi siapa yang menyusunya. Sulit menerbitkan regulasi yang membatasi ekspansi kapital ketika anggota parlemen dipadati oleh para kapitalis. Begitu pula kebebasan tidak

⁴ Lihat Franz Magnis Suseno. (2013). *Dari Mao ke Marcuse: Percikan Filsafat Marxis Pasca Lenin*. Jakarta: Gramedia

dimiliki oleh semua warga karena tiap orang memiliki kebebasan sejajar dengan modal yang dimilikinya. Bagi seorang oligarki dirinya diberi kebebasan untuk menyita tanah warga untuk kebutuhan ekspansi usaha tapi warga tidak punya kebebasan untuk menolaknya. Manipulasi terjadi saat kebebasan dan rasionalitas dikendalikan oleh segelintir kelompok yang punya kepentingan yang berbeda dengan mayoritas. Bagaimana dominasi dan represi bisa muncul dan bertahan begitu lama sebagaimana terjadi di era Orba?



STUDI KASUS:

Hubungan struktur kekuasaan dan agen ini juga berkelindan bersama para akademisi kampus, misalnya dalam kasus pertambangan oleh PT. Semen Indonesia (PT.SI) di Pegunungan Kendeng Utara, hadir pada tahun 2012 dengan janji kesejahteraan berbasis pertambangan. PT.SI masuk setelah mengantongi izin dari Gubernur Jawa Tengah melalui SK Gubernur 660.1/17 tahun 2012. Gubernur Jawa Tengah (Jateng) saat itu, Bibit Waluyo, beranggapan pembangunan berbasis tambang adalah jalan untuk mengentaskan kemiskinan, dengan asumsi pembangunan pabrik semen dan bentuk investasi lainnya akan menciptakan banyak lapangan pekerjaan bagi penduduk. Diperkuat dengan argumen Djoemali, mantan Ketua DPRD Rembang tahun 2005, yang menyatakan bahwa Rembang tidak mampu keluar dari kemiskinan karena tidak memanfaatkan sumber daya alam mereka: kapur. Dukungan legitimasi juga muncul dari ahli pertambangan ITB, Sulistijo pada 2014, menurutnya penambangan kapur tidak merusak lingkungan selama hal itu menerapkan *good mining practice* dan berwawasan lingkungan. Keterlibatan akademisi ini juga berlanjut dalam sidang lanjutan gugatan izin tambang semen Pegunungan Kedeng Rembang pada Kamis 19 Maret 2015 dimana PT Semen Indonesia menempatkan saksi ahli a.n Heru Hendrayana (dosen Jurusan Teknik Geologi, Fakultas Teknik UGM) dan Eko Haryono (Ketua Program Studi Geografi dan Ilmu Lingkungan, Fakultas Geografi UGM). Kombinasi argumentasi PT.Si, Gubernur Jateng, DPRD Jateng dan Akademisi ITB-UGM ini dianggap menjadi jawaban atas persoalan jumlah penduduk miskin di Jateng per 2007 sebanyak 6,6 juta jiwa yang terkonsentrasi sebagian besar di pedesaan—Rembang, termasuk kategori daerah dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Jateng. Namun bagi koalisi masyarakat Kendeng dan aktivis penolak pembangunan pabrik semen, hal itu justru akan memiskinkan masyarakat sekitaran daerah operasi pabrik semen. Argumen kubu penolak pabrik semen setidaknya didukung oleh fakta ketidakjujuran dari PT. SI dalam pemaparan AMDAL. Diantaranya, konsumsi air pabrik semen berdasarkan paparan PT SI hanya akan menggunakan air permukaan untuk mesin - mesinnya, sisanya untuk MCK karyawan. Padahal di dokumen AMDAL, konsumsi air pabrik selama 5,5 jam setara dengan konsumsi air satu hari penduduk satu kecamatan Gunem Rembang. Sumber konsumsi ini menurut AMDAL PT SI menggunakan air tanah. Ditambah dengan izin konsesi tambang di kawasan konservasi bernama Cekungan Air Tanah Watuputih. Hal ini akan mengancam penghidupan masyarakat Rembang. Akan hadir krisis air, sehingga memaksa masyarakat untuk beli air. Begitu juga petani yang tidak bisa bertani karena irigasi kering. Maka, disinilah kegagalan PT SI untuk

melakukan hegemoni wacana kesejahteraan berbasis tambang, sekaligus menjadi keberhasilan struktur kekuasaan korporasi-politik bercumbu dengan para akademisi kampus.



BERIKAN PENDAPATMU?

Bagaimana realitas sosial di sekitar kawan? Apakah ditemui kondisi ketimpangan sosial dan praktik penindasan? Tulis analisa singkat menggunakan pisau analisa ekonomi-politik dibawah ini:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

3. REALITAS SOSIAL KINI: DOMINASI, REPRESI DAN PEMASUNGAN KEBEBASAN

“Kebenaran itu seperti matahari. Kamu dapat menutupinya sementara waktu, tetapi dia tidak pernah hilang sama sekali ” – Elvis Presley

Kapan sebuah demokrasi mengalami kehancuran? Apa sebenarnya yang menjadi ciri dari merosotnya api demokrasi? Bagaimana demokrasi kemudian disalah gunakan untuk kepentingan politik represi? Apa yang terjadi kalau demokrasi bersanding dengan praktek otoriter? Mampukah demokrasi menahan laju kekuasaan otoriter yang kerap kali memanfaatkan prosedur dan lembaga yang disediakan olehnya? Serangkaian pertanyaan ini mengarah bukan hanya pada daya tahan demokrasi tapi juga bagaimana demokrasi bisa dibajak oleh kekuatan yang dulu dihancurkannya? Kasus Indonesia hari ini bisa dibaca dari bagaimana kita menjawab pertanyaan diatas tadi.

Soeharto menuju tahta dengan dukungan yang luar biasa. Melalui peristiwa 30 September dirinya mengubah peran dari seorang serdadu menjadi pemimpin negara. Kudeta merangkak yang dirancangnya telah membawa jutaan korban yang tak bersalah: eksekusi mati terjadi dimana-mana dan pemenjaraan ribuan orang tanpa pengadilan. Hingga hari ini kejahatan HAM yang dilakukan oleh Soeharto nyaris tak ada yang mengadili. Presiden berikutnya seperti kehilangan memori atas kejahatan yang dilakukan oleh Soeharto bahkan menganggap Orde Baru sebagai era yang patut untuk dipelajari keunggulannya. Resep ekonomi Orba maupun cara membangun stabilitas seperti kaidah suci yang terus menerus diterapkan. Kalau kemudian korupsi merebak dan kejahatan HAM berulang itu semua karena publik kehilangan kemampuan mencium tanda-tanda otoriter dari sebuah rezim yang tampil memimpin. Demokrasi bisa meluncur menuju ototerisme ketika publik kehilangan kemampuan untuk melihat gejala atau tanda peringatan munculnya tirani. Di banyak catatan sejarah kerap kali ‘rakyat’ memang memilih penguasa tirani untuk memimpin. Kemenangan Hitler dan Mussolini bukan karena sebuah kudeta tapi hancurnya ekonomi, tidak solidnya partai politik dan keinginan untuk mencari pemimpin yang bisa atasi masalah dengan segera. Hitler sangat populer dan meraih karir karena para

politisi memberinya kesempatan. Begitu pula Musoliini yang memimpin sayap politik fasis dengan dukungan massa muda yang luar biasa banyaknya. Para pemimpin demagog muncul tidak seketika tapi partai politik memberinya ruang, publik menyodorkan panggung untuk membangkitkan populisme dan survai meletakkanya dalam posisi teratas. Para politisi otoriter itu oleh Steven Levitsky dan Daniel Ziblatt diidentifikasi punya ciri yang seragam.

Diantaranya adalah penolakan aturan main demokrasi baik itu melalui kata-kata atau perbuatan. Seringkali muncul gelagat awal melalui pidato populis yang berapi-api tentang demokrasi yang sudah dikhianati, pengangguran meraja lela dan korupsi yang mencemari segalanya. Balutan pernyataan agitatif itu menjadi trending topik di media massa sehingga menambah aliran dukungan atau simpati. Apalagi ketika kandidat itu dengan mahir menampilkan citra kerakyatan baik melalui penampilan fisiknya maupun cara dirinya memperlakukan orang lain. Secara canggih dirinya mulai meletakkan rakyat dalam posisi tertinggi bahkan memastikan rakyat itu lebih tinggi dibanding konstitusi. Saat dukungan massa yang tampak dari survai-atas popularitas dirinya menguat maka partai politik segera akan memilihnya. Pertimbangannya simpel ia adalah calon yang pasti menang. Demokrasi hancur saat calon dan parpol hanya didasarkan pada popularitas, dukungan mayoritas tanpa diketahui apa isi pikiran serta jejak rekam kandidat. Aturan main demokrasi kalah oleh pertimbangan sempit dan dangkal. Ciri berikutnya yang berbahaya adalah menyangkal oposisi. Semua oposisi diringkus dengan dua cara: pertama mengajaknya untuk terlibat dalam kekuasaan, melalui pemberian jabatan sedangkan yang kedua meletakkanya sebagai lawan yang bahaya, musti direcoki kepengurusannya, dikriminalisasi serta memberi stigma yang buruk pada mereka. Diproduksilah berbagai propaganda buruk pada mereka yang berupaya mengkritisi pemerintah baik itu melalui limpahan berita hoax yang disebar-luaskan oleh para pendukung pemerintah maupun peretasan yang dilakukan dengan dukungan aparat cyber. Dibawah Rezim Otoritarian Suharto, pada oposisi sering diberi stigma sebagai antek-antek asing, sebuah istilah yang seringkali populer untuk merujuk pada LSM yang berteriak keras pada negara. Jika penyangkalan atas keberadaan oposisi terjadi maka kekerasan adalah konsekuensi berikutnya. Para pemimpin otoriter membiarkan kekerasan merebak bahkan mentoleransi berbagai praktek pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat. Disusunlah aturan yang melegalkan penggunaan kekerasan dan malah dengan alasan krisis atau ancaman muncul berbagai tindakan kekerasan yang diakui sebagai langkah prosedural. Tak jarang rezim malah mengakomodasi ruang bagi munculnya rekrutmen warga untuk terlibat dalam persoalan yang berpotensi melanggar HAM. Misalnya yang sekarang populer dengan sebutan komponen cadangan. Para demagog selalu berlindung di balik pernyataan akan adanya krisis atau ancaman eksternal yang bisa memecah persatuan. Luapan kekerasan aparat pada berbagai kasus sengketa agraria menunjukkan fenomena ini semua. Situasi seperti ini yang membuat budaya demokrasi merosot drastis. Merosotnya budaya demokrasi itu bisa ditengarai dari menurunnya toleransi. Isu SARA kian subur terutama saat terjadi kompetisi politik, sebagaimana yang muncul pada Pilkada DKI maupun Pemilu berikutnya. Godaan politisi untuk memenangkan kompetisi dengan segala cara membuat isu SARA mudah sekali digulirkan. Saat kemenangan akhirnya diraih maka muncul polarisasi tajam yang tak mudah dcairkan. Politik bergulir dalam belahan tajam bukan antara yang mendukung pemerintah dan yang oposisi melainkan terpisah pada ras, agama, geografi bahkan 'cara hidup'. Permusuhan berakar kuat bukan pada keputusan politik melainkan pada figur: sehingga gaya komunikasi politiknya menjadi 'jauh lebih panas, agitatif, sangat agresif, terlampau curiga dan membesar-besarkan' Terdapat banyak contoh retorika politik yang seperti ini.

Kalau kondisi demikian yang terjadi maka demokrasi mengalami pembusukan. Pembusukan itu tampak mencolok pada dilanggarnya berbagai norma dasar dalam bernegara. Seperti diamputasinya

KPK melalui berbagai langkah yang secara umum menunjukkan hilangnya komitmen dalam pemberantasan korupsi. Hal yang sama terjadi pada diabaikannya kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu dan masa kini. Begitu pula dengan kembalinya praktek nepotisme dalam berpolitik membuat semangat reformasi benar-benar dikorupsi. Lebih jauh lagi pembusukan itu dibesarkan oleh menyempitnya kebebasan menyatakan pendapat. Jika tiap kritik pada pejabat berakhir dengan tuduhan pencemaran nama baik atau tiap kritik kemudian digenangi oleh balasan caci maki maka udara kebebasan dihancurkan oleh upaya penyesatan. Demokrasi lalu meluncur menjadi pertarungan yang tak berkesudahan. Walau Pemilu sudah berakhir tapi aroma konflik masih hangat. Ditambah dengan situasi pandemi yang membuat pemerintah di samping punya kewenangan yang luas juga berada di bawah sorotan tajam publik. Pandemi bukan hanya mempertaruhkan kinerja pemerintah tapi membuat politik makin menjauh dari tujuan idealnya. Politik makin direcoki oleh kepentingan sempit terutama upaya untuk meraih kekuasaan sebesar-besarnya dengan memanfaatkan kesempatan yang tersedia. Berbagai laporan mutakhir menunjukkan bagaimana kepentingan untuk meraih untung membuat pejabat banyak yang menyalah-gunakan wewenang selama pandemi. Negara bukan hanya tampil secara otoriter tapi elite politiknya berusaha untuk mengail keuntungan dimana-mana.

4. PERUBAHAN SOSIAL: BERJUANG MERAH DEMOKRASI

“Kalau kita tidak mewujudkan keyakinan kita dengan tindakan kita, barangkali itu cuman keyakinan abal-abal” –Snowden

Bagaimana mungkin demokrasi bisa diselamatkan kalau pembusukannya menjalar kemana-mana? Upaya apa yang bisa dilakukan kalau lembaga demokrasi sendiri melucuti nilai demokrasi bahkan menyelewengkannya? Mungkinkah para pejuang demokrasi meraih kemenangan karena di saat yang sama diantara mereka terjadi perbedaan strategi? Bagaimana memenangkan demokrasi kalau jalan menuju kesana dihalangi oleh para eks aktivis pro demokrasi sendiri? mereka yang selalu percaya bahwa kekuasaan ini telah berjalan diatas tali konstitusi dan karenanya harus didukung dengan cara apa saja? mereka yang mulai berada dalam tahta sembari menghapus keyakinan lamanya dan menggantinya dengan pemihakan pada status quo? Jawaban sederhana dan singkat adalah dengan menggalakkan perlawanan. Aksi protes merupakan tindakan paling realistis dan masuk akal untuk memperjuangkan bertahanya demokrasi. Mustahil sebuah rezim yang sewenang-wenang

Kalau suatu aksi perlawanan itu dilakukan oleh para pegiat bawah tanah, maka itu bukanlah saya atau kami...tetapi kalau kamu melihat tetangga-tetanggamu menggelandang televisi mereka di jalan-jalan, maka itu akan membuatmu merasa menjadi bagian dari mereka. Salah satu tujuan para penguasa diktator adalah membuat kamu merasa terasing sendirian.....

Inilah kisah perlawanan rakyat Polandia Selatan, Swidnik, yang melawan kekuasaan diktator dengan tindakan sederhana: keluar rumah saat televisi menyiarkan berita resmi pemerintah. Saat pemerintah menyiarkan siaran berita resmi spontan warga pergi ke luar rumah, jalan-jalan, bercengkrama dan tindakan itu menyebar ke kota-kota lain. Pemerintah tak bisa menghukum warga yang jalan-jalan. Sebal oleh protes warga pemerintah memberlakukan jam malam, yang mula-mula dimulai pukul 10 malam diajukan pukul 7 malam. Apa yang dilakukan warga untuk melawanya? Mereka keluar rumah lebih sore yakni jam 5. Protes unik, berani itu diikuti oleh banyak warga itu

berlanjut pada protes-protes lainnya⁵. Rakyat terlibat itulah yang terpenting. Bahwa protes itu tidak digulirkan oleh aktivis saja tapi semua warga melibatkan diri. Orde Baru saat mulai dihadapkan krisis ekonomi yang membuatnya kehilangan legitimasi mulai diprotes sana-sini. Mula-mula protes itu diprakarsai oleh mahasiswa tapi berangsur-angsur ada banyak warga yang ikut di dalamnya. Disatukan oleh keinginan dan kehendak yang sama untuk mengganti Soeharto bahkan dicabutnya praktek politik Orba. Dwi Fungsi ABRI mulai dicemooh karena kebijakan ini lebih banyak membawa petaka. Terutama saat Soeharto mulai melakukan pembredeilan hingga penculikan pada aktivis mahasiswa. Situasi muram itu diantarkan oleh berbagai berita yang ditulis dengan berani hingga membangkitkan perlawanan kolektif. Bagaimana bangkitnya kesadaran dan solidaritas itu?

Di tahun 1984 di Oxford dan kota-kota Inggris lainnya ada grafiti yang tidak lazim muncul di Anjungan Tunai Mandiri (ATM). Di atas salah satu ATM terpampang tulisan kata: (KULIT) HITAM' yang dibuat dengan cat semprot. Di atas ATM satunya lagi terpampang 'HANYA (UNTUK KULIT) PUTIH' Grafiti itu tidak mengubah apa-apa karena nasabah bebas menggunakan ATM mana yang akan digunakannya. Grafiti itu hanya untuk mengingatkan bahwa ATM Bank Barclay itu terlibat dalam politik segregasi warna kulit. Bank itu ikut mendukung kebijakan apartheid.

Sederhana, cerdas dengan pesan yang langsung. Memilih ATM adalah ide yang segar karena itulah tempat dimana banyak orang mencairkan uang secara mandiri. ATM dijadikan sebagai sasaran untuk mengutuk tindakan lembaga Perbankan, yang akhirnya kemudian menarik modalnya dari Afrika Selatan. Penarikan yang terbesar bahkan menjadi pukulan ekonomi terberat rezim apartheid. Grafiti sama dengan yang dilakukan dengan mural: memberi peringatan, pesan dan kritik yang artistik. Walau mural itu kemudian dihapus tapi goresan perlawanan itu menyebar di banyak kota. Memberi inspirasi orang untuk melakukan tindakan perlawanan bersama.

Pelipat-gandaan pesan perlawanan bisa melalui berbagai model. Mengenakan kaos perlawanan hingga membaca novel Pramodnya dianggap oleh Orba sebagai subversi. Di Estonia salah satu cara melawan rezim Komunis adalah dengan membuat pertunjukan lagu-lagu patriotik yang meratapi hilangnya kebebasan. Judulnya mungkin seperti lagu biasa tapi kandungan pesannya menyimpan harapan orang akan kebebasan. Seorang penyair yang kelak menjadi tokoh oposisi, Heins Valk mengungkapkan suara yang kelak menyatukan emosi massa: 'Suatu hari kelak, tak peduli kapan pun, kita pasti akan menang!' Itu sama halnya dengan Wiji Thukul: penyair yang dihilangkan oleh Orde Baru yang mengungkapkan syair yang menjadi credo perlawanan: 'Hanya ada satu kata: Lawan!'

Kata adalah senjata. Itulah yang dipelopori oleh Zapatista. Menghuni di kawasan hutan di Chiapas Mexico. Kostum yang dikenakan adalah topeng dengan credo: 'yang tanpa suara/tanpa wajah/tanpa nama. Pimpinannya dijuluki dengan sebutan Subcomandante Marcos yang ketika berpidato dalam pembukaan Konferensi International Anti Neoliberalisme menyitir puisi yang panjang. Ia lebih banyak menggali cerita rakyat dengan memajukan strategi perlawanan yang diangkat dari tradisi lokal. Serupa dengan gerakan petani Kendeng ketika melawan ekspansi pabrik semen Gresik. Mereka mengajak semua orang untuk menghargai ibu bumi, merawat dan melindunginya. Kisah perjuangan para petani yang menggali kearifan lokal itu bertahan hingga kini.

⁵ Beberapa kisah perlawanan ini dikutip dari buku yang menarik dan komplis contohnya. Steve Crawshaw & John Jackson, *Tindakan-Tindakan Kecil Perlawanan: Bagaimana Keberanian, Ketegaran dan Kecerdikan dapat Mengubah Dunia*, Insist Press, 2015

Apa arti itu semuanya? Perlawanan itu bukan gelombang keras yang musti diperantarai oleh aksi massa yang militan. Itu juga penting tapi yang jauh lebih utama adalah mengajak rakyat terlibat. Agenda masalah yang kita angkat adalah masalah mereka juga. Saluran kampanye untuk melakukan itu semua memang musti dilakukan dengan berbagai cara-cara kreatif. Tiap tindakan sederhana bisa disebut perlawanan jika itu cara mempertahankan kehidupan yang akan di-aneksasi atau upaya untuk menolak kesewenang-wenangan. Di masa Orde Baru bahkan tidak ikut mencoblos dalam pemilu adalah praktek perlawanan. Mengawasi pemilu juga bagian perlawanan. Lebih jauh lagi praktek perlawanan bisa diungkapkan dengan cara yang paling simpel: menolak ikut program pemerintah seperti Keluarga Berencana yang dulu dipaksa pelaksanaannya atau yang sekarang hanya dengan mengeluarkan kartu merah saat Jokowi berpidato.

Mendidik **AKTIVIS** : Mana Yang Paling **EFEKTIF ??**



DISKUSI

RAME, SERU, TAPI KINI SEMAKIN SEDIKIT PESERTA...

APALAGI Pake online, Banyak Yang ngantuk

PELA-TI-HAN

KERJAKAN ini, KERJAKAN itu...

BUTUH Dana PERDIEM dan SULIT DIUKUR EFEKTIVITASNYA

LIVE IN

TINGGAL BERSAMA-SAMA dengan Yang TERTINDAS

Paling STRATEGIS Tapi JUGA PALING SEDIKIT PEMINAT-NYA

AKSI JALANAN

AKSI PROTES di JALANAN

BERANI, Tapi SANGAT SEMENTARA

BAB 3

GERAKAN SOSIAL: TEORI MENUJU PRAKTEK AKSI

‘Perubahan tidak cukup disandarkan pada teori-ide dan niat baik semata, tetapi juga dibutuhkan manifesto politik, gerakan dan terorganisir massa’

Overview

Perubahan tidak cukup disandarkan pada teori-ide dan niat baik semata, tetapi juga dibutuhkan manifesto politik, gerakan dan masa terorganisir. Bagaimana gerakan sosial secara teori didefinisikan dalam beragam arti dan praktik aksinya telah diinisiasi disetiap lini? Pemahaman menyeluruh selalu penting untuk didalami, menyemai setiap potensi benih resistensi—tentang pendekatan, definisi dan praktik-praktik aksi.

Substansi

Sub-bab kedua mengenai Gerakan Sosial terdiri dari lima substansi yang terdiri dari:

1. Pendekatan Gerakan Sosial
2. Keterlibatan Aktor dan Capaian Gerakan
3. Spectrum Ideologi-Politik Gerakan
4. Pendekatan Gerakan Mahasiswa
5. Kaum Milenial dan Aktivisme Digital

Melalui pembahasan ini diharapkan dapat memahami landasan konseptual-teoritis gerakan sosial dan berbagai modeling praksis aksi termasuk capaian dan kegagalan serta kemungkinan alternatif yang dapat dilakukan di masa depan.

1. PENDEKATAN GERAKAN SOSIAL

Secara mendasar konseptualisasi gerakan sosial dilakukan melalui generalisasi teori Marxis merujuk pada teori eksploitasi dari Karl Marx—kontekstualisasi teori atas realitas aktual dan berbagai praktik maupun bentuk politik perlawanan.⁶ Perkembangan gerakan sosial di era kapitalisme kontemporer dan neoliberal, telah muncul sebagai respon sekaligus implikasi dari subordinasi kapitalisme, komersialisasi kehidupan sosial, birokratisasi masyarakat dan homogenisasi kehidupan melalui intervensi media massa.⁷ Pada kondisi empiris dalam konteks negara kapitalisme pinggiran—*Global South*, termasuk Indonesia, gerakan sosial kontemporer terlibat dalam arena perebutan kendali atas berbagai instrumen politik, terpengaruh oleh relasi kuasa ‘negara’ dan secara simultan memperjuangkan pemenuhan hak-hak atas aspek material, kualitas dan keadilan kehidupan.⁸ Terdapat lima pendekatan utama dalam teori gerakan sosial, yaitu struktur kesempatan politik, framing protes, *repertoire of contention*, struktur mobilisasi sumber daya dan *contentious politics*.

• Struktur Kesempatan Politik (*Political Opportunity Structure*)

Pendekatan ini menempatkan gerakan sosial yang didasarkan pada ketersediaan kesempatan politik didalam struktural dan terbukanya relasi kuasa pada yuridiksi negara.⁹ Struktur Kesempatan Politik dapat terjadi ketika: (1) adanya konflik diantara para elit politik penguasa yang membuka celah bagi aktor eksternal untuk masuk dan mengubahnya; (2) akses terhadap lembaga-lembaga politik formal mengalami keterbukaan; (3) para aktor gerakan berkoalisi dengan para elite dalam sistem [lama] yang bertindak oposisi guna melakukan perubahan; (4) terjadinya ketidakseimbangan politik *a quo* sedangkan alternatif politik baru belum terbentuk.¹⁰ Dinamika kelembagaan politik dan negara semacam ini telah mendorong munculnya kelompok formal dan informal, fragmentasi antar elit penguasa, perluasan perlawanan, koalisi aktor, akses terhadap partai politik dan varian strategi gerakan termasuk respon represivitas yang diberikan terhadap gerakan.¹¹ Struktur Kesempatan Politik sebagai bagian dari “kompromi” politik menjadai pisau bermata dua, di satu sisi melalui koalisi elite oposan dalam sistem *a quo* dengan basis massa eksternal menciptakan masifnya gerakan dan meningkatkan *bargaining position*, namun dilain sisi berpotensi sekaligus terjebak pada agenda perubahan yang sifatnya reformis tanpa mengubah struktur ekonomi-politik kekuasaan—bersifat parsial dan sporadis.

⁶ Tarrow, Sidney. (1998). *Power in Movement: Social Movement and Contentious Politics*. Cambridge: Cambridge University Press

⁷ Lihat Moufee dalam Situmorang, Abdul Wahib. (2013). *Gerakan Sosial: Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Pustaka Belajar

⁸ Phongpaichit, P.(1999). “Theories of Social Movement and Their Relevance for Thailand”, *Position Paper* Thailand Research Fund

⁹ McAdam, Doug, Tarrow, Sidney dan Tilly, Charles. (2001). *Dynamics of Contention*, Cambridge: Cambridge University Press

¹⁰ Tarrow, 1998 op.cit

¹¹ Lihat Brockett dalam Situmorang, Abdul Wahib. (2013). *Gerakan Sosial: Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Pustaka Belajar



STUDI KASUS:

Reformasi 1998 adalah contoh nyata dari model Struktur Kesempatan Politik, konflik antara internal elite Golkar dan petinggi militer dengan Suharto sebagai representasi rezim penguasa bertemu dengan aktor gerakan eksternal baik dari aliansi pro-demokrasi, buruh, mahasiswa dan partai alternatif yang berupaya pengulingan Suharto dan menuntut demokratisasi negara. Pada akhirnya Rezim Orde Baru Suharto memang berhasil digulingkan sebagai “musuh bersama” dan membuka liberalisasi politik sekaligus ekonomi secara umum, namun dilain sisi elite politik dalam sistem lama [yang sebelumnya berkonflik dengan Suharto] justru bertransformasi menjadi kekuatan politik baru tanpa ada perubahan sistem dan struktural ekonomi-politik yang memadai—melahirkan oligarki sempalan Golkar pasca reformasi.



BERIKAN PENDAPATMU?

Apakah model Struktur Kesempatan Politik ada di sekitarmu? Tulis analisa singkatmu dibawah ini kawan:

.....

.....

.....

.....

.....

• Struktur Mobilisasi

Pendekatan struktur mobilisasi menggunakan mekanisme kelompok gerakan sosial yang melebur ke dalam aksi kolektif baik dalam lembaga formal [partai politik, organisasi gerakan] maupun informal—dua variable yang membentuk struktur mobilisasi sekaligus basis rekrutmen massa dan kontributor gerakan. Mobilisasi sumber daya dengan penekan *political interactive*, mendorong pentingnya perubahan struktur kesempatan bagi aksi kolektif dimana aktor penentu keberhasilan berada pada jejaring horizontal yang telah terbangun dengan kelompok tertindas.¹² Dalam pandangan Leninisme bahwa pokok dari gerakan sosial adalah mobilisasi sumber daya dengan menekankan *van guard* (kelompok pelopor).¹³ Daya dan ruang lingkup sumber daya internal yang dimiliki gerakan dan mobilisasi yang tepat menjadi penentu keberhasilan dalam struktur mobilisasi. Ditingkat meso, gerakan terwujud melalui aksi kolektif oleh organisasi gerakan sosial dan beragam kelompok perlawanan, termasuk didalamnya taktik gerakan dan pilihan bentuk organisasi gerakan.¹⁴ Sedangkan secara bersamaan di tingkat struktur mobilisasi mikro, gerakan yang ada terintegrasi dengan serangkaian posisi-posisi sosial horizontal keseharian yang bersifat informal seperti komunitas warga dan jaringan pertemanan. Kelompok informal menjadi basis rekrutmen gerakan sekaligus kontributor penting pada

¹² Tilly, Charles. (1997). *Social Movement as Political Struggle*, diunduh dari <http://www.ciaonet.org/wps/tic03>

¹³ Lenin, Vladimir I. (1970). “The Urgent Task of Our Movement”, dalam *Selected Works*, Vol I, Moscow: Progress

¹⁴ McAdam, D., McCarthy, J.D., dan Zald, M.N.(1996). “The Framing Function of Movement Tactics: Strategic Dramaturgy in the American Civil Right Movement”, dalam *Comparative Perspective on Social Movement Political Opportunities, Mobilizing Structure, and Cultural Framing*, Doug McAdam, John D McCharty dan Mayer N.Zald (eds.), Cambridge: Cambridge University Press

gerakan lokal.¹⁵ Pendekatan mobilisasi sumber daya dalam konteks Negara Selatan, mampu memberikan pemahaman yang lebih luas terhadap interaksi yang terjadi antara gerakan sosial dan kekuasaan negara, intervensi sosial global terhadap aktivisme sosial domestik dan memiliki fleksibilitas yang lebih tinggi dalam mengakomodasi konteks spesifik yang ada di Negara Selatan.¹⁶



STUDI KASUS:

Struktur mobilisasi dapat ditemui, misalnya, pada gerakan Kartini Kendeng menolak Pabrik Semen PT. SI atau komunitas warga Wadas yang menolak penambangan batu di desa untuk material proyek bendungan. Dalam studi kasus Wadas, kelompok formal diantaranya Walhi Jogja, LBH Jogja, FNKSDA dan organisasi mahasiswa (ormawa), sedangkan kelompok informal adalah komunitas warga Wadas itu sendiri. Dalam beberapa kasus kelompok informal justru memiliki militansi dan komitmen gerakan yang lebih kuat, hal ini karna menyangkut ruang hidupnya secara langsung—petani kecil yang melawan hingga akhir sebagai subjek gerakan sekaligus korban pengusuran. Berbeda misalnya dengan organisasi mahasiswa sebagai representasi “kelompok formal” yang cenderung terlibat dalam aksi/aliani kolektif dengan keterbatasan pada “periode kepengurusan” tahunan atau LSM yang keterlibatannya kadang tergantung pada pemberi donor (*funding based*).



BERIKAN PENDAPATMU?

Apakah model Struktur Mobilisasi ada di sekitarmu? Tulis analisa singkatmu dibawah ini kawan:

.....

.....

.....

.....

.....

• **Proses Framing**

Proses framing berkaitan dengan upaya aktor gerakan untuk mempengaruhi wacana dan makna dalam kebijakan publik dengan cara pembentukan framing atas masalah-masalah sosial dan ketidakadilan, terwujud dalam praktik gerakan melalui aksi langsung maupun tak langsung guna menargetkan persepsi dan perilaku kelompok sasaran.¹⁷ Proses framing memformulasikan sekumpulan konsep berfikir dengan menyediakan skema interpretasi atas masalah yang ada lalu menetapkan garis aksi.¹⁸ Terdapat dua variable utama dalam proses framing yaitu: (1) diagnosis

¹⁵ McCharthy, John dan Wolfson. (1992). “Consensus Movement, Conflict Movement and The Cooptation Civic and State Infrastructures”, dalam *Frontiers in Social Movement Theory*, A. Mooris dan C.Clurg Mueller (eds.), New Haven: Yale University Press

¹⁶ Lihat Swain, 2001 dalam Wibowo, Darmawan, et.al. (2006). *Gerakan Sosial: Wahana Civil Society Bagi Demokrasi*. Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia

¹⁷ Situmorang, 2013 op.cit

¹⁸ Snow, David, Louis A. Zurcher dan Robert Peters, (1981), “Victory Celebrations as Theater: A Dramaturgic Approach to Crowd Behaviour”, *Symbolic Interaction* 4 (Spring): 21-42

elemen dengan mendefinisikan masalah dan sumber penyebabnya; dan (2) mengidentifikasi strategi yang tepat untuk memperjuangkan dan menyelesaikan masalah tersebut.¹⁹ Dalam aspek eksternal setiap kontradiksi atas realitas kehidupan sosial yang ada menjadi potensial elemen untuk proses framing dan pertarungan wacana serta dorongan membangun gerakan maupun aksi kolektif. Proses framing akan semakin meluas dan bervariasi—namun dengan tetap memiliki substansial inti—ketika berhadapan dengan beragam aktor. Proses framing dijalankan melalui media masa baik cetak maupun elektronik, buku, pamflet, zine, forum-forum diskusi dan debat publik—hingga melalui medium sosial media dengan konten yang terpersonalisasi.



STUDI KASUS:

Aksi Kamisan adalah model pendekatan proses framing dalam gerakan sosial. Aksi Kamisan dilakukan setiap Kamis sore sejak 18 Januari 2017. Dijalankan melalui aksi langsung dan konsistensi kampanye guna menuntut penuntasan pelanggaran HAM berat di Indonesia dan mengadili para tersangka yang hingga saat ini masih menduduki kursi kekuasaan sekaligus kritik terhadap dekomitmen pemerintah. Hingga akhir Desember 2021, telah tercatat mencapai aksi ke-710 kali. Dalam perkembangan Aksi Kamisan juga meluas dalam kampanye lintas isu seperti represivitas negara, demokrasi dan degradasi ekologi—berbagai kontradiksi atas realitas sosial masyarakat. Modeling aksi yang awalnya berbentuk “aksi duduk-duduk” dengan media poster/banner berkembang dalam mainstreaming wacana kritis di ruang digital dan variasi aksi kreatif lainnya dilapangan—perluasan partisipasi aktor gerakan juga terjadi tidak hanya diisi oleh para pengiat HAM dan demokrasi tetapi juga simpul gerakan mahasiswa maupun individu merdeka. Dalam proses framing gerakan sebagai perlawanan terhadap segala bentuk penindasan, maka diam adalah penghianatan, “Jangan Diam” begitulah tulisan sablon di payung hitam Aksi Kamisan.



BERIKAN PENDAPATMU?

Apakah model Proses Framing ada di sekitarmu? Tulis analisa singkatmu dibawah ini kawan:

.....

.....

.....

.....

.....

• Repertoire of Contention

Repertoire of contention secara sederhana dapat didefinisikan sebagai pilihan bentuk strategi dan taktik aksi kolektif. *Repertoire of contention* adalah serangkaian rutinitas terbatas

¹⁹ Lihat Snow dan Rford dalam Situmorang, Abdul Wahid. (2013). *Gerakan Sosial: Teori dan Praktik* (Edisi Revisi), Yogyakarta: Pustaka Belajar

yang dipelajari, dibagi dan diaktualisasikan melalui proses pilihan yang membebaskan; sekumpulan alat perjuangan sekaligus medium interaksi yang digunakan oleh organisasi-gerakan massa untuk mencapai tujuan; dan berkaitan dengan kompromi antar aktor mengenai batasan maupun bentuk-bentuk aksi yang diterima dan/atau tidak diterima bersama.²⁰ *Repertoire of contention* didalam aksi-aksi kolektif terdiri dari tiga bagian utama yaitu persaingan didalam sistem kehidupan yang dikembangkan, respon sekaligus reaksi pembelaan terhadap hak-hak dasar yang terancam dan tindakan pro-aktif untuk menuntut hak-hak ideal yang seharusnya dapat didapatkan.²¹ *Repertoire of contention* dapat dibangun melalui tiga tahapan meliputi: (1) kodifikasi pengetahuan sosial dan sejarah yang terkait dengan beragam bentuk aksi kolektif yang telah terjadi; (2) generalisasi pertanyaan “mengapa bentuk aksi tersebut berubah atau bervariasi?”; dan (3) hipotesis mengenai hambatan dan tantangan atas pilihan bentuk aksi terkait aspek kemandirian identitas dan kepentingan setiap aktor yang terlibat di dalam aksi bersama.²²



STUDI KASUS:

Studi kasus #GejayanMemanggil—tagar yang diinisiasi Aliansi Rakyat Bergerak (ARB) pada rentan aksi massa tahun 2019-2020, dalam rangkaian konsolidasi dan teknis lapangan, misalnya disepakati bahwa setiap organ yang terlibat tidak diperkenankan membawa atribut bendera organisasi-gerakan tetapi menggunakan pakai bebas-gelap, tidak adanya “pemimpin tunggal-sentralistik” dalam aliansi tetapi fungsi koordinatif setiap komite kerja dan juru bicara dalam fungsi “kehumasan”. Disisi lain secara bersamaan diberikan kebebasan poster kampanye dan model aksi baik dalam bentuk orasi, teatrical hingga konser musik dan keterbukaan terhadap keterlibatan setiap aktor/peserta aksi baik yang bersifat individu maupun organisasi melalui penyediaan panggung terbuka—*open source protest*. Kesepakatan semacam ini merujuk pada evaluasi berbagai aksi sebelumnya yang terkooperasi elite politik sekaligus mendorong deliberasi-partisipasi luas seluruh elemen gerakan maupun tujuan mendapatkan simpati publik melalui cara-cara populer.



BERIKAN PENDAPATMU?

Apakah model *Repertoire of contention* ada di sekitarmu? Tulis analisa singkatmu dibawah ini kawan:

.....

.....

.....

.....

²⁰ Lihat Tilly dalam Situmorang, Abdul Wahid. (2013). *Gerakan Sosial: Teori dan Praktik* (Edisi Revisi), Yogyakarta: Pustaka Belajar

²¹ Tilly op.cit

²² Tilly op.cit

• Contentious Politics

Secara sederhana *Contentious Politics* diartikan sebagai ketegangan politik. Ketegangan politik dalam hal ini terkait dengan mekanisme dan faktor yang mempengaruhi keberadaannya, meliputi lingkungan kehidupan sosial (faktor eksternal), aspek kognitif (perubahan individual dan persepsi kolektif atas realitas), dan aspek relasi (perantara antara individu, organisasi dan masyarakat). Pendekatan *Contentious Politics* lahir sebagai kritik sekaligus melengkapi kekurangan yang telah dikembangkan oleh empat teori utama gerakan sosial (POS, struktur mobilisasi, proses framing dan repertoir) yang dianggap memiliki keterbatasan dalam menganalisa dinamika ketegangan politik—kekurangan sekaligus keterbatasan tersebut meliputi: (1) Sifat statis atas teori dan konsep yang ditawarkan; (2) Ketidakmampuan /tidakmemadai dalam menjelaskan gerakan sosial yang kompleks dan dinamika politik yang luas; (3) Kurang kontekstual dalam mengkerangkai gerakan sosial di negara-negara selatan yang umumnya memiliki kuantitas gerakan berskala kecil dan sistem/rezim politik tertutup; dan (4) Cenderung berfokus pada asal-usul gerakan ketimbang fase perkembangan gerakan sosial.²³ Beranjak pada evaluasi tersebut maka pendekatan *Contentious Politics* memaknai sekaligus memposisikan POS-struktur mobilisasi-proses framing-repertoir sebagai subjek (proses kerja) bukan objek (benda), yaitu sebagai sebuah dinamika peristiwa yang terjadi secara episodik bukan reguler.²⁴ Hal ini memiliki implikasi logis dimana unit dan konteks analisa didalam pendekatan *Contentious Politics* tidak memasukan aktor gerakan dan alat perjuangan yang telah mapan atau fix. Ketidakmapanan ini atas pertimbangan bahwa ketegangan *transgressive* muncul diluar kebiasaan yang ada dan ketegangan politik maupun perubahan sosial sering kali memiliki kecenderungan mereproduksi rezim kekuasaan yang telah ada dengan tempo perubahan berjangka waktu singkat. Tahapan dan prasyarat pembentukan *Contentious Politics* melalui dua hal yaitu: (1) peristiwa/dinamika gerakan terjadi diruang publik ketimbang didalam organisasi pemerintahan ataupun perusahaan; dan (2) melibatkan interaksi kolektif diantara aktor maupun objek yang diklaim, dimana memiliki potensi untuk mempengaruhi satu dengan lainnya.²⁵



STUDI KASUS:

Gerakan #ReformasiDikorupsi adalah gerakan massa yang terjadi diruang publik ketimbang didalam organisasi pemerintahan ataupun perusahaan. Koalisi luas dan aksi serentak di berbagai daerah melibatkan interaksi kolektif diantara aktor maupun objek yang diklaim sebagaimana narasi awal menyoal pelemahan KPK—telah menjadi potensi mengangkat berbagai isu lintas sektoral—bertemu dalam benang merah oligarki, diantara objek isu maupun aktor saling mempengaruhi satu dengan lainnya. Rangkaian aksi #ReformasiDikorupsi dapa dibaca dalam kerangka pendekatan POS-struktur mobilisasi-proses framing-repertoir sebagai proses kerja gerakan, sebagai

²³ McAdam, Doug. (1982). *Political Process and the Development of Black Insurgency 1930-1970*, rev.edn, Chicago: University of Chicago Press; Situmorang, Abdul Wahid. (2013). *Gerakan Sosial: Teori dan Praktik* (Edisi Revisi), Yogyakarta: Pustaka Belajar

²⁴ McAdam, Doug, Tarrow, Sidney dan Tilly, Charles. (2001), *Dynamics of Contention*, Cambridge: Cambridge University Press

²⁵ McAdam, Doug, Tarrow, Sidney dan Tilly, Charles op.cit

sebuah dinamika peristiwa yang terjadi secara episodik—menguat pada rentan 2019 menuju 2020 lalu meredup pasca 2021.



BERIKAN PENDAPATMU?

Apakah model *Contentious Politics* ada di sekitarmu? Tulis analisa singkatmu dibawah ini kawan:

.....

.....

.....

.....

.....

2. KETERLIBATAN AKTOR DAN CAPAIAN GERAKAN SOSIAL

Pemahaman mengenai gerakan sosial juga dapat dilihat dari variable capaian yang berhasil diraih dan aktor-aktor yang terlibat didalam gerakan tersebut. Pendekatan semacam ini membagi gerakan sosial menjadi empat jenis, yaitu:

Subjek/Cakupan Perubahan	Terbatas (<i>Limited</i>)	Radikal
Individual	<i>Alternative Social Movement</i>	<i>Redemptive Social Movements</i>
Kolektif	<i>Reformative Social Movement</i>	<i>Revolutionary Social Movement</i>
<i>Sumber: Davide Alberte, 1966²⁶</i>		

- **Alternative Social Movement**
Gerakan sosial yang dilakukan oleh seorang individu/peorangan dengan cakupan perubahan dan implikasi gerakan yang ditimbulkan bersifat terbatas.
- **Redemptive Social Movements**
Gerakan sosial yang mampu melakukan perubahan secara menyeluruh namun terbatas dilakukan oleh seorang individu/perorangan dan implikasi atas tindakan yang ditimbulkan hanya berdampak kepada individu tersebut.
- **Reformative Social Movement**
Gerakan sosial yang dilakukan oleh subjek massa yang relatif banyak dalam bentuk organisasi-gerakan dan mampu melakukan tuntutan maupun capaian perubahan secara umum namun terbatas pada ruang lingkup tertentu, sektoral dan parsial.
- **Revolutionary Social Movement**
Tipe gerakan sosial paling radikal yang melibatkan basis massa yang luas terorganisir dimana capaian tuntutan dan perubahan yang dilakukan terjadi secara menyeluruh melingkupi perubahan struktural pada sistem kekuasaan maupun tatanan kehidupan yang fundamental dan disertai penerapan alternatif sistem baru.

²⁶ David Aberle. (1966). *The Peyote religion among the Navaho*. Chicago: Aldine.

Penekanan pada aspek derajat perubahan dan keterlibatan aktor telah memberikan pemahaman penting bahwa capaian dari sebuah gerakan sosial sangat ditentukan oleh alternatif perubahan yang ditawarkan dan kolektivitas basis massa yang terlibat dalam gerakan.



STUDI KASUS:

Alternatif Social Movement: seorang mahasiswa tidak terima mendapatkan nilai D lalu melakukan boikot ujian akhir atau mendatangi rumah dosen agar mengubah nilainya. *Redemptive Social Movement*: seorang pemuda yang pindah agama dari agama X ke agama Y atau menjadi ateis. *Reformatif Social Movement*: Reformasi 1998 di Indonesia telah berhasil mengulingkan rezim otoriter Suharto dengan aksi massa luas tetapi tidak mengubah struktur ekonomi-politik. *Revoluntionary Social Movement*: kesenjangan sosial-ekonomi yang tajam sebagai akibat dari rezim kekuasaan oligarkis dan berhaluan neoliberal di suatu negara memicu demonstrasi massa besar-besaran dengan tuntutan perombakan struktural sistem negara dari negara kapitalis menjadi sosialis, atau dari sekuler menjadi teokrasi-khilafah.



BERIKAN PENDAPATMU?

Apa tipe gerakan sosial yang pernah kawan lihat atau terlibat di dalamnya? Tulis analisa singkatmu dibawah ini:

.....

.....

.....

.....

.....

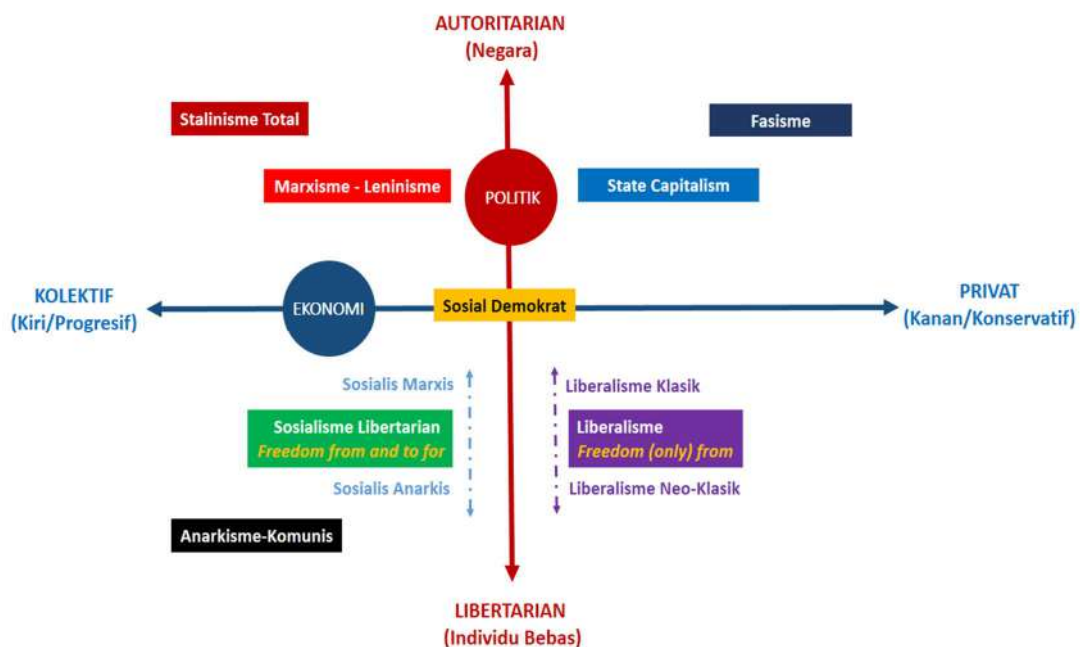
3. SPEKTRUM IDEOLOGI-POLITIK GERAKAN SOSIAL

Ideologi berasal dari kata *Eidos* (Yunani) dan *idea* (Latin), yang secara umum diartikan sebagai pengertian dasar, konsep, ide atau gagasan. Sedangkan *Logos* (Yunani) berarti ilmu. Ideologi adalah kumpulan gagasan yang secara logis berkaitan dan mengidentifikasi prinsip-prinsip atau nilai-nilai yang memberi keabsahan bagi institusi politik dan perilaku aktor.²⁷ Ideologi terdiri dari berbagai unsur pembentuk meliputi nilai/value, konsepsi sifat dasar manusia, visi ideal masyarakat politik dan strategi perjuangan dan taktik politik. Ideologi memiliki enam fungsi dasar yaitu: (1) *Dasar*. Menjadi dasar untuk menentang kekuasaan status quo; (2) *Pedoman*. Memilih kebijakan dan perilaku politik; (3) *Prinsip*. Prinsip perjuangan yang menjadi alat komunikasi simbolis antara pemimpin dan massa; (4) *Kesatuan*. Mempersatukan rakyat/basis massa; (5) *Legitimasi*. Memberikan dasar legitimasi pada pemerintah.²⁸ Adapun ideologi sebagai bagian dari politik memiliki sifat: (1) *Pervasif*. Membentuk

²⁷ Rodee, Carlton C. (1976). *Introduction to Political Science*, 3 Rev Ed edition. New York: McGraw Hill Higher Education
²⁸ Rodee, Carlton C. 1976. Op.cit

keyakinan dan tindakan politik banyak orang dan jangka waktu lama; (2) *Komprehensif*. Menyentuh dan menganalisa berbagai aspek kehidupan kemasyarakatan; (3) *Ekstensif*. Pendukung massa, variasi peran politik dan perluasan lintas negara; dan (4) *Intensif*. Penguat atas komitmen/militansi para pendukungnya.²⁹ Sebagai sebuah “sistem” ideologi dalam “tingkatan teratas” atau inti kemudian diturunkan kedalam manifesto politik – agenda strategis lalu program teknis.

Dalam perkembangannya ideologi politik memiliki beragam varian dari apa yang kemudian sering disebut “kiri” hingga “kanan”, dari yang konservatif, liberal hingga progresif. Klasifikasi semacam ini dilakukan dengan beragam cara, namun perbedaan yang umum digunakan adalah membaginya kedalam “spectrum atau kompas politik” yang didasarkan pada variable politik (kekuasaan) ditandai dengan garis vertikal dan ekonomi (kepemilikan) dengan garis horizontal. Sumbu teratas/puncak dari garis vertikal menandai kekuasaan politik rezim secara penuh (otoritarian) sedangkan sumbu terbawah menandai kebebasan individu secara penuh (libertarian). Adapun sumbu horizontal dari ujung ke dalam/kiri menandai derajat kolektivitas atas kepemilikan ekonomi, sebaliknya sumbu ujung luar/kanan menandai kepemilikan pribadi/individu yang lebih kuat. Dua sumbu vertikal dan horizontal ini kemudian membagi spectrum ideologi politik kedalam empat ruang utama.



- Kanan-Atas. Paling kanan-atas *mentok* yaitu fasisme, seperti Rezim Hitler Jerman dan Musoli Italia. Turun ke tengah-bawah terdapat *State Capitalism*, kontrol secara penuh politik oleh partai tunggal, yang secara bersamaan menjalankan ekspansi bisnis-ekonomi, prinsip-prinsip pasar dan kapitalisasi oleh badan usaha yang dimiliki negara, contoh China pasca “reformasi ekonomi” dibawah Deng Xiaoping pada era 1970-an. Model yang mirip dengan *State Capitalism* namun didominasi oleh kroni dan keluarga penguasa juga sering disebut Kapitalisme Kroni, sebagaimana dijalankan oleh Rezim Otoritarian Suharto di Indonesia.

²⁹ Ranney, Austin. (1990) *Introduction To Political Science*, Five Edition. London: Prentice-Hall International

- Kanan-Bawah. Liberalisme Klasik dengan gagasan pokok kebebasan individu, mekanisme ekonomi pasar berdasar *supply – demand* dan kepercayaan pada *invisible hand* sembari menolak segala bentuk intervensi dan pengaturan [politik] negara. Liberalisme Neo-Klasik berpijak pada unit analisis individu/rasionalitas, distribusi paling efisien adalah pasar, memberikan “porsi” bagi negara dalam hal sebagai regulator dan “fasilitator” pasar melalui berbagai instrumen kebijakan struktural dan regulasi yang *market oriented*. Kedua padangan ini memiliki doktrin “*freedom [only] from*”, secara efektif menjalankan prinsip-prinsip pasar bebas dan privat melalui sistem ekonomi yang kapitalistik dengan “meminimalisir” peran dan fungsi negara. Kontradiksi secara empiris telah meningkatkan kesenjangan sosial-ekonomi dan konsolidasi sumber daya oleh segelintir populasi diatas populasi mayoritas. Contoh Amerika Serikat dibawah kepemimpinan Partai Republik, termasuk liberalisasi ekonomi Indonesia pasca Reformasi.
- Kiri-Atas. Stalinisme, gagasan pembangunan menuju masyarakat komunis ala Josep Stalin pada 1929-1953 di Uni Soviet, ditandai dengan sistem politik partai tunggal, negara dan politik yang tersentralisasi, industrialisasi nasional oleh negara dan kolektivitas pertanian, namun secara empiris terdapat kontradiksi karna menjalankan kediktatoran mutlak melalui pemimpin tunggal dan minimnya ruang demokrasi. Turun kebawah terdapat Marxisme-Leninisme-Maoisme, bersandar pada unit analisa kelas Proletar vs Borjuis, perubahan sosial dilakukan dengan revolusi kaum buruh dengan merebut kepemilikan pribadi/kapitalis, lalu mengelola sumber daya secara bersama-kolektif melalui dewan-dewan revolusioner. *Research question* dari gagasan Marxisme secara ilmiah terdiri dari *Who have what* (kepemilikan)? *Who does what* (pembagian kerja)? *Who get what* (pembagian hasil)? *What do they do with each* (reproduksi sosial)?. Ideologi ini mewarnai gerakan revolusi di Amerika Latin, contohnya Che Guevara di Kuba atau Maoisme di China.
- Kiri-Bawah. Secara mendasar sosialisme adalah kritik terhadap sistem politik dan ekonomi liberal/kapitalis, memiliki standing position *freedom from and to for* (kebebasan dari dan untuk semua). Bekerja dalam perjuangan hak bersama, kepemilikan alat produksi ditangan kelas pekerja dan berorientasi pada masyarakat yang egaliter. Perubahan sosial dilakukan dengan revolusi “tanpa kekerasan” melalui “prosedur konstitusional” menggunakan institusi parlemen dan pemilu—pendekatan evolusi dan reformis. Memiliki varian diantaranya Sosialisme-Marxis, Sosialisme Libertarian, Sosialisme-Anarkis. Ideologi ini secara praksis identik dengan berbagai modeling partai buruh (*labour party*) seperti Partai Buruh di Selandia Baru, partai sosial-demokrat Jerman dan Partai Hijau (*Green Party*) di Eropa. Varian paling ekstrem dari ideologi ini adalah Anarkisme-Komunis yang memiliki orientasi kemerdekaan individu dan kepemilikan bersama, perubahan sosial melalui “revolusi dengan kekerasan” terhadap kaum fasis dan kapitalis serta menolak segala bentuk otoritas—bebas dari hierarki karna kekuasaan dalam bentuk apapun akan melahirkan penindasan. Praksis anarkisme-sindikalis yang identik dengan “gerilyawan kota”, simbolik pakai hitam, logo “A” dan tulisan A.C.A.B masih mewarnai berbagai massa aksi-okupasi-demonstrasi di berbagai belahan dunia—Italia dan Prancis menjadi salah satu episentrumnya.
- Tengah. *Center-Left*, sering disebut sosialis-demokratik/sosdem, ideologi ini mengklaim sebagai “titik temu” dan keseimbangan antara kapitalisme dengan sosialisme melalui kontrol negara yang “cukup” dan demokratisasi politik secara umum. Menjalankan ekonomi dan akumulasi kapital secara “proporsional” oleh pasar, sistem multi partai, sedangkan disisi lain negara mengarahkan agenda industrialisasi nasional dan memfasilitasi *basic need* yang dibutuhkan warga negara seperti layanan gratis untuk pendidikan, kesehatan dan implementasi *universal basic income*.

Contohnya diterapkan dalam model negara sosial-demokrat seperti Jerman dan negara-negara Skandinavia (Eropa Utara)

Bagan ini tidak memasukan feodalisme maupun model monarki karna gagasan ini pada realitas empiris juga berkelindan dengan sistem ekonomi-politik *a quo*, misalnya sistem demokratik di Inggris dan Belanda modern masih mengakomodasi eksistensi kerajaan dan kepemilikan tanah dominan oleh keluarga kerajaan maupun bangsawan [*land lord*], atau beragam model “Emirat” di negara-negara Timur Tengah dikelola dengan prinsip-prinsip pasar [kapitalisme-neoliberal]. Dalam sudut pandang yang berbeda, sebagian teoritikus mengatakan masih eksisnya feodalisme dan monarki juga karna “pasar” dan gagasan kapitalis bisa “adaptif”.

Transformasi ideologi yang beririsan dengan aspek ekonomi-politik dan gerakan sosial juga mewarnai “gerakan kiri” sebagai anti-tesis dari kapitalisme-neoliberal. Gerakan “kiri” sebagai ideologi politik yang secara historis berkaitan erat dengan gerakan sosial juga mengalami evolusi gerakan dari yang berhaluan radikal-revolusioner hingga reformis-moderat.



Dalam perkembangannya nilai-nilai “abstrak” ideologi dalam praktik gerakan sosial kontemporer semakin meluas dan bahkan terfragmentasi ke dalam beragam basis isu/bidang sektoral seperti gerakan lingkungan, HAM, feminisme, masyarakat adat dll. Di sisi lain terjadi kompleksivitas setiap spectrum ideologi ini termasuk varian turunan dan hibridanya—namun pemahaman secara umum telah cukup diberikan sebagai pengantar dasar. Bahwa dalam gerakan sosial tidak ada sesuatu yang netral, setiap ideologi selalu bertarung dari level wacana ide hingga manifesto politik dan berbagai program teknis melalui beragam bentuk organisasi-gerakan.



Berikan Pendapatmu?

Tipe spectrum ideologi-politik gerakan sosial yang pernah kawan lihat atau terlibat di dalamnya? Tulis analisa singkatmu dibawah ini:

.....

.....

.....

.....

.....

4. PENDEKATAN GERAKAN MAHASISWA

Studi mengenai aktivisme dan gerakan [protes] politik mahasiswa terbagi kedalam tiga perspektif teoritis utama yaitu: (1) Perspektif Struktural; (2) Perspektif Kesadaran; dan (3) Perspektif Eklektik.

1. Perspektif Struktural

Pendekatan didasarkan pada relasi struktural antara tripatriit universitas/intelektual-negara-masyarakat. Gerakan mahasiswa muncul atas sebab adanya jarak keterpisahaan universitas dengan masyarakat, krisis inherean dalam diri kaum intelektual, kuatnya kontrol pemerintah terhadap sistem pendidikan, kekecewaan terhadap elit penguasa dalam konteks dimana mahasiswa juga calon aktor elit potensial, perbedaan struktur sosial antara mahasiswa dengan elit politik, terbatasnya intitusi formal yang mengakomodasi ekspresi politik mahasiswa, ketidakstabilan politik nasional, rezim pemerintah yang represif dan otoritarian.³⁰ Perspektif ini memadai dalam melihat gerakan mahasiswa Indonesia dibawah Rezim Otoritarian Suharto, bagaimana kontrol politik-birokrasi universitas dan depolitisasi dijalankan secara efektif oleh Suharto serta pembatasan termasuk represi dilakukan terhadap berbagai bentuk aktivisme politik mahasiswa baik di dalam ruang akademik kampus maupun ruang publik secara umum.

2. Perspektif Kesadaran

Pendekatan dipusatkan pada tiga variable utama meliputi kelas sosial, ideologi dan pendekatan generasi. Organisasi-gerakan mahasiswa dibentuk oleh faktor kelas sosial mahasiswa, ideologi mahasiswa [progresif, liberal atau otoriter/konservatif], perbedaan nilai-nilai antar generasi, tingkat kematangan fase kepemudaan dan berbagai proses sosialisasi politik pemuda, pendefinisian status mahasiswa sebagai kelompok agensi akademik yang provokatif secara politis dan partisan kepada ideologi politik induk.³¹ Perspektif ini memiliki relevansi untuk melihat konteks organisasi-gerakan mahasiswa pasca kemerdekaan Indonesia yang memiliki nalar ideologi

³⁰ Altbach, Philip G. ed. (1981). *Student Politics: Perspectives for the Eighties*. London: The Scarecrow Press, Inc, Metuchen, NJ & London/1981. Terjemahan Hermawan Sulistyio eds. (1988), *Politik dan Mahasiswa, Perspektif dan Kecenderungan Masa Kini*. Jakarta:Penerbit PT Gramedia

³¹ Aron, 1972; Eisenstadts, 1972; Feuer, 1972; Flacks, 1972, Keniston, 1972, Mannheim, 1972; Sanit, 1988; Sulistyio et al, 1988.

dan relasi partisan yang kuat dengan berbagai spectrum ideologi dan praktik partai politik, misal terbaginya organisasi-gerakan mahasiswa ke dalam tiga gerbong utama yaitu berhaluan Marxisme-Sosialis, Agamis-Islamis dan Nasionalis. Di era ini terdapat Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) dengan haluan Marhaenisme afiliasi Partai Nasional Indonesia, Concentrasi Gerakan Mahasiswa Indonesia (CGMI) afiliasi Partai Komunis Indonesia (PKI), Gerakan Mahasiswa Sosialis Indonesia (Gemsos) afiliasi Partai Sosialis Indonesia, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) basis Nahdlatul Ulama dan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) yang terkonsolidasi dan berafiliasi dengan Partai Masyumi. PNI, PKI dan Masyumi adalah tiga partai dominan yang mempengaruhi dinamika politik nasional Indonesia di era Sukarno.

3. Perspektif Eklektik/Alternatif

Posisi teoritis diambil sebagai kritik terhadap perspektif struktural dan perspektif kesadaran yang dianggap tidak mampu mengintegrasikan atau justru memisahkan berbagai variable kunci diantara keduanya.³² *Perspektif Eklektik*, secara teoritis berdiri diatas dua premis utama, yaitu: (1) Fenomena/kondisi empiris universitas yang seolah bertujuan sebagai institusi dalam bidang pendidikan, pengajaran dan penelitian secara bersamaan juga menjadi arena kegiatan politik "oposisi" (aspek struktural); dan (2) Mahasiswa yang aktivitasnya adalah "belajar" cenderung mudah dipolitisasi atau lebih tepatnya menjalankan aktivitas "politik" (aspek kesadaran). Kedua premis ini kemudian menempatkan analisis konfrontasi politik antara pemerintah atau penguasa dengan basis massa mahasiswa sebagai acuan dalam melihat sifat endemik dan radikal aktivisme politik mahasiswa.³³ Adapun kaitanya hubungan politik gerakan mahasiswa dan universitas, teoritikus *perspektif eklektik* menempatkan interaksi dan relasi fungsi struktural universitas dengan kesadaran [politik] mahasiswa. Hubungan klausal ini memiliki tiga dimensi, yaitu: (1) Universitas adalah institusi yang menjalankan "fungsi ganda" dimana hubungan antar fungsi ini menentukan tingkat struktural serta kecenderungan keterlibatannya dalam kegiatan politik; (2) Kesadaran politik para anggota institusi [civitas akademika] ditentukan oleh perannya di dalam maupun diluar universitas, baik yang sudah dilakukan pada masa lalu, kini dan untuk masa depan; dan (3) Kemunculan protes/resistensi dari organisasi-gerakan mahasiswa dimaknai sebagai hasil interaksi kesadaran mahasiswa yang khas dengan kontradiksi-kontradiksi struktural yang inheren dalam fungsi universitas itu sendiri.³⁴ Pendekatan ini, misalnya akan membantu dalam memahami bagaimana intervensi pasar/kapital melalui negara dilakukan dengan skema *structural adjustment policy* telah mereorganisasi tata kelola institusi pendidikan tinggi di seluruh dunia termasuk Indonesia menuju korporatisasi universitas (red: PT-BHMN, PTN-BH). Kondisi semacam ini telah memunculkan berbagai kontradiksi di dalam tubuh institusi pendidikan baik secara étis maupun empiris serta berbagai respon perlawanan organisasi-gerakan mahasiswa terhadapnya yang semakin masif. Dalam konteks Indonesia pasca Reformasi, liberalisasi ekonomi namun tanpa disertai "liberalisasi politik" dalam arti otonomi pemikiran dan kebebasan akademik didalam tubuh universitas.

³² Lihat Lulat dalam Sulisty, Hermawan eds. (1988), *Politik dan Mahasiswa, Perspektif dan Kecenderungan Masa Kini*. Jakarta:Penerbit PT Gramedia

³³ Sulisty, 1988 op.cit

³⁴ Burawoy, Michael, (1976), *Consciousness and Contradiction: A Study of Student Protest in Zambia*, British Journal of Sociology 27 (No.1): 78-97

PEMBANGUNAN ORGANISASI-GERAKAN MAHASISWA

Gerakan mahasiswa setidaknya memiliki dua fungsi utama, yaitu: (1) Menumbuhkan perubahan sosial, misalnya konteks gerakan mahasiswa di negara-negara industri; dan (2) Mendorong perubahan sosial, misalnya konteks di negara berkembang/*Global South*/negara-negara kapitalisme pinggiran.³⁵ Gerakan mahasiswa akan muncul jika terjadi titik temu antara faktor internal dan eksternal. Faktor internal dalam arti segala hal yang menyangkut kehidupan mahasiswa seperti kenaikan biaya kuliah, kualitas fasilitas layanan pendidikan, demokrasi kampus; sedangkan faktor eksternal dalam arti permasalahan kehidupan keseluruhan masyarakat (publik) seperti kesenjangan sosial-ekonomi, problem multi-sektor dan kebijakan rezim kekuasaan.³⁶ Kemunculan sekaligus pembangunan gerakan mahasiswa secara umum melalui tiga tahapan, yaitu: (1) Tahap kecaman terhadap masalah politik-kebijakan publik secara umum; (2) Tahap mahasiswa memusatkan perhatian pada masalah-masalah di dalam universitas; dan (3) Tahap pendirian dan pengembangan secara eksplisit organisasi-gerakan dan/atau partai politik dengan landasan dan penajaman ideologi politik sebagai respon atas realitas yang ada.³⁷ Secara teknis proses ini diturunkan dalam rangkaian proses meliputi: (1) Konsolidasi organisasi-gerakan/lembaga kemahasiswaan; (2) *Brainstroming* dan curah pendapat mengenai isu permasalahan; (3) Pembentukan aliansi bersama dan komite kerja per bidang; (4) Drafting rilis sikap, tuntutan dan kajian; (5) Propaganda dan *campaign* melalui media cetak maupun online dengan menggunakan tagar tertentu; (6) Perumusan teknis lapangan (Teklap) dan garis aksi; dan (7) Pelaksanaan aksi. Didalam struktural organisasi mahasiswa peran kunci biasanya dimainkan oleh forum atau unit bidang advokasi, kajian strategis/riset dan agitasi propaganda.

Adapun terhentinya gerakan politik mahasiswa umumnya berkaitan dengan institusionalisasi politik. Ada kecenderungan penempatan gerakan mahasiswa dalam *pressure politics*—berada di luar struktur dan lembaga politik, tidak melakukan aktivitas politik secara langsung, sekedar bagian dari aktivitas masyarakat umum yang ditujukan kepada lembaga-lembaga politik.³⁸ Disamping itu ada kecenderungan kontradiktif dalam aktivisme mahasiswa, dimana sebagian mahasiswa semakin memegang teguh ketajaman ideologis dan metode-taktik militan, sementara sebagian mahasiswa yang lain berhenti dengan politik ideologis dan berlindung dalam kehidupan "pribadi".³⁹ Sebagai contoh, pasca Reformasi 1998 dan lengsernya Suharto sebagai "musuh bersama" secara politik, membuat mahasiswa "kembali ke kampus" dalam kerja-kerja "event organizer" dan beragam "upgrading softskill". Dilain sisi keterbukaan demokrasi pasca Reformasi telah memicu persemaian kembali berbagai simpul gerakan mahasiswa dengan ideologi kiri diberbagai kampus yang lama dimatikan oleh rezim Suharto. Pada aspek level ketercapaian gerakan mahasiswa terhadap perubahan sosial yang diharapkan, stagnansi atas perubahan memicu "frustasi politik" gerakan mahasiswa.⁴⁰ Hal semacam ini telah berdampak pada beragam penyesuaian diri yang terjadi didalam tubuh

³⁵ Altbach, Philip G. ed. (1981) op.cit; Sanit, Arbit. (1988), "Politik Mahasiswa Diantara Ideologi dan Institusionalisasi Politik atau Kekuasaan" dalam Sulisty, Hermawan eds. (1988), *Politik dan Mahasiswa, Perspektif dan Kecenderungan Masa Kini*. Jakarta: Penerbit PT Gramedia

³⁶ Altbach, Philip G. ed. (1981) op.cit; Sanit, Arbit. (1988) op.cit

³⁷ Lihat Wolfe-Dietrich Webler dalam Altbach, Philip G. ed. (1981). *Student Politics: Perspectives for the Eighties*. London: The Scarecrow Press, Inc, Metuchen, NJ & London

³⁸ Sanit, Arbit. (1988) op.cit

³⁹ Lihat Statera dalam Altbach, Philip G. ed. (1981). *Student Politics: Perspectives for the Eighties*. London: The Scarecrow Press, Inc, Metuchen, NJ & London

⁴⁰ Wolfe-Dietrich Webler (1981) op.cit

organisasi-gerakan mahasiswa, diantaranya: (1) memilih taktik-strategi teror dalam menjalankan gerakan; (2) menarik diri dari aktivitas politik dan mengalihkan ke berbagai bentuk isolasi diri dan kehidupan pribadi; (3) menjauhkan diri dari politik universitas dan masuk ke dalam politik sipil; (4) sebagai besar dari mahasiswa aktif mencoba meneruskan gerakan yang ada dengan cara yang disesuaikan dengan kondisi-kondisi baru.⁴¹ Dalam konteks organisasi-gerakan mahasiswa di Indonesia, hambatan dan kegagalan organisasi-gerakan mahasiswa disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal. Secara internal seperti konflik personal, free rider, terbatasnya masifikasi isu-wacana, mandegnya regenerasi aktor-gerakan dan kajian, kegagalan melakukan institusionalisasi gagasan alternatif, glorifikasi label mahasiswa, pengultusan tokoh/elit individu mahasiswa, aksi terlokalisasi di dalam kampus masing masing dan enggan berkoalisi dengan basis eksternal kampus, terjebak pada relasi patron-kliens partai politik/senior di "Senayan", polemik pendefinisian terkait student movement dengan student government, dan slacktivism dalam konteks gerakan berbasis aktivisme digital. Sedangkan faktor eksternal seperti represi fisik oleh aparat kepolisian/militer/ormas reaksioner/satuan keamanan kampus, sikap oportunistis para elit pimpinan organisasi mahasiswa yang membuat keputusan sepihak melalui politik meja makan, pengkerdilan gerakan oleh elit birokrat kampus melalui taktik moralitas-bapakisme, represi akademik-aktivis mahasiswa dalam bentuk surat peringatan/Drop Out, pembekuan organisasi kemahasiswaan dan pemutusan anggaran kegiatan mahasiswa oleh kampus, dan isolasi-pemecahan basis massa ke fakultas-departemen guna mengurai kolektivitas gerakan. Otokritik umum mengatakan bahwa gerakan mahasiswa akan terpecah menjadi berbagai fokus pengawalan isu/persoalan, target sasaran, strategi, taktik dan terutama adalah masalah soal keagenan.⁴² Sedangkan, di Dunia Ketiga/Negara Selatan, hampir semua gerakan mahasiswa tidak sepenuhnya efektif dan sering kali dikenakan represi oleh rezim penguasa yang jauh lebih efektif dalam menghancurkan gerakan mahasiswa.⁴³



STUDI KASUS:

Aksi Pesta Rakyat 2 Mei UGM 2016 dengan tagar #RevolusiPendidikan, menjadi eksperimen pembangunan gerakan mahasiswa yang dipicu dari permasalahan internal kampus terkait perebutan ruang publik bagi pedagang dan gugatan tunjangan para tenaga didik—bertemu dengan isu umum mengenai intervensi pasar melalui pendekatan neoliberal pada sektor pendidikan tinggi yang berdampak terhadap kenaikan biaya kuliah. Menjadi salah satu aksi terbesar pasca Reformasi 1998 di dalam kampus dengan massa lebih dari 15.000 orang terdiri dari mahasiswa, buruh kampus dan pedagang kantin. Koalisi bersama ini membawa tuntutan UKT, Tunjangan Kinerja Tendik dan pengusuran kantin kampus (Bonbin). Melalui varian aksi pendudukan gedung Rektorat, demonstrasi massa, long march, flashmop, panggung terbuka dan pentas seni. Berbagai gerakan serupa juga disemui diberbagai kampus di Indonesia, tentu disertai beragam bentuk represi. Sebagaimana represi oleh birokrasi kampus terjadi pada rentan 2019-2020, organisasi-gerakan hingga individu mahasiswa yang menyuarakan isu komersialisasi pendidikan dan kebebasan/otonomi akademik

⁴¹ Wolfe-Dietrich Webler (1981) op.cit

⁴² Lihat Levit dalam Altbach, Philip G. ed. (1981). *Student Politics: Perspectives for the Eighties*. London: The Scarecrow Press, Inc, Metuchen, NJ & London

⁴³ Altbach, Philip G. ed. (1981) op.cit

mengalami represi, seperti kasus 11 orang mahasiswa Universitas Darma Persada Jakarta mendapatkan Surat Peringatan, 28 mahasiswa UKI Paulus Makasar di DO, 9 mahasiswa Universitas Bina Insan di skorsing dan 28 mahasiswa Universitas Nasional Jakarta dipanggil ke kepolisian.



BERIKAN PENDAPATMU?

Bagaimana pengalaman kawan dalam mengorganisir gerakan mahasiswa? Tulis analisa singkatmu dibawah ini kawan:

.....

.....

.....

.....

.....

5. KAUM MILENIAL DAN AKTIVISME DIGITAL

Sejarah peradaban dunia termasuk perubahan bangsa Indonesia tidak bisa dilepaskan dari politik mass. Diantara massa aksi tersebut salah satunya sering ditemui “kaum muda”. Kita tentu ingat, Sukarno muda (16 tahun) telah bergabung dengan Tri Koro Darmo, Hatta (21 tahun) sudah berkecimpung mengelola majalah *Hindia Putera* untuk menyuarakan penindasan penjajah, D.N Aidit (19 tahun) mengalang demonstrasi mogok buruh melawan tuan-tuan Belanda atau Tan Malaka muda yang telah terlibat dalam pengorganisirannya pekerja perkebunan sembari mengajar. Dibelahan dunia lain, ruang demokrasi di Abad-21 yang kerap kali disebut era milenial juga diwarnai oleh kaum muda, seperti: (1) Malala Yousafzai (20 tahun) aktivis perempuan sekaligus pemenang Nobel Perdamaian termuda dalam sejarah, diapresiasi atas dedikasinya memperjuangkan hak-hak pendidikan bagi perempuan Pakistan; (2) Alexandria Ocasio-Cortez (29 tahun), *milenial socialist* kulit hitam keturunan kelas pekerja yang mendobrak kemapanan politik di USA dengan berhasil menjadi Senator dan mengalahkan petahana sayap kanan Joseph Crowley pada 2018; (3) Greta Thunberg seorang pelajar SMP yang rutin melakukan demonstrasi damai dan boikot sekolah setiap Jumat demi menyuarakan krisis perubahan iklim karna ekspansi ekonomi dan kerakusan segelintir elit dunia; dan (4) *Joshua Wong* (18 tahun), penggerak Gerakan Payung Kuning Hongkong (*Umbrella Movement*) 2014 dengan tuntutan pemilu yang bebas dan demokratis.

Dalam perspektif generasi, kaum muda pasca Reformasi – kelahiran 1990-an juga dipromosikan dengan label ‘kaum milenial’ yang diklaim sebagai ‘*Digital Native*’. Aktivisme (digital) kontemporer kaum rebahan ini identik dengan jemari jempol dan gawai – memiliki imajinasi utopis bahwa perubahan sosial bisa lahir dari *gadget* diatas ranjang berpeluk bantal. Tipe ini dikenal dengan istilah *Slacktivism*, berasal dari kata ‘*Slacker*’ (pemalas) dan ‘*Activism*’ (aktivisme). *Slacktivism* adalah paradigma aktivisme menjadi ‘minimalis’ dengan ruang partisipasi tidak langsung dan tanpa perlu

turun bertemu secara fisik dengan basis massa lain. Tujuan dari slacktivism mulai dari sekedar menebar *awareness* hingga bagian dari proses aksi politik murni.⁴⁴ *Slacktivism* ini memiliki 3 varian utama yaitu:

- **CLICKTIVISM**
Gerakan dilakukan melalui aktivitas membuka dan mengisi link/tautan/website yang mewacanakan dan mendorong adanya keputusan publik terhadap kawalan isu/kebijakan *on going* tertentu. Para aktor/partisipan gerakan tidak hadir dan terlibat secara fisik kedalam gerakan/massa aksi yang terjadi dilapangan. Contoh pengisian petisi di platform change.org
- **PARTISIPASI IMAJINER**
Gerakan dilakukan melalui aktivitas *click, like and share* melalui sosial media terhadap isu atau gerakan tertentu. Partisipasi termasuk didalamnya terlibat dalam perang dunia maya (twitwar) atau memenuhi kolom komentar/postingan dengan memberikan *statement* baik pro maupun kontra. Orang yang melakukan sebuah like/retwit akan mendaku dirinya sudah mendukung penuh gerakan, sedangkan yang melakukan share/retwit dianggap/sudah merasa telah terlibat aktif dan menjadi aktor utama dalam gerakan. Para aktor/partisipan gerakan tidak hadir dan terlibat secara fisik kedalam gerakan/massa aksi yang terjadi dilapangan. Contoh mobilisasi untuk mencapai #trending twitter
- **DONASI PRODUK/FUNDRISING PRODUK**
Gerakan dilakukan melalui aktivitas pembelian produk dan merchandise tertentu dimana dari setiap pembelian produk hasil penjualan baik sebagian/keseluruhan digunakan untuk mendukung gerakan atau program tertentu. Adapun gerakan atau program yang ada dilakukan oleh pihak/organisasi-gerakan lain yang mana pembeli/donatur produk tidak terlibat di lapangan.⁴⁵

Kehadiran media sosial dalam gerakan sosial khususnya aktivisme digital kontemporer memiliki kelebihan sekaligus kekurangan. Dalam demokrasi deliberatif, media sosial mampu mendorong partisipasi dan mobilisasi massa serta mengalang respon tindakan secara cepat.⁴⁶ Twitwar dan capaian #trending menjadi "kenikmatan" tersendiri bagi para simpul gerakan. Dilain sisi kekurangan dan resiko aktivisme digital tentu turut menghantui, adanya paradoks '*many click but little sticks*' bahwa substansi gerakan sosial melalui platform media sosial hanya mengambang sebagai wacana, berhenti di tombol *klik* dan tidak ada dampak lanjutan bagi gerakan.⁴⁷ Ada keterjebakan trending dan media sosial sebagai tujuan akhir gerakan alih-alih menempatkannya sebatas sarana-medium gerakan untuk membangun gerakan lebih lanjut. Dalam konteks Indonesia, media sosial memang memiliki kemampuan memobilisasi orang dan menaikkan wacana perbincangan masyarakat, tetapi belum

⁴⁴ Christensen, Henrik S. (2011). "Political activities on the internet: slacktivism or political participation by other means?". *First Monday*. Diakses dari <http://firstmonday.org/htbin/cgiwrap/bin/ojs/index.php/fm/article/view/3336/2767>; Phan, Monty. (2001). "On the Net, 'Slacktivism'/Do-Gooders Flood In-Boxes". *Newsday*. Diakses dari <http://www.newsday.com/news/on-the-net-slacktivism-do-gooders-flood-in-boxes-1.386542>

⁴⁵ Phan, 2001 *op.cit*; Christensen, 2011 *op.cit*

⁴⁶ Lim, Merlyna, (2014), "Seeing Spatially" People, Networks, and Movement in Digital and Urban Space', *International Development and Planning Review*, Vol.169, hlm.133-147; Shirky, Clay, (2011), "The Political Power of Social Media", *Foreign Affairs*, New York: Council in Foreign Relations

⁴⁷ Lim, Merlyna. (2013). "Many Click but Little Sticks: Social Media Activism in Indonesia", dalam *Journal of Contemporary Asia*, No.43, Issue 4; Della Porta, Donatella, (2013), *Can Democracy Be Saved? Participation, Deliberation, and Social Movement*, Cambridge: Polity Press

mampu mendorong representasi demokrasi dan mengubah isu publik menjadi agenda politik.⁴⁸ Selain itu kaitanya dengan relasi negara, belum adanya mekanisme *exit dan voice* dari aktivisme digital itu sendiri, misalnya jika tuntutan petisi online tertandatangani 100.000 maka negara wajib memberikan respon berupa statement politik atau jika tertandatangani 1.000.000 maka parlemen wajib membuat undang-undang terkait. Disisi lain masifikasi aktivisme digital juga melahirkan pertarungan baru dengan para buzzer (pendukung online yang dibayar rezim penguasa) dan represivitas melalui peretasan akun sosial media yang ditujukan ke para aktor gerakan.

Aktivisme dan gerakan sosial kontemporer tidak bisa dilepaskan dari teknologi informasi sebagai medium gerakan—termasuk bagaimana rezim kekuasaan menggunakannya untuk semakin mengontrol setiap aktivitas warga negara. Dalam tataran teknis upaya “pengamanan” lebih dini oleh simpul dan aktor gerakan juga perlu dipersiapkan perihal *cyber and digital security* dalam aksi dan kerja-kerja gerakan. *Cyber Security* merupakan upaya untuk melindungi informasi dari adanya tindakan operasi informasi dan *cyber attack* yang sengaja dilakukan untuk mengganggu kerahasiaan, ketersediaan dan integritas informasi. *Cyber Security* merujuk pada teknologi, proses dan praktik yang dirancang untuk melindungi jaringan, peripheral teknologi-informasi, program/aplikasi dan data user maupun server dari segala bentuk serangan, akses yang tidak sah/pembobolan dan kerusakan. Adapun *Digital Security* merupakan perlindungan atas data digital yang terhubung internet, secara fungsional digunakan untuk mencegah penyalahgunaan akses maupun pemanfaatan data dari pihak yang tidak memiliki hak akses dan hak penggunaan. *Digital Security* dapat berupa aplikasi pelindung website/platform digital dan anti virus. Dalam konteks gerakan sosial khususnya demonstrasi atau massa aksi, *Digital-Cyber Security* juga menjadi bagian yang tidak kalah penting untuk diperhatikan. Dilakukan sebagai bentuk preventif agar terhindar dari ancaman peretasan dan serangan balik terhadap gerakan yang sedang dibangun dapat dilakukan melalui:

- Tanamkan dalam diri bahwa tidak ada aplikasi yang 100% aman
- Kenali piranti gadget dan aplikasi sosial media yang digunakan dan kelemahan keamanannya
- Memastikan bahwa piranti digital tidak berpindah tangan
- Double keamanan melalui scan sidik jari dan kode login atau verifikasi unik
- Melakukan klasifikasi penyimpanan data baik digital maupun analog serta meminimalisir penyimpanan data pribadi/data strategis di dalam handphone/ piranti digital
- Pastikan piranti digital tidak dihack dengan melakukan pengecekan di *#21 atau ##002
- Nomor whatsapp terindikasi sedang di intai biasanya baterai cepat habis, panas dan sering hang meskipun tidak digunakan dan sering mengalami getaran bunyi tiba-tiba. Untuk memastikan kondisi yang ada bisa melakukan melalui *Linked Devices* lalu pilih perangkat asing yang terkoneksi dan tekan *log out*.
- Jika nomor whatsapp terindikasi telah diretas maka segera keluar dari berbagai whatsapp group yang diikuti atau meminta admin untuk di-*kick* sementara waktu
- Menggunakan opsional aplikasi *end-to-end encrypted messaging service* untuk berkomunikasi antar aktor/simpul gerakan sekaligus menyembunyikan identitas dan mencegah pelacakan, misalnya aplikasi Telegram dan Discord
- Penggunaan alternatif *peer-to-peer message broadcasting* seperti SMS dan WeChat sebagai cadangan ketika jaringan internet diputus oleh rezim

⁴⁸ Savirani, et.al. (2014). *Ringkasan Eksekutif Hasil Survei Demokrasi: Power, Welfare and Democracy*

- Jika ada telfon atau pesan SMS/WA dari nomor tidak dikenal lakukan pengecekan nomor tersebut menggunakan aplikasi verifikasi nomor seperti *getcontact*, *showcaller*, *whoscall*, *call blocker free blacklist and whitelist*, *truecaller* dll
- Ambil segala *precaution* atas piranti saat aksi, jika perlu tidak dibawa saat aksi maupun saat pemeriksaan di kantor polisi. Tolak segala bentuk pemaksaan membuka dan akses data handphone diluar persidangan dan pendampingan kuasa hukum.
- Berbagai skema advokasi dan pengaduan terhadap pelanggaran atas hak-hak penggunaan sosial-media ataupun aktivitas digital diantaranya melalui SAFEnet, Purple Code Collective dll



STUDI KASUS:

Gerakan sosial dengan medium aktivisme digital diantaranya akun Facebook '6th of April Youth Movement' yang pemicu Revolusi Mesir, dibentuk oleh para aktivisi Mesir guna mendukung para buruh di Delta Sungai Nil dalam aksi mogok (2008), berkembang dan bertautan dengan fanpage "We are all Khaled Said" (2010) dan memuncak pada mobilisasi demonstrasi massa di Tahrir Square (2012). Varian di Indonesia, seperti 'Koin Prita' untuk Prita Mulyasari atas kritiknya terhadap layanan kesehatan berujung gugat balik dari Rumah Sakit Omni Internasional (2008), "Save Satinah" seorang tenaga kerja yang terancam hukuman mati di Arab Saudi (2014), "Cicak vs Buaya" kasus KPK dan Polri (2009), Gerakan Balik Tolak Reklamasi #ForBali (2013), dan berbagai petisi melalui platform *change.org*. Adapun represi dalam bentuk *dropping documents* (*doxing*)—tindakan untuk menyebarkan informasi pribadi seseorang dengan tujuan mengancam, teror, pembunuhan karakter dan membatasi ruang gerak si target. Tindakan *doxing* pernah terjadi pada Josardi Azhar (simpul Aliansi Rakyat Bergerak/Gejayan Memanggil) dan Delpedro Marhaen (Blok Politik Pelajar), keduanya aktif dalam gerakan #ReformasiDikorupsi mengalami serangan *doxing* dimana profil dan data diri pribadinya diunggah di *dosmed* disertai ancaman kekerasan menuju pembunuhan. Varian lain berupa peretasan akun sosial media para aktivis maupun official account gerakan yang terlibat pada rangkaian demonstrasi #ReformasiDikorupsi pada rentan waktu 2019-2020, termasuk yang terbaru peretasan akun instagram @watchdoc_insta. Bentuk propaganda dan operasi keamanan kontra gerakan juga dilakukan oleh aparat seperti kasus nomor polisi dengan nama samaran yang mengirimkan pesan provokasi di Whatsapp Group anak STM dalam aksi #ReformasiDikorupsi. Dilain sisi upaya advokasi pernah dilakukan oleh koalisi masyarakat sipil-pro demokrasi dan berhasil menang dalam persidangan atas tindakan pemerintah Indonesia yang melakukan pemutusan jaringan telekomunikasi di Papua pada 2020 sebagai respon atas demonstrasi besar-besaran yang dipicu pelanggaran HAM dan berbagai represi aparat terhadap orang Papua.



BERIKAN PENDAPATMU?

Apakah kawan pernah mengalami tindakan hack dan doxing? Bagaimana kasus tersebut terjadi dan respon apa yang dilakukan? Tulis analisa singkatmu dibawah ini kawan:

.....

.....

.....

.....

.....

MODUS PENANGKAPAN

GAYA LAMA



GAYA LAMA SEKALI



GAYA BARU



GAYA YANG BAHAYA!!

BAB 4

LOGIKA, AGITASI- PROPAGANDA, KAMPANYE MASSA

*“If you won’t let us dream, we won’t let you sleep
Tak mati jiwa pun raga, ada dan berlipat ganda, ide kami bergerilya”*

Overview

Diantara sketsa tentang praktek gerakan sosial yang penting: melakukan kampanye dan upaya mendapatkan dukungan. Bagaimana pengorganisirian massa dan perluasan wacana dilakukan melalui beragam medium—agitasi dan propaganda. Dilain sisi agenda membangun logika kritis terus berhadapan dengan beragam propaganda penguasa melalui dengungan para BuzzerP dan argumentasi yang kerap kali penuh cacat logika. Bab ini secara praktis menyajikan logika kritis secara dasar, varian cacat logika, beragam model-taktik agitasi-propaganda-kampanye massa, serta retorika reaksioner yang kerap kali ditujukan untuk mematikan wacana kritis dan gerakan sosial.

Substansi

Sub-bab lima mengenai Logika, Agitasi-Propaganda dan Kampanye Massa terdiri dari empat substansi yang terdiri dari:

1. Logika Dasar dan Logical Fallacy
2. Varian Agitasi-Propaganda
3. Creative Campaign dan Crowdfunding
4. Retorika Reaksioner

Melalui pembahasan ini diharapkan dapat memahami secara umum mengenai filsafat ilmu, logika dasar, memahami berbagai model maupun instrumen agitasi-propaganda versi gerakan maupun rezim penguasa, menghadapi kontra-wacana kritis dan tentu juga membangun metode kampanye kreatif serta pengumpulan sumber daya secara luas.

1. LOGIKA DASAR DAN LOGICAL FALLACY

Tanpa pertanyaan maka matilah pengetahuan dan pendidikan. Secara sederhana aktivitas berfikir atau menalar adalah kerja akal fikir dalam mengolah pengetahuan. Termasuk dalam ini segala kegiatan yang terkait dengan menganalisa, membuktikan, menunjukkan alasan, menarik kesimpulan, mencari hubungan ataupun membahas realitas yang ada. Pengetahuan dianggap mencapai kebenaran ilmiah jika telah melalui pendekatan atau cara pandang (*approach*), metode (*method*), dan sistem tertentu. Penalaran (*reasoning*) adalah hubungan antara pernyataan (*statements*), yang dapat dikerangkai secara induksi maupun deduksi. Sedangkan semua penalaran didasarkan pada logika. Di dalam penalaran terdapat proposisi yaitu pernyataan yang bernilai benar (*true*) atau salah (*false*), tetapi tidak keduanya. Proposisi sendiri terbagi menjadi dua meliputi majemuk tautologi (jika benar untuk semua kasus) dan majemuk kontradiksi (jika salah untuk semua kasus). Pengetahuan kaitanya dengan filsafat ilmu kemudian diturunkan secara ontologi, epistemologi dan aksiologi.

Ontologi	Persoalan ada atau tidak, percaya atau tidak tentang sesuatu fenomena	Contoh: Kemiskinan itu ada atau tidak?
Epistemologi	Teori sebagai argumen antara ada atau tidak	Contoh: Orang miskin ada dan terjadi secara struktural
Aksiologi.	Bagaimana fenomena/sistem bekerja	Contoh: Kemiskinan struktural terjadi karna ketimpangan akses-penguasaan sumber daya dan kebijakan pemerintah yang neoliberal

Dalam tataran praktik sering kali argumentasi ilmiah-logis yang kita utarakan pada sebuah forum curah gagasan maupun pertarungan wacana, sering kali dihadapkan pada respon narasi yang penuh dengan kesesatan berfikir ataupun respon argumentasi kontra yang ditujukan terhadap gagasan yang dibangun oleh para simpul gerakan. Apa yang kemudian disebut sebagai *logical fallacy*, sebuah kesesatan berfikir karna penyalahgunaan bahasa dan/atau relevansi atas premis yang dibangun. Sesat fikir adalah kebaillkan dari argumentasi logis dan pemikiran kritis. *Logical Fallacy* secara umum diklasifikasi menjadi tiga bentuk yaitu *fallacies of relevance*, *fallacies of defective induction* dan *fallacious argument* FAQS.⁴⁹

• FALLACIES OF RELEVANCE

Pernyataan/argumentasi tidak sesuai dengan konklusinya, memaksakan pernyataan agar terlihat logis. Terdapat tujuh tipe *fallacies of relevance* (Irving M. Copi et al, 2014).

a. *The Appeal To The Populace (argumentum ad populum)*

Konklusi yang diambil mengacu pada anggapan yang bersifat populer meskipun tidak valid. Contoh: "Semua perempuan yang baik selalu diidentikan dengan jago memasak. Tidak bisa memasak maka bukan perempuan "

b. *The Appeal To The Emotion (Appeal To Pity)*

Argumentasi dilakukan dengan manipulasi perasaan (emosi) diatas logika/fakta empiris dan membiaskan dengan dalih rasa ketidaktegaan. Contoh: si A berkata "OTT oleh KPK

⁴⁹ Irving M. Copi et al. (2014). *Introduction to Logic*

terhadap politisi partai X tersangka korupsi lelang jabatan kementerian agama”, si B menjawab: “Tidak mungkin, dia orang alim, suka sedekah dan ngisi ceramah pakai bahasa yang kalem. Kalau dihukum seumur hidup juga kasihan kan masih punya dua anak kecil dan istri sholehah”

c. *The Red Herring*

Mengalihkan permasalahan utama yang sedang dibahas dengan tujuan membingungkan/membiaskan fokus isu pokok dengan hal lainnya. Contoh: si A berkata: “Demonstrasi penolakan Omnibuslaw terjadi dimana-mana menandakan kebijakan ini bermasalah dan tidak pro-rakyat”, si B menjawab: “Itu ngapain dah anak STM pada ikut demo mesti bolos sekolah dan ninggalin banyak sampah dijalanan”

d. *The Straw Man*

Secara sengaja melakukan interpretasi yang salah terhadap gagasan/argumen orang lain agar lebih mudah diserang. Secara bersamaan juga menempatkan pihak yang mengusulkan gagasan sebagai lawan yang berada pada posisi ekstrem dan ancaman, alih-alih mengkritisi gagasan yang ada dan melihat gagasan atau fakta yang sebenarnya terjadi. Contoh: si A berkata “Berbagai film dokumenter dari Wachdoc telah memperlihatkan berbagai kerusakan lingkungan dan kesenjangan sosial-ekonomi akibat ekspansi korporasi besar di Indonesia”, si B menjawab “Film Wactdoc itu pasti dibayar aseng karna narasinya menyerang tokoh nasional dan crew filmnya pasti Komunis”

e. *Argument Against The Person (Argumentum Ad Hominem)*

Menyerang subjek/orang yang sedang memegang peranan dengan cara merusak “citra personal” tanpa disertai fakta yang jelas dan indikator yang terukur. Contoh: Si A berkata “57 pegawai KPK yang tidak lolos tes TWK memiliki track record kinerja yang bagus dalam menangani berbagai kasus korupsi besar pada rentan 2015-2020”, si B menjawab “Apakah kita harus percaya dengan mereka itu katanya tidak nasionalis dan ada yang ikut pengajian tidak jelas”

f. *The Appeal To Force (Argumentum Ad Baculum)*

Argumentasi disusupi oleh kepentingan dan agenda tertentu sehingga keluar dari konteks dan tujuannya melalui penempatan aktor/pihak yang memiliki kekuatan untuk memaksakan gagasan yang ada agar supaya diterima dan bahkan diterapkan secara sepihak. Contoh si A berkata: “Ita harus pilih calon X karena diusung partai dominan, dia sosok yang paling sempurna dan satu-satunya orang yang mampu membawa perubahan pada negara ini, kalau tidak dipilih maka pada 2045 Indonesia terancam bubar”, membiaskan makna demokrasi substansial yang tidak hanya sebatas pemilu 5 tahunan atau golput bukan termasuk sebuah variasi atas pilihan sadar.

g. *Missing The Point (Ignoratio Elenchi)*

Argumentasi tidak terkonstruksi secara kuat dan memadai, ditandai dengan premis awal yang mudah terbantahkan sehingga menghasilkan konklusi yang justru mengikuti alur argumentasi lawan bicara daripada mendukung atau menguatkan argumentasi sendiri.

• **FALLACIES OF DEFECTIVE INDUCTION**

Tipe ini ditandai oleh pembangunan premis disetiap argumentasi terlihat memiliki relevansi dan keterkaitan dengan konklusinya, namun disisi lain kerangka pemikiran yang digunakan terlalu lemah dan tidak efektif sehingga berdampak pada pengambilan konklusi

yang tidak akurat dan kuat. Kontruksi pemikiran semacam ini akan berpotensi mendapatkan serangan balik. Terdapat empat varian *fallacies of defective induction*.⁵⁰

a. *The Argument From Ignorance*

Argumentasi yang disampaikan terlihat salah karena belum ada pembuktian mengenai kebenaran dari argumentasi tersebut. Sebaliknya argumentasi yang disampaikan terlihat benar karena belum ada pembuktian mengenai kesalahan dari argumentasi tersebut. Contoh: si A berkata: "Apa yang disampaikan Suharto adalah benar karena tidak ada satupun dari peserta yang hadir dalam rapat tersebut yang menentangnya "

b. *The Appeal To Inappropriate Authority*

Argumentasi diyakini kebenarannya dengan dalih telah dibenarkan oleh satu/seorang ahli tanpa melakukan triangulasi dengan pendapat ahli lainnya atau melakukan verifikasi pada kondisi empiris yang ada. Contoh: Si A berkata "Sesuai pendapat satu akademisi dari universitas di Singapura yang menyatakan bahwa kepemimpinan di era Jokowi sangat demokratis"

c. *False Cause*

Melakukan cocoklogi dan menghubungkan dua hal yang terjadi bersamaan secara periodik sebagai hubungan sebab-akibat, dilakukan dengan cara menempatkan suatu penyebab X seolah-olah menjadi suatu akibat terjadinya permasalahan tertentu meskipun hal tersebut bukan penyebab yang terkait langsung atau penyebab sebenarnya. Contoh si A berkata: "Angka korupsi meningkat pada tahun 2015-2020. Di saat bersamaan, kualitas pendidikan di negara ini semakin meningkat dalam satu dekade terakhir. Maka dapat disimpulkan bahwa tingginya kualitas pendidikan itu justru menyebabkan tingginya angka korupsi"

d. *Hasty Generalization*

Klaim kebenaran argumentasi yang hanya didasarkan pada sebagian kecil fenomena atau fakta minor yang kurang representatif lalu melakukan generalisasi kesimpulan. Contoh si A berkata: "Bapak X adalah Gubernur paling bagus sepanjang kepemimpinan di ibukota ini, karna semua taman ada patung monumenya dan tembok di hias. Jelas Bapak X lebih berkualitas ketimbang Ibu Y yang suka sidak dan marah-marah'. Argumentasi ini melakukan generalisasi sekaligus simplifikasi bahwa kepemimpinan publik dengan kinerja baik hanya diukur dari pembangunan fisik atau retorika komunikasi, alih-alih misalnya melihat secara komprehensif indikator kota berkelanjutan secara ekologis, berkeadilan secara sosial-ekonomi dan partisipasi luas masyarakat dalam ruang demokrasi.

Varian umum ketiga dari cacat logika dan sesat fikir adalah fallacious argument FAQs, sering disebut non sequitur yaitu argumentasi yang tidak ada hubungan antara premis yang diberikan dengan kesimpulan yang ditarik. Sesat fikir ini termasuk ucapan yang tidak ada hubungannya dengan apa yang telah dikatakan sebelumnya dan pernyataan yang muncul secara tiba-tiba, yang menunjukkan bahwa pembicara tidak memperhatikan tema/topik diskusi yang sedang dibahas.

2. AGITASI-PROPAGANDA

Agitasi-Propaganda dalam konteks penyebaran informasi/gagasan adalah sebuah teknik untuk mempengaruhi tindakan aksi dari seseorang melalui representasi gagasan dalam komunikasi massa. Komunikasi massa sendiri dapat dimaknai sebagai *Who Says What in Which Channel to Whom with*

⁵⁰ Irving M. Copi et al, 2014

What Effect.⁵¹ Terdiri dari variable Siapa (Komunikator), mengatakan apa (Pesan), melalui apa (Media), untuk siapa (komunikasi/penerima pesan), pengaruhnya apa (efek). Agitasi-Propaganda sebagai sebuah medium dan *tools* tentu dapat digunakan dalam pengorganisasian massa dan penguatan wacana oleh simpul gerakan sosial. Propanda juga kerap kali digunakan oleh rezim penguasa untuk memukul balik gerakan bahkan “mematikan” para aktivis gerakan baik secara langsung maupun tidak langsung. Gerakan sosial sebagai gerakan massa, dalam sejarah gerakan di Indonesia dari zaman pergerakan nasional hingga kini telah menempatkan seorang agitator dan propagandis sebagai aktor dan lingkup peran kerja yang penting—tanpa maksud mengkultuskan. Bagi simpul gerakan sosial, beragam alternatif gerakan semakin masif tumbuh ditengah euforia akses teknologi informasi—membuka peluang perluasan gagasan dan teknik pengorganisasian. Disisi lain tidak sedikit agenda pembiasaan sejarah, *brainwash* hingga kebijakan apa yang boleh dan tidak boleh ditampilkan dalam ruang publik—dijalankan melalui propaganda penguasa—adalah Rezim Suharto, diantara penguasa di Indonesia yang dalam jangka waktu yang lama bahkan hingga saat ini warisan propagandanya telah/masih efektif tertanam dibenak masyarakat. Pada kondisi kontemporer Indonesia saat ini, pemahaman akan agitasi-propaganda juga masih relevan mengingat konglomerasi kepemilikan media massa mainstream yang dikuasai dan dimiliki segelintir orang beririsan dengan pengusaha-penguasa. Ditambah keberadaan buzzer yang kerap kali muncul dengan argumentasi penuh cacat logika dan memanipulasi data pun kata kerap kali dipelihara rezim penguasa untuk melawan narasi alternatif dari gerakan sosial. Secara definisi dan konseptual sekalipun Agitasi-Propaganda kerap kali disematkan dalam satu kata, namun sejatinya memiliki perbedaan makna, tujuan dan medium yang digunakan.

“Seorang propagandis menyajikan banyak gagasan ke satu atau sedikit orang. Seorang agitator menyajikan hanya satu atau sedikit gagasan, tetapi menyajikannya ke banyak orang/massa ” - Plekhanov, seorang Marxis Rusia.

Secara lebih detail perbedaan antara agitasi dengan propaganda adalah sebagai berikut:

AGITASI	PROPAGANDA
Upaya membangkitkan perhatian (<i>toexcite</i>) dan mendorong (<i>stir it up</i>)	Agenda rencana sistematis untuk pengorganisasian dan mobilisasi gerakan serta penyebarluasan keyakinan/doktrin/gagasan
Fokus pada sebuah isu aktual	Penjelasan mengenai gagasan-gagasan secara terperinci dan sistematis
Umumnya menggunakan bahasa lisan	Umumnya menggunakan bahasa cetak dan tulisan

• TIPE PROPAGANDA

Klasifikasi berdasarkan sumber, konten dan tujuan terbagi menjadi:

- o **Black Propaganda/Propaganda Tertutup**

⁵¹ Lasswell, H. D. (1972). *Communication Research And Public Policy*. Public Opinion Quarterly, 36, 301–310.

Propaganda yang menyembunyikan sumbernya, bersifat terselubung—sumber, kegiatan dan tujuannya bersifat tertutup.

- o **Grey Propaganda**

Propaganda yang mengaburkan proses identifikasi sumbernya.

- o **White Propaganda/Propaganda Terbuka**

Propaganda yang diketahui sumbernya secara jelas—sumber, kegiatan dan tujuannya bersifat terbuka.⁵²

Adapun propaganda yang didasarkan pada tujuan untuk mempengaruhi dan mendorong tindakan kelompok sasaran terbagi menjadi tiga tipe yaitu propaganda koersif, persuasif dan pervasif.



Foto: <https://nusantaranews.co/>



foto: ANTARA/Fanny Octavianus



Foto: <https://antitankproject.wordpress.com/>

Koersif

Bertujuan untuk menimbulkan ketakutan agar target sasaran tidak berfikir secara kritis dan bertindak reaksioner.

Persuasif

Bertujuan untuk menimbulkan rasa kemauan secara sukarela dan sadar bagi target sasaran lalu melakukan respon tindakan atau keterlibatan.

Pervasif

Bertujuan menyebarkan pesan secara terus menerus/berulang sehingga menjadi wacana publik dan target sasaran melakukan imitasi/menjadi bagian dari gerakan.

Kaitanya dengan agenda kampanye gerakan dan kepentingan politik tertentu, model propaganda memiliki tujuh tipe utama yaitu *glittering generality*, *transfer*, *testimoni*, *plain folks*, *card stacking*, *name calling*, dan *bandwagon*.⁵³



Foto: Tribunnews

GLITTERING GENERALITY

Menghubungkan sesuatu dengan 'kata yang baik' – target menyetujui sesuatu tanpa memeriksa bukti dan fakta yang ada. Contoh: gambar Suharto dengan tulisan “penak jamanku tho”

⁵² William E. Daugherty (1958). *A Psychological Warfare Casebook*. University of California: Md.Johns Hopkins Press.

⁵³ Lee, A. M., & Lee, E. B. (Eds.). (1939). *The Fine Art Of Propaganda*. Harcourt: Brace.



Foto: <https://heynoona.com/>

TRANSFER

Membawa otoritas, dukungan, dan gengsi dari figur atau simbol yang disanjung dan dihargai. Contoh: ekspansi bisnis Korea Selatan melalui gerakan Korea Wave dan penggunaan artis K-Pop untuk promosi produk.



TESTIMONI

Pemberian kesaksian/pendapat terhadap aktor/figur tertentu atas track record yang dimiliki dari perspektif "orang yang pernah hidup bersama". Sering digunakan dalam kampanye Pemilihan Raya Mahasiswa, Pemilu dll.



Foto: Antara/Siswowododo

PLAIN FOLKS

Aktor elite berlaga seperti orang biasa dan menjadi bagian dari rakyat. Kadang membiaskan kepentingan dan watak elite dibaliknya. Contoh beragam banner baliho para politisi oligarki yang berfoto dengan para petani sembari panen raya—sedangkan mereka bukanlah seorang petani dan bekerja bertani, bahkan terkadang kebijakannya malah mengusir petani atau lahan pertanian dengan dalih proyek pembangunan nasional.



Foto: <https://galamedia.pikiran-rakyat.com/>

CARD STACKING

Pemilihan/pemanfaatan dari fakta/ Pernyataan logistik logis. Jika eksperimen atau statement menguntungkan maka ambil, sedangkan jika tidak menguntungkan maka dipotong/dihilangkan. Contoh pemotongan suatu statement secara sepihak oleh para buzzer atau media massa partisan.



NAME CALLING

Melakukan penyerangan terhadap personal alih-alih menyerang gagasan dan substansi dengan cara labeling—menolak ide tanpa mengamati bukti. Contoh serangan pada basis gerakan berhaluan Anarkisme atau segala massa yang berbaju hitam yang diidentikan sebagai aktor pembuat kerusuhan dan

<https://nasional.tempo.co/read/polis-tangkap-796-a...>
Polisi Tangkap 796 Anggota Anarko dalam Aksi Tolak ...
 10 Okt 2020 — CO, Jakarta - Kepala Divisi Humas Mabes Polri Inspektur Jenderal Raden Prabowo Argo Yuwono mengatakan polisi banyak menangkap anggota anarko ...

<https://megapolitan.kompas.com/News/Megapolitan>
22 Anggota Anarko Diamankan, Polisi: Ada Indikasi Kerusuhan
 1 Mei 2021 — 22 Anggota Anarko Diamankan, Polisi: Ada Indikasi Kerusuhan ... Massa PMKRI terlihat dorong-dorongan dengan aparat pada aksi Hari Duruh Sabtu (5/...

bakar ban, tanpa melihat definisi secara “ilmiah” bahwa Anarkisme sebagai varian dari pemikiran sosial-politik yang berorientasi pada kesetaraan dan kemerdekaan bersama.



Foto: The Canadian Press/Christopher Katsarov

BANDWAGON

Memilih tema/isu tertentu lalu secara sepihak melakukan logika generalisasi—memukul rata setiap aktor dan isu. Contoh ada salah satu faksi Islam suka melakukan jihad dengan teror maka semua orang yang beragama Islam adalah teroris—menghilangkan realitas atas populasi mayoritas Islam yang moderat.



BERIKAN PENDAPATMU?

Apa jenis propaganda yang sering muncul dan ada di sekitarmu? Tulis analisa singkatmu dibawah ini kawan:

.....

3. CREATIVE CAMPAIGN DAN CROWDFUNDING

Gerakan sosial kontemporer telah mengkombinasikan beragam taktik populer untuk membangun kesadaran dan partisipasi publik yang lebih luas sebagai rangkaian dari kerja agitasi-propaganda dan kampanye massa, diantaranya melalui mural, flashmoop, video mapping dan kerja-kerja “kreatif” lainnya. Keterbatasan sumber daya internal dalam melakukan kerja gerakan juga telah membuka peluang pengalangan dana publik-kolektif yang mendorong setiap individu dapat berpartisipasi.

- **STREET ART-MURAL**

Mural sebagai bagian dari gerakan sosial telah menempatkan propaganda politik dan kritik atas realitas sosial menjadi tema utama dalam setiap karyanya—orientasi seni yang “berpihak” dan mengisi pertarungan wacana di ruang publik. Berbeda dengan karya seni lain misalnya lukisan kanvas atau grafiti yang memiliki “pakem” atau aliran tertentu, maka mural relatif lebih bebas dalam pembuatannya baik secara kebutuhan bahan maupun bentuk gambar. Street art—mural sebagai medium perlawanan politik dan gerakan sosial memiliki sejarah yang panjang, misalnya di Irlandia lebih dari 2000 mural dihasilkan sejak 1970-an sebagai respon atas konflik berkepanjangan di negara tersebut.

- **FLASHMOOP**

Flash mob dalam gerakan sosial sering juga diartikan sebagai kerumunan (crowd) sebagai varian dari aksi atau perilaku kolektif. Secara sederhana dapat dimaknai sebagai aktivitas yang

melibatkan kerumunan massa (semakin banyak dianggap semakin bagus) guna menampilkan ekspresi tertentu melalui gerakan badan/fisik secara terorganisir. Memiliki tujuan untuk mendapatkan atensi publik guna merespon berbagai kebijakan dan berbagai isu aktual yang sedang berkembang. Biasanya berbentuk kerumunan massa secara spontan dan bersifat sementara, dalam beberapa kasus aksi pendudukan menjadi rangkaian dari long-march massa aksi. Identik dengan gerakan tarian dikombinasikan dengan teriakan, yel-yel, nyanyian atau bahkan tanpa suara. Flashmop dengan mudah ditemui dalam aksi-aksi pendudukan di Amerika Latin baik pada aksi massa era 1980-an, 2000-an, termasuk tahun 2019.

- VIDEO MAPING

Sebagai bagian dari kemajuan teknologi dan multimedia, video mapping menjadi salah satu teknik proyeksi pencahayaan guna menghasilkan ilusi optik pada objek/bidang yang terkena sorotanya. Kemampuan laser jarak jauh, memungkinkan aksi kreatif video mapping mampu menjangkau berbagai gedung yang susah diakses secara langsung/dekat oleh massa aksi.

- CROWDFUNDING

Crowdfunding adalah metode pembiayaan melalui pembukaan dan pelibatan kepada sekelompok besar individu atau publik melalui platform yang dikelola bersama—alih-alih misalnya mencari “investor” atau “donatur” skala besar. Model pembiayaan ini telah berpotensi mendukung kebutuhan dana dalam berbagai agenda dan gerakan diberbagai bidang/isu. Crowdfunding dapat dilakukan melalui beberapa tahapan meliputi: (1) menentukan ide/agenda/isu apa yang tepat, dibutuhkan dan memiliki urgensi untuk diadakan; (2) Memilih jenis crowdfunding; (3) Menentukan platform Crowdfunding; (4) Merumuskan kerangka dan desain halaman kampanye; (5) Membuat timeline dan skema Crowdfunding; dan (6) Memastikan aktivasi pengalangan dana selama proses pembukaan Crowdfunding.



Studi Kasus:

Dalam konteks lokal mural sebagai kritik sosial dan pembangunan wacana alternatif juga dengan mudah ditemui di Yogyakarta, misalnya AntiTank Project sejak 2008 telah mengisi ruang publik dengan beragam mural seperti siloute wajah Munir dengan tulisan ‘Menolak Lupa’ aktivis HAM yang tewas diracun penguasa, wartawan Udin yang dibunuh karena berita, “Jogja Asat” yang mengkritik masifnya pembangunan hotel yang berdampak pada defisit air bersih bagi warga, Wakil Presiden Boediono “Antara ada dan Tiada”, ‘Butuh Badut Lucu? Hubungi Senayan’. Para aktivis feminis Chile bernama *Collectivo LasTesis* melakukan flashmop dengan nama aksi *intervención* pada November 2019 di jalanan sebagai respon atau berbagai represi rezim terhadap gerakan perempuan warisan rezim militeristik-neoliberal Pinochet dan kasus kekerasan seksual yang semakin meningkat di negara tersebut. Model aksi melalui video mapping misalnya dilakukan oleh GreenPeace Indonesia pada 28 Juni 2021 dengan tulisan “Rakyat Sudah Muak” dan #SaveKPK ke tembok gedung KPK RI sebagai respon atas berbagai kasus pelemahan KPK oleh penguasa dan rangkaian aksi #ReformasiDikorupsi yang merebak sejak tahun 2019. Dalam isu sosial-ekonomi yang beririsan dengan ketimpangan misalnya platform www.bagirata.id telah menginisiasi peer-to-peer wealth distribution tool untuk membantu kondisi finansial para pekerja yang terkena dampak ekonomi di tengah ketidakpastian dan kerentanan pekerjaan. Adapun perpaduan antara *crowdfunding* dengan

creative campaign digagas Indonesian Corruption Watch (ICW) melalui platform *uncorrupted.store*—berbelanja sekaligus berdonasi bagi gerakan anti korupsi—medium untuk penjualan merchandise seperti kaos, hoodie, sweater, topi, tumbler dimana didalam produk berisi tulisan-tulisan kampanye anti korupsi. Hasil penjualan produk ini juga menjadi salah satu sumber dana kolektif untuk mendukung kerja-kerja gerakan anti korupsi di Indonesia.



Berikan Pendapatmu?

Apakah kawan pernah terlibata dalam berbagai bentuk kampanye kreatif dan solidaritas pengalangan dana kolektif? Tulis analisa singkatmu dibawah ini kawan:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

4. RETORIKA REAKSIONER-KONTRA WACANA

Retic of reaction adalah retorika reaksioner yang sering digunakan sebagai alasan untuk menentang kemajuan dan segala upaya perjuangan yang diinisiasi oleh gerakan bersama. Terdapat tiga bentuk retorika reaksioner, yaitu jeopardy, futility dan perversity.⁵⁴

- Perversity
Pernyataan bahwa perubahan dan upaya perubahan justru memperparah keadaan. Bertujuan untuk memutarbalikkan opini publik terhadap semua upaya perubahan yang diinisiasi oleh gerakan, tanpa melakukan pembahasan berimbang mengenai dampak dari tuntutan dan kebijakan baru. Contohnya, menyerang aksi massa karna dianggap membuat kemacetan jalan, untuk membiaskan aspek substansial dari tuntutan aksi..
- Futility
Pernyataan bahwa perubahan dan upaya perubahan tidak berguna dan tidak akan merubah apa-apa. Bertujuan untuk mereduksi militansi gerakan sosial, dilakukan dengan cara menegasikan segala tindakan dan proses kerja-kerja gerakan sebagai tindakan yang sia-sia. Tanpa melakukan penjelasan yang lebih lanjut terhadap apa dan mengapa tindakan tersebut.
- Jeopardy

⁵⁴ Hirschman. (1991). *Retic of reaction*



BAB 5

TAKTIK DAN STRATEGI PERLAWANAN GERAKAN

*“Selalu ada potensi untuk resisten, dan resistensi yang potensial”-
Kontinum*

Overview

Kompleksivitas permasalahan sosial yang berkelindan dalam beragam bentuk penindasan dan ketidakadilan telah memicu berbagai bentuk respon gerakan—menuju pada praktek pembebasan gerakan sosial. Bagaimana medium media massa telah terkoptasi, menuntut setiap suara dan wacana alternatif semakin penting sebagai rivalitas gagasan? Resolusi konflik yang perlu terjaga baik didalam tubuh internal maupun eksternal gerakan. Kondisi kekinian ketika “demonstrasi” kerap dituduh tidak lagi relevan di jaman demokrasi “modern”, justru gerakan protes berbasis massa aksi semakin menguat dan mewarnai praktik gerakan di banyak negara—telah memberikan nilai tawar strategis dalam setiap pengambilan keputusan politik dan kebijakan. Di ruang yang lain pendekatan “konstitusional” juga perlu dipertimbangkan untuk membuka setiap celah potensi perubahan struktural. Seluruh proses ini merupakan serangkaian taktik yang dilakukan oleh gerakan sosial diberbagai belahan dunia, khususnya Indonesia secara aktual.

Substansi

Sub-bab enam mengenai Taktik dan Strategi Perlawanan Gerakan terdiri dari lima substansi yang terdiri dari:

1. Pertarungan Wacana
2. Judicial Review
3. Advokasi, Lobi, Negosiasi, Mediasi
4. Aksi Pendudukan dan Mogok

5. Kiri Luas - Front Populer

Melalui pembahasan ini diharapkan dapat memahami beragam varian taktik perlawanan dan praksis resistensi yang selalu potensial untuk mengubah keadaan serta menjadi nafas gerakan sosial, bahwa “hanya ada satu kata, lawan” pekik Widji Tukul.

1. PERTARUNGAN WACANA

“..abad ke-18 mempunyai lebih banyak gagasan ketimbang fakta...sedangkan abad ke-21 mempunyai lebih banyak fakta ketimbang gagasan” –James Buchan

Membangun kesadaran kritis dan pertarungan wacana-opini publik ini menjadi bagian penting dalam fase perluasan gerakan sosial. Wacana terkait erat dengan repertoar aksi sekaligus menjadi *hub* dalam memobilisasi sekaligus kanal pendidikan politik massa. Dalam studi gerakan sosial dan mobilisasi sumber daya, pengarus utamaan permasalahan agar menjadi isu publik menempatkan diskursus-wacana menjadi hal yang krusial dilakukan melalui kerja-kerja jurnalistik, diseminasi riset, diskusi, debat publik, seminar dll. Setiap wacana akan menghasilkan kebenaran dan pengetahuan tertentu yang memicu efek kuasa, kekuasaan yang ada mengontrol dan mendisiplinkan wacana publik agar masyarakat menyetujui pandangan tertentu.⁵⁵ Wacana telah menjadi bagian dan dipengaruhi oleh struktur sosial serta diproduksi dari hasil interaksi sosial dan kondisi sosial politik.⁵⁶ Wacana merupakan kerja ideologis yang memiliki sifat historis dengan kemampuan membentuk, mengarahkan dan mempengaruhi kehidupan.⁵⁷ Sebagaimana pandangan Foucaultian, dalam *genealogy of power and knowledge*, bahwa “kebenaran” senantiasa diproduksi dan reproduksi oleh kekuasaan guna mengiringi setiap orang untuk turut mengamininya, menggunakan wacana sebagai medium perantara. Diwaktu yang bersamaan terjadi pergeseran pendisiplinan masyarakat (*disciplinary society*) berbasis institusional seperti penjara dan sekolah menjadi *society of control* melalui wacana yang disebarluaskan lewat teknologi-informasi yang diinjeksikan kepada alam fikiran—*biopower*. Namun dilain sisi, setiap dominasi atas wacana selalu memicu munculnya wacana tandingan, ada sifat dari wacana yang juga bisa terdesentralisasikan.

Dalam kondisi empiris pertarungan wacana secara taktis, saat kita dihadapkan pada konglomerasi media—pers dan media yang dianggap sebagai elemen ke empat demokrasi, telah terkooperasi. Industri media massa baik cetak maupun elektronik di Indonesia saat ini hanya dikuasai oleh 13 perusahaan raksasa, 3 diantaranya yaitu: (1) MNC Group (pemilik Hary Tanoesoedibjo - Partai Perindo) dengan 20 stasiun televisi, 22 stasiun radio, 7 media cetak dan 1 media *online* ; (2) Media Group (pemilik Surya Paloh – Partai Nasdem) memiliki 1 stasiun televisi dan 3 media cetak ; dan (3) Visi Media Asia/Bakrie & Brothers (pemilik Abdul Rizal Bakrie – Partai Golkar) memiliki 2 stasiun televisi dan 1 media *online*.⁵⁸ Apa yang dilontarkan para pemikir mahzab Frankfurt School dalam teori politik media, bahwasanya

⁵⁵ Foucault, Michel. 1980. *Power/Knowledge: Selected Interviews and Other Writings 1972-1977*, Colin Gordon ed. London: Harvester

⁵⁶ Eriyanto. 2003. “*Analisis Wacana*” *Pengantar Analisis Teks Media*. Yogyakarta: LkiS

⁵⁷ Fairclough dan Wodak dalam Eriyanto. 2003. “*Analisis Wacana*” *Pengantar Analisis Teks Media*. Yogyakarta: LkiS

⁵⁸ Nugroho, Yanuar, Dinita Andriani Putri, dan Shita Laksmi. (2012). Mapping The Lanscape of The Media Industry in Contemporary Indonesia. Report Series: Engaging Media, Empowering Society: Assesing Media Policy and Governance in Indonesia through the Lens of Citizen’s Rights. Jakarta: CIPG (Centre for Innovation Policy and Governance), Hivos People Unlimeted, Fourd Foundation.

media masa adalah pertemuan kepentingan ekonomi dan penting politik kekuasaan. Konglomerasi media massa menyebabkan terjadinya pemusatan kepemilikan, tarik ulur antara idealisme pers dan kepentingan bisnis dengan politik. Dalam menguasai wacana melalui penguasaan media mainstream tentu kita ingat bagaimana Rezim Soeharto mengintervensi kebebasan press dan membrendel bagi yang tidak mau menyuarakan kepentingan rezim seperti kasus pembrendelan Tempo dan Sinar Harapan, dilain sisi TVRI di monopoli untuk mencitrakan rezim Suharto secara sepihak. Kasus lain, misalnya framing media disesuaikan dengan pemilik kuasa, TVOne sebagai corong Abdul Rizal Bakrie melabeli kasus Lapindo sebagai bencana alam dengan penyematan 'Lumpur Sidoarjo' karena Lapindo adalah anak perusahaan Bakrie Group, sedangkan Metro TV dibawah kuasa Surya Paloh memakai label 'Lumpur Lapindo'. Implikasi logis dari relasi kuasa ini adalah pengiringan opini dan wacana publik untuk kepentingan penguasa. Dalam praktik relasi kuasa, pengusaha media mainstream kerap kali beririsan dengan politisi/penguasa telah menyalahgunakan frekuensi publik dan melakukan *brainwash* termasuk pengiringan opini kepada masyarakat luas.

Dilain sisi, kemampuan sebuah diskursus di wacana publik akan mengalami peningkatan yang signifikan ketika para pembela sebuah pemikiran ataupun gagasan berhasil menguasai kelembagaan penting yang sudah ada, misalnya menguasai universitas lalu dari sana kemudian mempengaruhi media massa termuka dan posisi-posisi kunci lembaga pemerintah.⁵⁹ Secara praktik, munculnya berbagai platform media alternatif dan sosial media yang terpersonalisasi juga menjadi peluang bagi setiap orang untuk turut terlibat dalam pembangunan wacana kritis. Dalam tantangan kedepan menuntut bagaimana diskursus tidak hanya beroperasi di tingkat gagasan, tetapi juga perlu didorong ke tingkat proses dan pelembagaan sosial.⁶⁰ Pelembagaan wacana sebagai bagian dari kontra hegemoni, sebagai rivalitas atas dinamika pertarungan wacana di level kelembagaan pertama (lembaga global) lalu ke kelembagaan kedua di level *state-nation* termasuk regulasi dan implementasi teknisnya.



STUDI KASUS:

Beragam praksis gerakan pembangunan wacana alternatif-tanding telah dilakukan, misalnya, gerakan perlawanan terhadap neoliberalisasi-komersialisasi pendidikan tinggi secara khusus dan gagasan anti perang, kesetaraan gender, jaminan kesehatan secara umum di Eropa mulai masif seiring dilaksanakannya European Social Forum (ESF)—menjadi kerangka kerja untuk saling bertukar gagasan kritis dan pengalaman bagi gerakan mahasiswa, civitas akademika, peneliti, aktivis dan juga jaringan sipil pro-demokrasi secara luas. ESF dalam waktu bersamaan sebagai diskursus tandingan yang terlembagakan melawan KTT resmi para Menteri Pendidikan Uni Eropa. ESF menjadi agenda berkala yang bersifat tahunan yang secara tempat dan waktu identik dengan penyelenggaraan KTT Menteri Pendidikan Uni Eropa. ESF sebagai ruang diskursus-wacana antara jaringan intelektual progresif melawan jaringan rezim pemerintah-pasar-IMF-World Bank, secara estafet telah dilaksanakan pada ESF I 2002 di Florence, ESF II Paris (2003), ESF III London (2004), ESF IV Athena (2006) dan ESF V Malmö

⁵⁹ Irwan, Alexander. (2006). Dalil Kelembagaan dalam Pengelolaan Sumber Daya, dalam Vedi R Hadiz dan Daniel Dhakedae (ed), *Ilmu Sosial dan Kekuasaan di Indonesia*. Jakarta: Equinox Publishing Indonesia.

⁶⁰ Weedon, Chris. (1987). *Feminist Practice And Poststructuralist Theory*. New Jersey: Wiley-Blackwell

(2008). Dalam konteks Indonesia, pembangunan wacana kritis-alternatif terhadap hegemoni dan konglomerasi media massa, misalnya dilakukan oleh Remotivi— organisasi nirlaba sekaligus gerakan yang meneliti dan menerbitkan esai-esai segar berisi kajian, analisis dan opini seputar media-komunikasi. Adapun dalam kerja-kerja jurnalistik, kehadiran Project Multatuli yang diinisiasi oleh para jurnalis kritis Indonesia telah berkontribusi mengangkat diskursus wacana kritis melalui jurnalisme publik mengenai beragam permasalahan sosial yang selama ini ditutupi para rezim penguasa, suara yang dipinggirkan, komunitas yang disisihkan dan isu dasar yang disisihkan. Diantara hasil kajian Project Multatuli seperti “Tanah Desa dalam Pusaran Bisnis dan Kuasa Keraton Yogyakarta”, “Jurnalisme Indonesia untuk Siapa Dia Bekerja?”, “Pencitraan Polri: Menormalisasi Kekerasan Lewat Konten Youtube dan Media”. Wacana alternatif melalui film dokumenter juga diinisiasi oleh Watchdoc Documentary, Diantara film yang diproduksi The EndGame (Watchdoc), Pulau Plastik (Visinema Picture, Kopernik, Akarumput, Watchdoc), Kinipan (Watchdoc, Global Film), Sexy Killers (Ekspedisi Indonesia Biru, Watchdoc), Asimetris (Ekspedisi Indonesia Biru, Watchdoc), Jakarta Unfair dan Rayuan Pulau Palsu



BERIKAN PENDAPATMU?

Apakah kawan pernah terlibat dalam berbagai bentuk pembangunan wacana kritis? Atau menemukan praktik hegemoni wacana disekitarmu? Tulis analisa singkatmu dibawah ini:

.....

.....

.....

.....

2. JUDICIAL REVIEW

Diskursus dalam konteks kelembagaan beroperasi pada dua tataran, yaitu, tingkat pertama identik dengan organisasi sebagaimana sebuah kelompok menguasai universitas/lembaga penelitian/media massa untuk menyebarkan dan memperkenalkan gagasannya, sedangkan tingkat kedua berupa segala bentuk aturan negara maupun lintas negara yang memiliki kekuatan hukum mengikat termasuk memberikan sanksi bagi para pelanggar.⁶¹ Varian lain perlawanan secara struktural terhadap segala regulasi yang dianggap merugikan warga negara dapat dilakukan melalui Judicial Review. *Judicial Review* (JR) atau hak uji materi merupakan proses pengujian peraturan perundang-undangan yang lebih rendah terhadap peraturan perundang-undangan lebih tinggi yang dilakukan oleh lembaga peradilan.⁶² Dalam praktiknya JR terbagi menjadi dua mekanisme ,yaitu, (1) JR undang-undang terhadap UUD 1945 dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi (MK), dan (2) Uji Materiil terhadap peraturan perundang-undangan di bawah UU terhadap UU dilakukan oleh Mahkamah Agung (MA). JR diposisikan sebagai salah satu cara yang dianggap “konstitusional” yang “diberikan oleh negara”

⁶¹ Irwan, Alexander (2005) *op.cit*

⁶² Admin (24 April 2019), “Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi”, <https://indonesia.go.id/layanan/kependudukan/ekonomi/judicial-review-ke-mahkamah-konstitusi>. Diakses pada 16 Desember 2020

kepada setiap warga negaranya yang merasa tidak sepakat dengan peraturan perundangan-undangan dan menuntut untuk direvisi atau bahkan dibatalkan. JR dilandasi atas prinsip “*adanya konstitusi yang telah terkodifikasi dan memungkinkan bagi pengadilan untuk memutuskan suatu tindakan atau kebijakan yang terbukti menyalahi konstitusi*”.⁶³ Permohonan judicial review dapat dilakukan secara luring (*offline*) maupun daring (*online*) secara gratis (tidak dikenai biaya).

Permohonan secara luring menyertakan berkas: (1) permohonan tertandatangani pemohon; (2) fotokopi identitas pemohon; (3) fotokopi identitas kuasa hukum dan surat kuasa; dan/atau (4) Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga; (4) Daftar alat bukti beserta alat bukti yang mendukung permohonan, terdiri dari salinan UU atau Perppu berisi halaman yang memuat tanggal pengundangan dari salinan UU/Perppu dan bab yang dimohonkan pengujian dan salinan UUD 1945.⁶⁴ Permohonan luring disyaratkan secara wajib untuk jenis permohonan yang diajukan melalui kuasa hukum. Berkas yang ada sama dengan permohonan online namun dalam *softfile* dengan ekstensi *.doc/pdf* dalam satu file/folder lalu dikirim secara online. Berlaku khusus untuk permohonan pengujian formil, yang mana berkas permohonan diajukan maksimal 45 hari sejak UU/Perppu diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.⁶⁵ Secara substansial berkas permohonan memuat: (1) nama pemohon dan/atau kuasa hukum, pekerjaan, kewarganegaraan, alamat rumah/kantor, dan alamat *e-mail*; (2) Uraian mengenai kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum pemohon dan alasan permohonan; dan (3) Petitum, mencakup hal-hal yang dimohonkan untuk diputus dalam permohonan.⁶⁶ Proses persidangan perkara PUU meliputi: (1) pemeriksaan pendahuluan, dengan agenda utama mendengar pokok-pokok permohonan, memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan.⁶⁷; (2) pemeriksaan persidangan, dilakukan dalam sidang pleno terbuka untuk umum yang dihadiri oleh 9 orang hakim atau minimal 7 orang hakim dengan agenda mendengar keterangan dari pemberi keterangan, pihak terkait, ahli, saksi dan memeriksa dan/atau mengesahkan alat bukti tertulis, rangkaian data, keterangan, perbuatan, keadaan, dan/atau peristiwa yang bersesuaian dengan alat-alat bukti lain yang dapat dijadikan petunjuk serta alat-alat bukti lain yang berupa informasi terkait; (3) pengucapan putusan, mengacu Rapat Permusyawaratan Hakim guna mengambil putusan dengan mekanisme pertama musyawarah mufakat, lalu voting (suara terbanyak) atau opsi terakhir putusan mengacu pada suara terakhir ketua sidang pleno hakim konstitusi.⁶⁸



STUDI KASUS:

JR pernah dilakukan oleh aliansi sipil di Indonesia untuk membatalkan UU Badan Hukum Pendidikan (BHP) yang dianggap telah memicu komersialisasi pendidikan, perampasan hak-hak terhadap akses berpendidikan dan

⁶³ Heywood, 1997 Andrew Heywood, *Politics*, 2nd Edition, New York: Palgrave MacMillan, 2002,

⁶⁴ Badriyah Khaleed. (2014). *Mekanisme Judicial Review: Dilengkapi Contoh Putusan MK*. Yogyakarta: Penerbit Medpress Digital; Permatasari, Erizka (15 Juni 2021). “Langkah-langkah Memohon *Judicial Review* UU ke MK”, *Hukum Online*, diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5f8661093ee62/langkah-langkah-memohon-ijudicial-review-i-uu-ke-mk/>

⁶⁵ Pasal 9 ayat (2) PMK 2/2021

⁶⁶ Pasal 10 ayat (2) PMK 2/2021

⁶⁷ Pasal 41 ayat (1) PMK 2/2021

⁶⁸ Pasal 45 ayat (4) UU 24/2003 jo. Pasal 66 ayat (2) dan Pasal 67 ayat (1) PMK 2/2021; Pasal 45 ayat (7) UU 24/2003 jo. Pasal 67 ayat (5) PMK 2/2021; Pasal 45 ayat (8) UU 24/2003 jo. Pasal 67 ayat (6) PMK 2/2021

pelanggaran etik akademik. JR UU BHP dilakukan oleh Tim Advokasi Koalisi Pendidikan, *Education Forum* (EF), Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO), dan Tim Advokasi Masyarakat untuk Pendidikan Gratis pada tahun 2010. Agenda sipil ini berhasil membatalkan UU Badan Hukum Pendidikan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11-14-21-126-136/PUU-VII/2009. Kebijakan Omnibuslaw Cipta Kerja telah menuai penolakan berbagai basis dan simpul masyarakat—memicu gelombang aksi massa begitu masif pada rentan 2019 – 2021. Aliansi bersama mengajukan uji materi *omnibus law* Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Substansi gugatan meliputi potensi UU Cipta Kerja yang dapat menghapus ketentuan aturan mengenai jangka waktu perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) maupun status pekerja kontrak yang berimplikasi pada menghapus sebagian kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja dan menghapus sanksi bagi pelaku usaha yang tidak membayar upah serta terpangkasnya waktu istirahat mingguan. Selain itu gugatan pada klaster pendidikan perihal masuknya klaster pendidikan di dalam Omnibus Law UU 11/2020 Cipta Kerja mendorong pendidikan sebagai bisnis. Uji materi ini “berhasil” dengan hasil putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memutuskan bahwa Omnibus Law UU 11/2020 Cipta Kerja Inkonstitusional secara bersyarat.



BERIKAN PENDAPATMU?

Apakah menurut kawan masih ada peraturan perundang-undangan yang perlu di JR karna merugikan warga negara? Tulis analisa singkatmu dibawah ini kawan:

.....

.....

.....

.....

.....

3. ADVOKASI: LOBI, NEGOSIASI, MEDIASI

“ Ketakutan selalu jadi bagian mereka yang tak berani mendirikan keadilan. Kejahatan selalu jadi bagian mereka yang mengingkari kebenaran maka melanggar keadilan. Dua-duanya busuk, dua-duanya sumber keonaran di atas bumi ini ” – Pramodya Ananta Toer

Advokasi adalah proses menyuarakan dengan cara yang efektif guna mempengaruhi pihak tertentu ataupun mengubah kebijakan. Kerja advokasi dapat dilakukan melalui proses mendidik-pendidikan, menciptakan dan meningkatkan kesadaran berbagai pihak terhadap beragam isu-isu yang mempengaruhi atau dihadapi masyarakat dan kebutuhan untuk menyelaraskan kebijakan, undang-undang, gerakan, program.⁶⁹ Dalam kerja-kerja advokasi terdapat lobi, negosiasi dan mediasi. Ada perbedaan mendasar antara advokasi dan lobi, kerja advokasi atas nama organisasi-gerakan berorientasi untuk mempengaruhi beberapa aspek kehidupan masyarakat, perilaku-sikap, mengenai tata aturan atau hukum pemerintah.⁷⁰ Sedangkan lobi secara khusus mengacu pada upaya advokasi yang mencoba mempengaruhi undang-undang. Implikasi logis dari definisi ini dalam praktik kerja bahwa undang-undang yang membatasi lobi yang dilakukan oleh organisasi-gerakan tidak mengatur kegiatan advokasi lainnya. Namun baik advokasi maupun lobi-negosiasi dalam praktik kerja memiliki kesamaan pada dua konsep kunci utama yaitu: (1) pembangunan koalisi; dan (2) keterlibatan publik. Koalisi adalah sekelompok orang yang saling bergantung yang berfokus pada memajukan atau menentang masalah tertentu, kekuatan koalisi terletak pada kemampuannya untuk menghadirkan front persatuan—memobilisasi akar rumput untuk meningkatkan pemahaman dan dukungan masyarakat. Koalisi hanya efektif jika isu/tuntutannya bermanfaat dan simpul-simpul koalisi terorganisir-kolektivitas-bersama, terinformasi, dan berdedikasi untuk mengomunikasikan pentingnya upaya tersebut.⁷¹ Adapun dalam upaya pembentukan koalisi, publik atau basis massa luas harus dilibatkan secara aktif dan diinformasikan mengenai isu/tuntutan yang dibawa—keterlibatan publik adalah skema berbeda guna membuat setiap orang/simpul terlibat dalam pengambilan keputusan melampaui pendekatan forum tradisional (rapat dewan, dengar pendapat publik, atau kampanye iklan).⁷²

LOBI

Lobi secara sederhana dapat diartikan sebagai upaya mempengaruhi pembuat kebijakan untuk menentang atau mendukung isu/kebijakan/program tertentu, termasuk dalam hal ini memberlakukan atau mengubah keputusan/kebijakan/program yang akan menguntungkan atau lebih adil terhadap kepentingan kelompok yang melakukan lobi.⁷³ Jika didasarkan pada relasi aktor dan basis massa, lobi dibedakan menjadi dua model yaitu: (1) lobi akar rumput (*grassroots lobbying*); dan (2) lobi langsung (*direct lobbying*). Lobi akar rumput mendorong masyarakat umum untuk melakukan hubungan/

⁶⁹ AIPP. (2013). *Training Manual on Advocacy, Lobbying and Negotiation Skills for Indigenous Peoples in Climate Change and REDD+*. Asia Indigenous Peoples Pact: Chiang Mai, Thailand.

⁷⁰ CLPI. *Lobbying and Advocacy—Similarities and Differences*. Charity Lobbying for the Public Interest

⁷¹ NSPRA. (2003). *Community Mobilization: Strategies to Support Young Children and Their Families*; and Public Agenda Online. National School Public Relations Association

⁷² National School Public Relations Association op.cit

⁷³ AIPP. (2013). Op.cit

komunikasi/tawar-menawar pada pembuat regulasi (legislatif) tentang suatu masalah.⁷⁴ Sedangkan lobi langsung adalah komunikasi yang ada ditujukan kepada aktor eksekutif/pemerintah secara langsung untuk mempengaruhi undang-undang. Jika suatu isu/tuntutan/masalah akan diputuskan melalui inisiatif pemungutan suara atau referendum, maka banding ke publik dianggap lobi langsung, karena publik dalam hal ini bertindak sebagai legislatif.⁷⁵

NEGOSIASI

Pengetahuan dan kerja yang terpusat pada pencapaian perkenaan (mencapai persetujuan) dari setiap pihak ketimbang orientasi terpisah untuk menginginkan dan mencapai sesuatu.⁷⁶ Negosiasi perpijak pada nilai kontroling diri setiap pihak dan orientasi mencapai solusi ketimbang penyelesaian/penuntutan secara hukum (*arbitrase*), mempertahankan dan meningkatkan relasi, reputasi, meminimalisir dampak negatif dari adanya konflik.⁷⁷ Terdapat dua jenis pendekatan negosiasi yaitu *Distributif berorientasi Negosiasi Zero Sum* dan *Integratif berorientasi Win-Win Solution* dengan perbedaan sebagai berikut:

Aspek	<i>Integratif</i>	<i>Distributif</i>
Kemungkinan solusi / hasil akhir	Win-win	Win-Lose/Lose-lose
Kepentingan meneruskan relasi dengan mitra perundingan	Tinggi	Rendah
Tujuan	Bekerjasama untuk menghasilkan berbagai opsi atau solusi	Semua untuk pemenang
Iklm Tawar-menawar	Terbuka, komunikatif, mau berubah	Tekad untuk menang
Kuantitas waktu yang diperlukan	Banyak	Kurang
Waktu yang menjadi pertimbangan	Kini dan mendatang	Mendesak

(Sumber: Rizal Pangabean, 2016; Lewicki R.J., D.M Saunders, dan Bruce Barry, 2011)

Sebagai titik temu dari konflik antar aktor, didalam negosiasi terdapat klasifikasi aktor yang terlibat dalam proses negosiasi meliputi: (1) Arbitrator (Pihak Penengah), pihak netral yang memiliki kekuatan hukum mengikat terhadap para pihak yang bernegosiasi; (2) Konsiliator (Pihak Pendamai). pihak yang dipercaya berperan untuk memastikan setiap proses/aliran informasi bersifat akurat dan terakses lancar. Konsiliator tidak memiliki kewenangan untuk menetapkan aturan, tetapi sebatas memberikan masukan tentang cara menyikapi kesepakatan yang telah dicapai dan meninjau setiap informasi yang telah dipresentasikan; (3) Mediator (Pihak Netral), pihak yang memiliki peran sebagai penghubung antara pihak yang berkonflik, tetapi tidak punya kepentingan dengan hasil kesepakatan; (4) Konsultan (Pihak Netral), pihak dengan tugas/kewenangan untuk membimbing dan memberi masukan kedua

⁷⁴ CLPI. op.cit

⁷⁵ CLPI.op.cit

⁷⁶ Cuhen, Herb. (1982). *You Can Negotiate Anything: The World's Best Negotiator Tells You How To Get What You Wan*. Bantam: Reissue

⁷⁷ Pangabean, Rizal. (2016). *Modul Kuliah Negosiasi dan Resolusi Konflik*. Departemen Hubungan Internasional FISIPOL UGM

pihak yang bernegosiasi mengenai kemampuan dan teknik/teknis negosiasi; (5) Garantor (Pihak Penjamin), pihak yang dipercayai mampu menjamin setiap kesepakatan yang diambil dari kedua belah pihak yang melakukan negosiasi.⁷⁸

Mekanisme dan proses negosiasi dilalui dalam lima tahapan utama meliputi: (1) *Persiapan*. Tahap membuat asumsi terkait posisi dan kepentingan, konvensi negosiasi, waktu dan tempat serta aturan main, ditahap ini setiap pihak semestinya juga telah menetapkan *Best Alternative to a Negotiated Agreement* (BATNA); (2) *Konstruksi Isu –Agenda*. Tahap menentukan detail agenda, definisi dan tujuan negosiasi; (3) *Pemaparan dan Pencarian Interest*. Tahapan membuka permintaan dan penawaran, hal yang perlu diperhatikan pada tahap ini adalah memahami secara mendalam kepentingan pihak lain/lawan, menempatkan masalah sebelum jawaban dan bersikap konkrit namun fleksibel; (4) *Negosiasi Intensif*. Tahapan membangun jalan keluar melalui konflik dengan cara menentukan *central conflict point*, *working backward* dan solusi harapan, serta mencari kepentingan “objektif” maupun *broadening procedures*; (5) *Kesepakatan*. Tahap memformalkan kesepakatan baik berupa kesepakatan tentatif dan parsial serta meninjau kembali kesepakatan yang telah dibuat bersama.⁷⁹

MEDIASI

Mediasi adalah proses sekaligus pendekatan perundingan dengan bantuan atau melibatkan pihak ketiga diantara dua pihak yang berkonflik, namun pembuat keputusan tetap berada di kedua pihak yang sedang berkonflik. Mekanisme dan proses negosiasi dilalui dalam lima tahapan utama meliputi: (1) Pendahuluan dan penjelasan; (2) Storytelling/pemaparan kisah dari konflik yang ada; (3) Penyampaian isu dan keperluan; (4) Pemecahan masalah; dan (5) Kesepakatan.⁸⁰ Dalam kerja-kerja mediasi, seorang mediator harus memiliki ketrampilan pokok yaitu (1) tidak memihak salah satu pihak; (2) mampu mengkondisikan pihak yang berkonflik agar supaya berkenan menerima perubahan yang akan terjadi sebagai hasil dari proses mediasi yang ada; (3) memperkenalkan pihak-pihak yang berkonflik untuk mengemukakan masalah yang ada; (4) membantu mengidentifikasi hal-hal potensial/terkait yang dapat diperundingkan; (5) membantu menemukan berbagai alternatif solusi; (6) dapat melakukan refleksi dan menempatkan konflik yang sedang dimediasi dalam konteks sosial dan politik yang lebih luas; (7) mampu mengklarifikasi kekuatiran dan keprihatinan pihak-pihak yang berunding; (8) mendengar dengan penuh kepekaan dan tidak defensif.⁸¹ Selain itu mediator dilarang bertindak menyalahkan/menasehati pihak yang sedang berunding, bersikap moralis, mendominasi pembicaraan selama perundingan dan membiarkan salah pihak mendominasi pembicaraan dan memaksakan nilai/kepentingan sepihak.⁸²

Advokasi termasuk rangkaian proses negosiasi, mediasi dan lobi adalah sebuah proses ketimbang sebuah produk/hasil, sebuah sarana bukan tujuan. Advokasi menjadi sarana setiap kaum-entitas yang tertindas, terpinggirkan dan tidak mendapatkan keadilan untuk kehidupan yang lebih inklusif, adil yang beririsan langsung dengan agenda kebijakan terkait.

⁷⁸ Pangabean, Rizal. (2016).*op.cit*

⁷⁹ Pangabean, Rizal. (2016).*op.cit*; Lewicki Roy J., David M. Saunders, and Bruce Barry.(2011). *Essentials of Negotiation*. New York: McGraw-Hill

⁸⁰ Pruitt, Dean .G. & P.J. Carnevale (1993) *Negotiation in Social Conflict*. Pacific Grove, CA: Brooks/Cole.

⁸¹ Pangabean, Rizal. (2016).*op.cit*; Lewicki Roy J. et.al.(2011). *Op.cit*

⁸² Pangabean, Rizal. (2016).*op.cit*; Lewicki Roy J. et.al.(2011). *Op.cit*



STUDI KASUS:

Papua adalah contoh nyata dari konflik berkepanjangan sekaligus bentuk kekerasan oleh negara yang dilakukan berulang semenjak tahun 1960-an. Telah berdampak pada sulinya mewujudkan kedamaian dan orang asli Papua selalu dalam bayang - bayang tindakan represi negara. Upaya addvokasi-negosiasi-mediasi kerap kali menemui jalan buntu. Berbagai kajian menemukan bahwa permasalahannya ada pada pemerintah pusat karena belum memiliki *political will* yang serius untuk menyelesaikan kekerasan politik di Papua. Sementara dari masyarakat sipil, tahun 2011 terbentuk Jaringan Papua Damai (JDP). Jaringan ini terdiri dari kalangan rohaniwan (mayoritas dari gereja), akademisi (LIPI kini BRIN), NGO, dan suku tradisional Papua, salah satu aktor sentral dalam jaringan ini adalah Pastor Neles Tebay. JDP bersifat informal dengan agenda utama untuk menghubungkan kelompok-kelompok yang berkonflik di Papua dan menjembatani Rakyat Papua dengan Pemerintah Pusat untuk melakukan dialog inklusif. Agenda ini diwujudkan salah satunya melalui Konferensi Papua Damai 2011 dengan hasil menyusun indikator Papua Tanah Damai meliputi aspek politik, keamanan, hukum and HAM, sosial, budaya, ekonomi and lingkungan. Setelah indikator disepakati, dilanjutkan ke tahap sesi pengajuan negosiator. Namun diluar dugaan, konferensi itu berakhir dengan kemarahan Pemerintah Pusat atas sebab negosiator yang ditunjuk adalah Benny Wenda, Rumakiek Rex, John Ondawame, Leoni Tanggahma, dan Octo Motte. Negosiator yang dianggap representatif bagi masyarakat Papua ini, bagi Pemerintah Pusat digolongkan sebagai tokoh separatis. Pasca polemik ini terjadi kerengangan jarak antara JDP dengan Pemerintah Pusat selama 2 tahun, hingga pada tahun 2013 sampai 2015 diadakan kembali pertemuan eksploratif antara JDP dengan Pemerintah Pusat melalui forum sebanyak 7 kali. Rangkain pertemuan ini membahas isu hukum dan HAM, keamanan, pembangunan infrastruktur, kesehatan, dan isu lainnya. Alih-alih melaksanakan hasil rekomendasi forum, Pemerintah Pusat cenderung melakukan dekomitmen, ditandai dengan masih terjadinya berbagai kekerasan politik di Papua diantaranya konflik berdarah di Nduga pada tahun 2019.



BERIKAN PENDAPATMU?

Apakah kawan pernah menemukan atau terlibat dalam kerja advokasi/negosiasi/mediasi? Bagaimana proses dan taktik yang digunakan serta hasil capaian? Tulis analisa singkatmu dibawah ini kawan:

.....

.....

.....

.....

.....

4. AKSI PENDUDUKAN/OKUPASI

“Kekerasan reaksioner hanya bisa dijawab dengan kekerasan revolusioner”—Che Guevara

Aksi duduk-duduk simbolik (*symbolic sit-ins*) didefinisikan sebagai protes melalui pendudukan tempat atau ruang tertentu dengan menggunakan ideologi, retorika dan secara historis merupakan manifestasi dari sikap aksi *sit-ins*—secara teknis disebut sebagai protes simbolik dengan okupasi/aksi pendudukan.⁸³ Aksi pendudukan dilakukan dengan cara mengambil alih/memasuki/menolak menolak meninggalkan tempat-tempat yang tidak diinginkan/dilarang penguasa.⁸⁴ Secara historis aksi pendudukan berasal dari tradisi buruh pabrik, yaitu sebuah aksi mogok kerja lalu melakukan pendudukan pabrik dan pengambilalihan alat produksi guna mencapai tuntutan yang disuarakan oleh serikat pekerja. Namun tidak semua aksi pendudukan bertujuan untuk mengambil alih alat produksi, misalnya dalam terminologi lain seperti “demonstrasi” adalah aksi dengan pola penguasaan ruang publik secara temporal dapat bersifat menutup ruang publik sekaligus untuk pembukaan akses maupun partisipasi terhadap hak-hak publik. Dalam perkembangannya pemogokan dengan aksi duduk-duduk (*sit-down strikes*) menjadi teknik yang paling menonjol dalam gerakan sosial di Abad-20.⁸⁵ Aksi pendudukan diprediksi akan semakin banyak digunakan dan signifikan sebagai alat taktis gerakan sosial di masa mendatang.⁸⁶ Aksi pendudukan dapat diklasifikasi berdasarkan durasi aksi, ukuran massa dan level *flex*. Indikator durasi dan ukuran massa dapat dengan mudah dilihat secara kasat mata. Durasi total menunjukkan perputaran waktu mulai dari awal hingga berakhirnya aksi. Durasi waktu menunjukkan lama waktu dari aksi yang dilakukan, dihitung dari perputaran waktu aksi dimulai hingga akhir aksi, dari hitungan jam, hari, mingguan hingga bulanan. Ukuran massa (*sheer size*) menunjukkan perbedaan jumlah massa yang terlibat mulai dari seorang individu, beberapa individu hingga massa dalam jumlah yang banyak. Adapun *flex* sendiri adalah variasi antar aksi dalam hal “mobilisasi”. Level *flex* sangat mempengaruhi bentuk aksi yang dilakukan, misalnya, *flex* rendah (*unflexed*) membentuk aksi pasif dengan duduk santai, berbincang santai-tiduran; *flex* medium membentuk model kelompok diskusi dan sesi strategi termasuk pers conference; *flex* tinggi bentuk aksi termanifestasi dengan cara aksi massa berjumlah banyak sembari berorasi dan pawai termasuk *vis a vis* berhadapan dengan aparat.⁸⁷ Dari tiga indikator ini, aksi pendudukan kemudian terbagi menjadi: (1) *Pack In*; (2) *lone-Ins*; (3) *One Night Stand*; (4) *Spirited Sieges*; dan (5) *Long Term Vigils*.

Klasifikasi Aksi Pendudukan

No	Tipe	Indikator		
		Durasi Waktu	Ukuran Massa	Level <i>Flex</i>
1	<i>Pack-In</i>	Beberapa jam	Kerumunan	Tinggi
2	<i>Lone-Ins</i>	1 sampai beberapa hari	1 orang	Rendah
3	<i>One Night Stand</i>	1 – 2 hari	Klik, kerumunan kecil	Medium

⁸³ Lofland, John dan Michael Fink. (1982). *Symbolic Sit-Ins: Protest Occupations at the California Capitol*. Washington: Univerity Press of America

⁸⁴ Sharp, Gene. (1973). *The Politic of Non-Violence Action*. Boston: Sargent

⁸⁵ Coorney dan Michalwski dalam Lofland, John (ed). (1985). *Protes: Studeis of Collecive Behaviour and Social Movement*. London: Transaction Publisher

⁸⁶ Lofland, John (ed). (1985). *Op.cit*

⁸⁷ Lofland, John dan Michael Fink. (1982).*op.cit*

4	<i>Spirited Sieges</i>	Berhari-hari	Kerumunan	Medium – tinggi
5	<i>Feat/Long Term Vigils</i>	Berminggu-minggu	Klik sampai kerumunan	Rendah – medium
(Sumber: Lofland dan Fink, 1985)				

Derajat capaian dan kegagalan serta efektivitas dari strategi dan model aksi pendudukan dapat membutuhkan pemahaman yang cermat terhadap dinamika atas aksi yang terjadi, meliputi pemahaman dan analisa mengenai berapa lama aksi terjadi, berapa tempat yang melakukan aksi serupa/serempak, seberapa banyak orang yang terlibat, memiliki efek dan implikasi apa—jika ditujukan kepada lembaga sentral maka analisa perlu ditujukan pada seberapa besar target lembaga yang diserang dan bagaimana respon lembaga tersebut terhadap aksi apakah terbuka atau tertutup.⁸⁸



STUDI KASUS:

Tradisi aksi mogok dan pendudukan tidak bisa dilepaskan dari sejarah gerakan buruh. Di Indonesia, diantara aksi pendudukan yang dilakukan para buruh parik di lokasi perusahaan seperti aksi grebek pabrik dalam aksi “Hostum” (Hapus Outsourcing dan Tolak Upah Murah) yang dicetuskan oleh Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) dalam peringatan Hari Buruh 1 Mei 2012; aksi Buruh PT Hero Supermarket yang berkoalisi dengan Serikat Pekerja Aneka Industri (SPAIFSPMI) sebagai respon atas pemecatan kerja sepihak kepada lima ratusan buruh kontrak; dan terbaru pada Desember 2022 berbagai serikat buruh melakukan aksi demonstrasi sekaligus pendudukan kantor pusat pemerintahan—seperti di Jawa Barat dan DKI Jakarta, untuk melakukan penolakan atas penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan yang merupakan aturan turunan dari UU Cipta Kerja. Dalam ruang akademik, aksi mogok dan pendudukan juga dilakukan oleh Serikat Buruh Akademik Unprok 45 Yogyakarta—wadah pergerakan yang diinisiasi oleh dosen - dosen Unprok 45 Yogyakarta. Kemunculan serikat ini bermula pada September 2020, sebagai respon atas kebijakan rasionalisasi organisasi kampus, pengurangan jumlah karyawan hanya menjadi 45 orang dan mempercepat durasi kontrak kerja serta pemangkasan upah. Ada kasus dimana dosen kenakan perjanjian kerja ganda dengan dua status sebagai dosen tetap sekaligus dosen tidak tetap, sehingga menjadi celah bagi dosen untuk dipecat tanpa alasan yang jelas oleh yayasan. Di sisi lain pengelola Unprok melakukan penagihan terhadap mahasiswa yang masih menunggak dalam pembayaran biaya kuliah. Permasalahan pokok di Unprok 45 meliputi gaji yang rendah, ketidakjelasan peraturan kepegawaian, pelanggaran statuta kampus, dan pengelolaan keuangan kampus yang tidak transparan. Menanggapi berbagai permasalahan ini, Serikat Buruh Akademik Unprok 45

⁸⁸ Eisinger dalam dalam Lofland, John (ed). (1985). *Protes: Studeis of Collecive Behaviour and Social Movement*. London: Transaction Publisher

Yogyakarta pada 23 September 2020 sebanyak 98 dosen dan karyawan kampus melakukan pemogokan dan menyampaikan mosi tidak percaya. Lalu ditindaklanjuti 25 anggota Senat Akademik dengan menekan yayasan agar supaya memberhentikan rektor. Namun tindakan ini ditanggapi dengan ancaman pemecatan oleh Yayasan Unprok 45 kepada para dosen dan karyawan yang melakukan aksi pemogokan. Perkembangan terakhir Serikat Buruh Akademik Unprok 45 melakukan pelaporan ke DPRD DIY pada 21 Juni 2021



BERIKAN PENDAPATMU?

Apakah menurut kawan masih ada peraturan perundang-undangan yang perlu di JR karna merugikan warga negara? Tulis analisa singkatmu dibawah ini kawan:

.....

.....

.....

.....

.....

5. KIRI LUAS - FRONT POPULER

“ Demonstrasi ini akan teratur, tetapi bukan karena patuh. Akan bangga tetapi bukan angkuh. Akan anti kekerasan tetapi tidak penakut ” – Bayard Rustin.

Mengandalkan pada pendekatan populisme-massa aksi, front populer atau juga sering disebut kiri luas mencoba mengkombinasikan berbagai taktik strategi aksi populer, konsolidasi beragam faksi/spectrum politik yang terkonsolidasi atas tuntutan isu yang sama. Tradisi ini secara historis berasal dari gerakan horizontalisme atau *Horizontalidad* merujuk pada eksperimen model gerakan radikal buruh yang termarginalisasi di Argentina pada era 2000-an awal, sebuah metode pengorganisasian massa dengan hubungan terbuka dan deliberatif.⁸⁹ Terdapat beberapa taktik-strategi model gerakan ini yaitu, pertama, Decentralised Leadership, tipe baru gerakan desentralisasi tanpa pemimpin (leaderless resistant).⁹⁰ Bentuk gerakan mencoba meminimalisir struktur hierarkis di dalam gerakan dengan mengadopsi modeling ‘horizontalidad’ yang terbuka dan deliberatif. Tidak membawa identitas lembaga dimana terdapat tim khusus yang menscreening atribut yang sekaligus membiaskan aktor agar tidak tertangkap. Kedua, Open Source Protest, semua orang didorong untuk terlibat dalam aksi dimana proses partisipatif dan curah pendapat secara egaliter yang setiap orang memiliki suara sama.⁹¹ Setiap orang memiliki hak yang sama dan panggung aksi bisa diisi siapapun dengan varian aksi apapun. Ketiga, Flexible and Diverse Tactics, memperkuat basis massa terdepan ketika head to

⁸⁹ Ilhat Marina Sitrin (2006). *Horizontalism: Voices of Popular Power in Argentina*. AK Press.

⁹⁰ Lee, Francis (29 June 2019). *Open-source protest: Understanding a new generation of resistance*– via YouTube

⁹¹ Banjo dkk. (2019). "Hong Kong Democracy Flourishes in Online World China Can't Block". *Bloomberg*

head berhadapan kepolisian/aparat keamanan, berkumpul rapat ketika mengorganisir massa dan tersebar kesemua penjuru untuk melarikan diri dari penangkapan polisi.⁹² Sebaran taktik ini juga mencakup geografis dimana titik aksi didiversifikasi di banyak titik. Keterikatan didasarkan kesamaan isu yang dituntut, prinsip saling jaga bersama, saling menghormati dan meminimalisir konflik internal—semacam jargon 'Do Not Split' versi demonstran Hongkong. Keempat, Black Bloc and Group Defence, memblokade titik utama, menggunakan pakaian gelap untuk meningkatkan anonimitas dan privasi serta memperkuat pertahanan bersama. Kelima, Offensive actions and the 'fighters', menghindari adu fisik maupun bentrokan dengan kepolisian, basis massa terbagi menjadi dua basis utama dimana, basis pertama digaris terdepan berisi para 'brave fighters', sedangkan layer berisi mayoritas massa sipil dengan selebrasi aksi kreatif.⁹³ Kombinasi dua basis ini dilandaskan pada kesepakatan dan orientasi bahwa capaian maksimum dapat dicapai ketika taktik damai dan tindakan konfrontatif bekerja bersama.⁹⁴ Keenam, Operasi Pabrik, mengadopsi model gerakan buruh dimana setiap kantor/perusahaan/kampus yang dilewati maka akan ditarik basis massanya agar bergabung ke dalam long march. Ketujuh, Pendekatan Empati Sosial, didahului dengan 'sowan' door to door kesetiap rumah warga yang akan dilewati dan mengaransi aksi damai serta tersedianya tim kebersihan lingkungan, bertujuan untuk menarik simpati publik. Bentuk aksi massa ini dilengkapi dengan sub-aksi pendukung seperti: mengambil alih gedung strategis, menolak membeli barang/produk tertentu, mogok makan, parade, konser, panggung terbuka, festival, dan kampanye petisi. Secara sumber daya finansial menggunakan mekanisme crowdfunding melalui berbagai bentuk donasi publik. Segala publikasi dan rilis publik melalui press conference, citizen journalism dan advertising campaign. Pasca aksi model front populer ini biasanya akan terfragmentasi kedalam dua basis utama, pertama faksi yang berkehendak mengembangkan gerakan menjadi politik alternatif di masa depan melalui pembentukan atau berkoalisi dengan partai politik untuk berkontestasi dalam pemilu—mengubah kebijakan secara struktural. Sedangkan faksi kedua, cenderung menolak formalisasi dan strukturalisasi gerakan dengan tetap menganggap basis gerakan tetap harus cair dan bersifat temporal, akan bertemu lagi ketika ada isu yang dituntut.



STUDI KASUS:

Pendekatan front populer—populisme massa aksi diberbagai belahan dunia diantaranya *Penguin Revolution* Chile (2004), *Occupacy Wall Street* Amerika (2011), *Umbrella Movement* Hongkong (2014), *Indigeounus Water Right* Amerika (2016), *Protest Again Child Married* India (2018), *Youth Slave Law* Peru (2018) dan *Anti Extradition Law Amendment Bill – Anti ELAB Movement* (2019), dan Gejayan memangil (2019-2020). Kesemuanya memiliki benang merah basis massa yang inklusif dengan modeling aksi kombinasi aksi pendudukan disertai berbagai bentuk aksi pendukung dengan cara-cara populer—telah menarik simpati ribuan kaum muda untuk terlibat dalam gerakan bersama.

⁹² Anderlini, Jamil (2 September 2019). "Hong Kong's 'water revolution' spins out of control". *Financial Times*

⁹³ Hui, Mary (14 August 2019). "Mired in anger and hatred, Hong Kong's 'radical' protesters are seeking a way forward". Quartz

⁹⁴ Zaharia, Marius, Tam, Felix, Jim, Clare. "Frontline View: Making the case for violence in Hong Kong protests". Reuters



BERIKAN PENDAPATMU?

Apakah kawan pernah terlibat dalam massa aksi? Bagaimana dinamika pengorganisirannya massa dan taktik strateginya? Tulis analisa singkatmu dibawah ini kawan:

.....
.....
.....
.....
.....

APA NASIB DEMOKRASI KITA?!



BAB 6

REFLEKSI GERAKAN: MEMBACA ERA DEMOKRASI OTOTARIAN

“Remember the ide not the man...”

-Anonymous

“ Jika kita tidak bisa menebak apa yang akan datang, paling tidak kita punya hak untuk membayangkan masa depan yang kita inginkan” -Eduardo Galeano

Jika kita membaca berita tentang politik apa yang kita dapatkan? Berita mengenai harapan akan datangnya perubahan atau pesimisnya kita melihat arah kebijakan? Kalau kamu membaca berita ekonomi apa yang terfikirkan pertama kali? Potret kehidupan yang lebih sejahtera atau terancamnya banyak nyawa warga karena penggusuran dan pengangguran? Jawaban atas itu semua bukan menjadi jalan untuk lahirnya perubahan tapi kita bisa memahami situasi sosial seperti apa yang kita hadapi. Bicara mengenai ekonomi dan politik hari ini seperti sebuah ajakan untuk mengetahui bagaimana hak kita dijamin, pekerjaan kita dilindungi dan bagaimana jika kita ingin mengontrol kekuasaan. Politik bukan bicara soal tahta tapi bagaimana hak rakyat diakomodasi dan kekuasaan tidak dijalankan secara sewenang-wenang. Obrolan yang menyeret kita menyadari ada tidaknya kedaulatan rakyat dalam arti sebenarnya. Kita memulai cerita dari keinginan menjawab itu.

“ Orde Baru sudah meninggalkan Indonesia, tetapi Indonesia belum mampu meninggalkan Orde Baru” - Ariel Heryanto

Diawali oleh situasi Orde Baru dimana kehidupan politik kita berjalan tidak sehat. Setiap warga diawasi pandangan politiknya, dikontrol semua akses informasinya dan dihukum jika dianggap beda. Nyaris kekuasaan itu berjalan absolut dengan Soeharto sebagai pemimpinya. Tiga puluh dua tahun lebih kekuasaan itu membangun diri melalui praktek politik yang kotor disertai sistem ekonomi yang pro pada kekuatan modal. Orde Baru ingin menjelma menjadi politik dinasti tapi kemudian dihantam oleh krisis ekonomi dan protes luas dari gerakan mahasiswa. Sejarah perlawanan yang dipupuk sejak tahun 1970-an itu meraih kemenangan di tahun 1998: Soeharto jatuh dari tahta dan terkuburlah pengaruh politik keluarga Cendana. Keluarga Cendana hanya lapisan kecil dari tradisi politik Orde Baru. Pada saat itu muncul harapan baru atas demokrasi yang ditandai dengan praktek politik liberal dalam wujud otonomi daerah dan kebebasan pendirian partai politik baru. Di awal tahun 2000 Demokrasi sepertinya akan mekar dan subur. Demokrasi yang dinikmati itu adalah buah perjuangan panjang. Perjuangan sipil untuk meraihnya memakan korban tak sedikit. Diantaranya pelanggaran HAM yang mencoreng kekuasaan Orba baik saat awal berdirinya maupun ketika mengakhiri kekuasaannya. Praktek pelanggaran HAM yang pelakunya tidak diadili itu telah membawa rezim berikutnya untuk mengulang kesalahan serupa: perampasan tanah hingga pembunuhan atas aktivis muncul kembali. Demokrasi tidak bertahan lama karena berbaurnya para pejuang demokrasi dan penjahat HAM di lingkaran kekuasaan. Berbaurnya para pejuang dan pecundang membuat agenda demokrasi berjalan mundur bahkan menyimpang dari harapan awal. Banyak masalah laten yang tidak bisa diatasi di kemudian hari. Diantara hal yang tidak bisa dipenuhi adalah bagaimana pelanggaran HAM itu bisa diadili dan pelakunya dihukum. Absenya penanganan pelanggaran HAM itu, salah satu diantaranya, yang membawa kembali kekuasaan tipe Orba naik ke tahta. Sinyal yang paling mudah dibaca adalah peningkatan peran TNI dan Polisi dalam ranah kehidupan sipil. Diberikanya anggaran yang besar pada mereka sekaligus kewenangan yang luas untuk mengurus berbagai problem sipil. Sehingga upaya untuk mengakhiri praktek Dwi Fungsi ABRI di masa lalu kini mulai ditanggalkan dengan memberi peran dan wewenang pada aparat keamanan yang serupa dengan masa Soeharto. Istilah yang populer adalah Dwi Fungsi Polri. Polri memiliki peran yang lebih luas bahkan memiliki wewenang yang rentan di salah gunakan. Malah yang mutakhir adalah perluasan dan penambahan markas komando serta pembentukan Komponen Cadangan. Di samping itu TNI dan Kepolisian mendorong sejumlah MOU dengan berbagai Kementerian sipil. Terutama di masa pandemi sekarang ini peran aparat keamanan bukan hanya menjaga keamanan tapi ikut terlibat dalam vaksinasi segala. Sebuah peran yang mendulang berbagai kritik.

Membaca situasi yang seperti itu membawa kita pada kekuatiran akan bangkitnya Era Otoriter. Sebuah era yang ditandai dengan meluas dan meningkatnya praktek-praktek pelanggaran HAM. Situasi itu tercermin melalui berbagai gejala yang bisa dirasakan. Pertama tama adalah ruang kebebasan masyarakat menyatakan pandangan yang makin menciut. Kriminalisasi hingga peretasan banyak dialami oleh para aktivis yang mencoba mengkritisi kebijakan pemerintah. Upaya masyarakat sipil untuk membangun kekuatan politik alternatif berhadapan dengan regulasi perundang-undangan yang memang menyulitkan bagi berdirinya parpol baru. Kedua, adalah meluasnya pengaruh para pemodal yang memanfaatkan praktek ekonomi politik rente untuk memupuk kekuasaannya. Diatas sistem Pemilu yang berongkos tinggi maka pemodal punya kekuasaan untuk mengendalikan bahkan mengarahkan partai politik hingga agenda politik. Tampak itu semua dari serangkaian regulasi yang menguntungkan peran dan posisi mereka. Gejala terakhir yang berbahaya adalah diamputasinya

lembaga penegak hukum seperti KPK sehingga tidak lagi punya peran yang menggigit. Situasi politiknya bukan mengarah pada penguatan nilai demokrasi tapi menjurus pada gejala otoriter.

Sedang pada sisi ekonomi tampaknya para aktivis dihadapkan pada situasi yang mengkuatirkan. Pertama adalah makin meningkatnya kesenjangan sosial yang memberi kesempatan bagi praktek politik uang untuk berkembang. Lebarnya kesenjangan sosial itu juga menyuburkan berbagai isu SARA yang membawa politik dalam jebakan kekerasan dan sikap intoleran. Di sisi lain makin meluasnya praktek ekonomi yang basisnya adalah eksploitasi sumber daya alam telah membawa berbagai petaka lingkungan sekaligus perampasan banyak lahan milik warga. Terlebih banyak elite politik memiliki usaha tambang. Diatas basis ekonomi yang eksploitatif itu muncul banyak soal dari mulai pemangkasan hak buruh hingga meluasnya praktek kekerasan dalam mengawal pembangunan. Resiko dari sistem ekonomi semacam ini adalah membesarnya pengaruh para pengusaha bahkan makin banyaknya regulasi perundang-undangan yang mendukung keberadaan mereka. Banyak contoh bisa disebut bagaimana peran dan posisi pengusaha jauh lebih diutamakan ketimbang kepentingan rakyat kebanyakan.

Seluruh fenomena itu semua tidak sekedar menunjukkan kegagalan demokrasi atau berkuasanya para penjahat tapi atlas sosial yang kita diami sekarang ini sedang berada dalam ancaman. Paling utama dan penting adalah ancaman atas demokrasi. Nilai yang mendasari perjuangan kolektif masyarakat sipil itu mulai dikubur perlahan. Turunan langsung dari sistem demokrasi adalah partai politik dan lembaga perwakilan yang sekarang ini mengalami penurunan kepercayaan. Banyak survai mengatakan demikian: partai politik makin menjauh dari fungsi dasarnya dan parlemen tidak bekerja sesuai harapan rakyat. Efek yang paling serius dari situasi ini adalah ketidakpercayaan pada otoritas yang bisa menimbulkan serangkaian krisis. Krisis kepercayaan tampak dari bagaimana publik kerap kali percaya pada berita yang muncul bukan dari saluran resmi. Bahkan yang lebih tragis adalah krisis kepemimpinan yang membawa masyarakat berpaling pada figur populer dan populis meski itu hanya seorang demagog. Kemandegan pranata politik untuk bekerja sesuai amanat konstitusi membawa masyarakat pada situasi chaos: politik hanya berputar pada kegiatan alih kekuasaan yang melibatkan tokoh itu- itu lagi.

Diperuncing oleh krisis komunikasi yang terjadi antara elite dengan masyarakat. Krisis komunikasi seperti tercermin pada masa pandemi: komunikasi tidak dilakukan secara terpusat, pesanya inkonsisten dan fatalnya tidak transparan. Konsekuensinya seperti yang tampak di berita: kematian karena pandemi angkanya sempat membumbung tinggi, penularan terjadi secara meluas dan kemampuan antisipasi yang lamban. Praktek komunikasi yang chaos ini membuat elite politik bak berposisi seperti Dewa yang tidak pernah salah sedang rakyat himpunan massa yang kebingungan karena kesulitan hadapi situasi. Wajar jika kemudian banyak keputusan politik yang kontroversial muncul seperti revisi UU KPK hingga Omnibus Law. Tanpa komunikasi yang setara, aktif dan partisipatif maka kekuasaan bisa mengemudikan tahta dengan cara sewenang-wenang. Apalagi kalau aturan main yang sudah disusun tidak ditaati oleh elite politik sendiri. Yang kita hadapi bukan lagi sekedar masalah tapi sebuah petaka yang sulit untuk mengelak. Petaka karena demokrasi sebagai sistem nilai dan cara hidup berbangsa mulai dicurigai dan sistem alternatif lain yang muncul tidak mampu menambal kekurangan dalam sistem demokrasi.

Bagaimana memahami itu semua? apakah kita butuh kerangka teori untuk menjelaskan situasi yang merisaukan ini? Pentingkah kita mengetahui dampak jangka panjang jika situasi ini dibiarkan berjalan seperti sekarang ini? Mungkinkah gerakan sosial dapat memainkan peran sebagaimana dulu di masa kejatuhan Orba tapi melalui taktik yang berbeda? Dikatakan taktik yang berbeda karena situasi gerakan sosial juga tidak sekuat dulu sedang yang dihadapi adalah kekuasaan yang tidak lagi memusat

pada figur tertentu saja. Jika perlu untuk melakukan analisis sosial atas situasi ini tentu pertimbangan yang utama adalah bagaimana gerakan sosial mengambil peranan dan seberapa kuat dukungan rakyat pada agenda gerakan. Metode analisis sosial digunakan bukan untuk sekedar memahami kekuatan struktur tapi bagaimana pula para agen memberi sumbangan perubahan. Di sisi inilah pemahaman atas analisis sosial tidak melalui sajian teori semata tapi bagaimana para aktor perubahan bekerja. Aktor-aktor itu bekerja bukan dalam ruang yang vakum tapi lingkungan yang memiliki sistem sosial yang sudah berjalan puluhan tahun.

Kekuasaan—struktur politik yang dihadapi sekarang ini bukan wujud dari kedaulatan rakyat. Pemilu yang diikuti oleh jutaan rakyat menghasilkan kekuasaan yang nyaris tanpa oposisi. Bersamaan dengan itu kekuasaan mulai memperkuat pengaruhnya dengan menundukkan kekuatan politik dari mana saja untuk berada di lingkaran penguasa. Rombongan aktivis yang dulu berani bersuara keras di masa pemerintahan sebelumnya ditundukkan bahkan ditempatkan pada posisi yang mapan. Begitu pula kalangan akademisi sudah tidak banyak yang berani bersikap berlawanan dengan kebijakan penguasa. Malah secara atraktif kekuasaan mendominasi suara dalam pemilihan Rektor Perguruan Tinggi Negeri. Ibarat pipa, kekuasaan mencengkram pengaruhnya kemana-mana diantaranya dengan menguasai kursi parlemen. Mayoritas kursi parlemen adalah pendukung utama istana. Tanpa oposisi apa yang terjadi? Kebijakan berjalan tanpa pengawasan dan keputusan politik diambil tanpa mempertimbangkan saran dari berbagai kalangan. Jelas pola kebijakan semacam itu hanya menghasilkan tragedi karena tidak diantisipasi resiko maupun efek destruktif dari kebijakan yang diambil. Di sisi lain ketidak-hadiran oposisi akan membawa pemerintahan dijalankan dengan tanpa transparansi. Pemerintah akan sesukanya mengambil keputusan politik tanpa harus menjelaskan dasar pengambilan putusan, bagaimana keputusan itu diimplementasikan dan bagaimana cara mengevaluasinya. Dalam bahasa Socrates ada tiga kriteria untuk menguji perlu-tidaknya sebuah tindakan: apakah sebuah tindakan itu benar dan dapat dibenarkan? Kalau tindakan itu terbukti benar, menyusul pertanyaan kedua: apakah tindakan yang benar itu perlu dilakukan atau tidak? Kalau tindakan itu ternyata benar dan perlu, pertanyaan ketiga apakah hal itu baik atau tidak untuk dilaksanakan? Lebih utama lagi oposisi berfungsi juga sebagai petunjuk pada pemerintah mengenai apa yang harus dilakukan tetapi justru tidak dilakukan. Singkatnya oposisi berkewajiban melakukan kualifikasi apakah sesuatu itu harus dilakukan, tidak harus dilakukan atau malah tidak harus dilakukan sama sekali. Dalam situasi sekarang ini memang oposisi tidak musti berujud partai politik, bisa juga diperankan oleh media massa hingga organisasi masyarakat sipil. Tapi peranya jadi vital di tengah kemapanan kekuasaan yang belakangan sangat alergi terhadap kritik. Mapanya kekuasaan itu tampak dari berkuasanya elite politik yang itu itu lagi dalam lingkaran kekuasaan. Dikatakan itu-itu lagi karena kekuasaan tampaknya hanya berputar diantara mereka dan diisi oleh orang yang berada di lingkaran mereka. Kasta elite yang berasal bisa dari partai politik, pengusaha maupun aparat keamanan ini membuat kekuasaan jadi alat peneguh status quo karena seluruh keputusannya hanya mengakomodasi kepentingan mereka.

Sebuah kekuasaan yang mirip sebagai susunan kepanitiaan dimana tugas utamanya bukan melayani dan melindungi rakyat melainkan alat dari kelas yang berkuasa. C Wright Mills menyebut sebagai kekuasaan yang berputar di lingkungan elite dimana oleh Ralph Milliband bisa terjadi karena mereka-pada penguasa- mirip sebagai kumpulan kawan. Diantara mereka sering bertemu dalam banyak aktivitas, seperti bermain golf, pesta hingga ibadah sehingga wajar jika keputusan politiknya pasti lebih mengutamakan kepentingan kawan. Di masa Orde Baru disebut istilah nepotisme sedang kini mereka menyebutnya sebagai para predator. Tidak adanya putusan yang menguntungkan rakyat karena pada dasarnya pejabat bertemu dengan rakyat hanya pada waktu-waktu tertentu saja.

Meskipun teori ini dikritik oleh Nicolas Poulantzas yang mengatakan bukan soal seringnya bertemu-keputusan politik menguntungkan mereka- tapi karena kekuasaan sangat tergantung pada lapisan elite ini. Lapisan yang mempunyai pundi-pundi kekayaan fantastis yang bisa memenuhi kebutuhan para penguasa. Para pemilik modal itu mampu menjamu kebutuhan penguasa. Jadi kekuasaan butuh oposisi agar jalanya kekuasaan tidak berlangsung sewenang-wenang apalagi hanya memuaskan kelompok tertentu saja. Alasan itulah yang dipakai kekuasaan untuk memberikan peran terbatas pada masyarakat sipil untuk melakukan kritik: bisa melakukan kritik tetapi dengan batasan etis yang standarnya didefinisikan oleh penguasa, dapat melakukan kritik tetapi melindungi kehormatan dan martabat pejabat dan bahkan kritik bisa diberikan asalkan sesuai prosedur. Artinya kekuasaan memagari dirinya melalui seperangkat regulasi yang membuat kritik itu hanya sebagai sebuah komentar singkat bukan masukan yang wajib didengar apalagi dilaksanakan. Malah dengan antusias kekuasaan-mengikuti Gramsci-membangun hegemoni dengan mengartikulasikan kepentingannya seolah-olah itu kepentingan masyarakat. Kasus penerbitan UU Cipta Kerja dan revisi atas UU KPK yang dikatakan sebagai upaya membuka lapangan kerja serta memperkuat kerja pemberantasan korupsi. Bualan ini dikatakan berulang kali bahkan dengan memanfaatkan buzzer segala yang membuat pandangan publik jadi terdistorsi.

Konsekuensi apa yang terjadi kalau kekuasaan dikelola seperti ini? Struktur kapitalistik yang mendasari praktek akumulasi modal akan terus menerus diguncang oleh konflik: kebutuhan kekuasaan untuk mempertahankan sumber daya buruh murah, ditambah bisnis yang mengandalkan eksploitasi sumber daya alam serta dimanfaatkan praktek politik rente akan mudah menciptakan letupan karena ketidak-adilan yang diakibatkannya; makin tingginya kebutuhan negara untuk menjalankan fungsi kontrol, mematai-matai bahkan memberikan sanksi yang keras pada upaya apapun yang dilakukan oleh warga yang hendak menuntut pemenuhan hak; itu sebabnya negara akan mengandalkan organisasi militer serta sejenisnya yang memiliki kemampuan untuk melakukan kekerasan, represi bahkan mengintimidasi; tujuan itu semua untuk mempertahankan logika industrial dalam proyek perubahan sosial. Industrialisme ini menyangkut prinsip struktural yang mendasari praktek-praktek yang bertujuan untuk mengubah alam atau pembangunan lingkungan non alami.⁹⁵ Keinginan negara untuk melaju sebagai negara Industri tampaknya akan ditempuh dengan cara apa saja. Regulasi Omnibus Law yang berpengaruh pada segala aspek tampaknya menjadi kotak pandoranya. Lewat keputusan hukum yang berbahaya ini maka investasi diperlonggar proses pendiriannya dan beroperasinya: izin dipermudah dan dipersingkat begitu pula pemenuhan hak-hak buruh. Sejauh ini sudah ada dampak langsung yang dirasakan, yakni pencemaran lingkungan dan pelanggaran hak para pekerja. Tapi negara tak bergeming sejangkal pun bahkan memberi kepercayaan sepenuhnya pada kekuatan modal. Itu sebabnya modal lalu melaju dengan orientasi yang jelas: akumulasi laba. Friedman menyebut itu sebagai pedoman: 'Ada satu, dan hanya satu, tanggung jawab sosial bisnis, yaitu menggunakan seluruh sumber dayanya untuk aktivitas yang mengabdikan pada akumulasi laba'.

⁹⁵ Konsep ini diambil dari B Herry Priyono, *Anthony Giddens: Suatu Pengantar*, KPG, 2002

BARA 3 HADAPI ANAK

SEMPROT GAS AIR MATA

Masih Lumayan,
Paling Mata Perih!

SIAPA
ODOL



COBA
TEBAK
BAGAI-
MANA
LUKANYA
??

DIPUKUL PAKE
PENTHUNGAN!

Di-SMACK DOWN!!



ADEGAN
ASLI
ITV!

WAH INI
IP-MAN
JILID BERAPA
?



KAMU MAHASISWA?
SUDAH MATI?!

IYA, DITEMBAK
OKNUM APARAT

WAH KOK
YA TEGA-TEGA
NYA...
KAYAK DI
PALESTINA
AJA

Semua adegan ini sesuai
dengan BERITA yang
DIBACA di
MANA-MANA
...

TAPI MAAF
KALO ADA
YANG
DISENSOR



JEJARING GERAKAN

Gerakan sosial kerap kali dihadapkan pada stagnansi dan mandegnya kaderisasi serta regenerasi, maka berbagai ruang untuk curah gagasan dan pengalaman, serta pendidikan bersama untuk menciptakan semakin banyak aktor gerakan baru tentu perlu dilakukan. Dalam tataran teknis kerap kali setiap sekolah gerakan ataupun pendidikan kader mengalami kebingungan mencari pemantik dan fasilitator kelas—kadang bukan karna tidak ada atau jumlahnya terbatas tetapi juga mungkin tidak memiliki database ataupun akses untuk menghubungi. Bahwa kita percaya semakin banyak orang yang terlibat dalam gerakan sosial secara individu merdeka maupun koalisi kolektif, akan membuka potensi perubahan sosial yang lebih besar untuk semua. Sebagai jawaban atas keluh kesah tersebut, terlampir berbagai aktor dan simpul gerakan yang bisa menjadi kawan belajar dalam gerakan di lintas sektoral sesuai minat kajian dan bidang gerakan. Terdiri dari latarbelakang pendidik, peneliti, aktivis, pengiat sosial, praktisi:

No	Nama	Minat Kajian	Organisasi-Gerakan
1	Roy Murtadho	Agraria	FNKSDA
2	Agung Wardana		Akademisi FH UGM
3	Mucthar Habibi		Akademisi FISIPOL UGM
4	Salsabila	Lingkungan	Jaga Rimba (Pelajar)
5	Asep Komaruddin	Lingkungan	Greenpeace
6	Wahyu Perdana	Lingkungan	Walhi
7	Lian Gogali	Lingkungan	Gerakan Rakyat Mowosintu
8	Wilson Obrigados	Hukum-HAM	Aktivis....
9	Amiruddin Al-Rahab		Komnas HAM
10	Cahyo Pamungkas		LIPI
11	Asfinawati		YLBHI
12	Alghiffari Aqsa		AMAR
13	Jumisih	Perburuhan	Federasi Buruh Lintas Pabrik (FBLP)
14	Abu Mufakhir	Perburuhan	Peneliti...
15	Ernawati	Perburuhan	PRD

16	Ikhsan Raharjo	Perburuhan	Sindikasi
17	Lola Easter	Anti-Korupsi	ICW
18			Pukat UGM
19	Ita Fatia Nadia	Gender	Aktivis....
20	Ulya Niami Jamson	Gender	Akademisi FISIPOL UGM
21	Kalis Mardiyah	Gender	
22	Syafiatudina	Gender	KUNCI
23	Cici	Gender	PWNA JATIM
24	Eko Prastyo	Pendidikan/Gerakan Mahasiswa	Social Movement Institute
25	Herlambang Wiratma	Pendidikan/Gerakan Mahasiswa	Kaukus Untuk Kebebasan Akademik (KIKA)
26	Joko Susilo	Pendidikan/Gerakan Mahasiswa	MAP Corner Klub MKP UGM
27			Sekolah Pagesangan
28			Sekolah Gajah Wong

Kebutuhan database kontak person lebih detail dapat menghubungi Amartya di nomor, setelah mendapatkan izin dari pemilik.



REKOMENDASI JEJARINGMU?

Apakah kawan punya kenalan aktor, simpul gerakan ataupun organisasi-gerakan yang potensial dan berkapasitas untuk menjadi rekan belajar dalam inisiasi gerakan sosial dan kelas-kelas gerakan? Tulis dibawah ini kawan:

NO	PLAFORM	KONTEN

KANAL BELAJAR GERAKAN

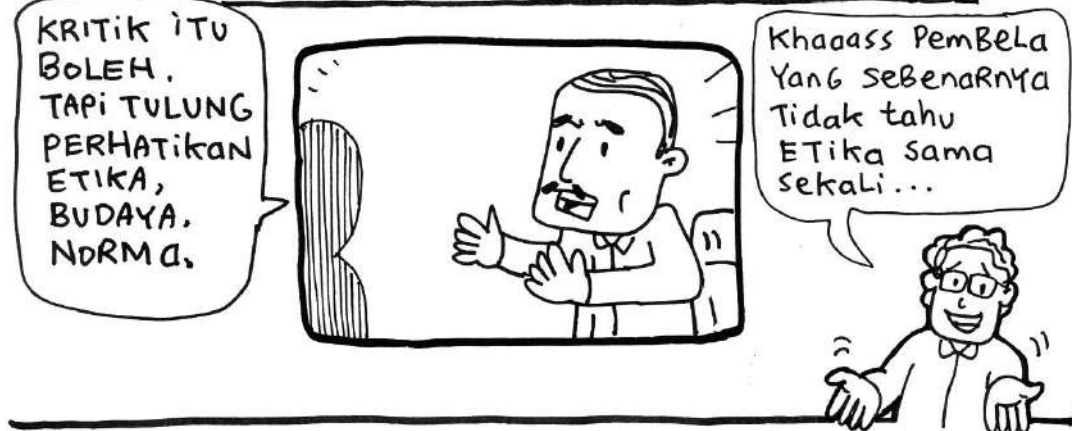
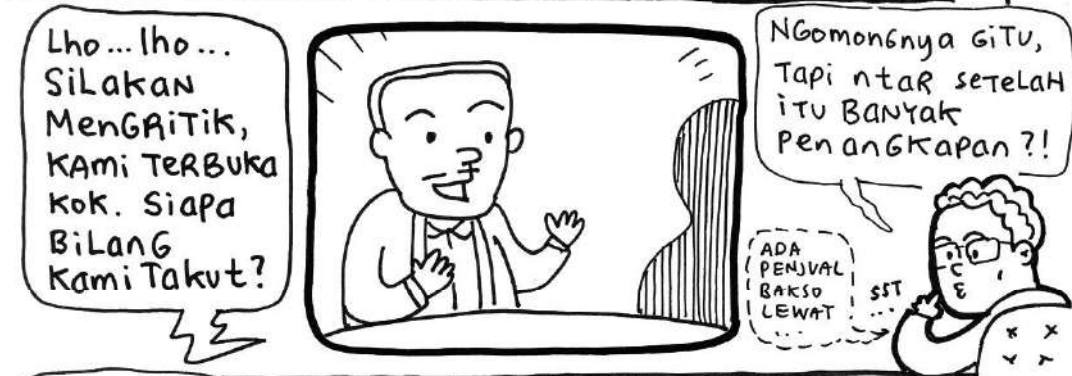
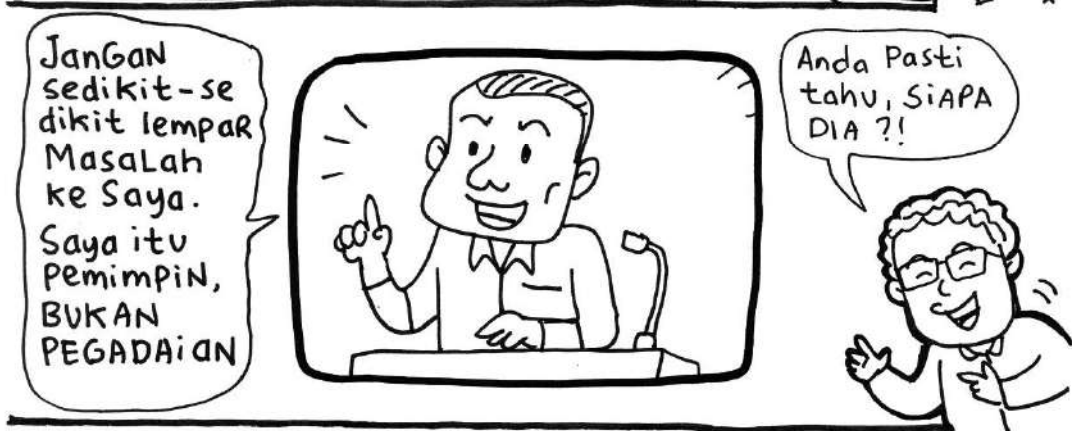
Kemajuan teknologi informasi, pembaharuan kajian, serta semakin banyak pengalaman praksis dalam inisiasi gerakan sosial telah menjadi faktor penting untuk terus memajukan organisasi-gerakan sosial. Ruang pembelajaran alternatif semakin banyak pilih. Berikut kanal belajar multi-platform yang bisa menjadi alternatif referensi:

NO	PLAFORM	KONTEN

**REKOMENDASI JEJARINGMU?**

Apakah kawan punya rekomendasi platform pembelajaran untuk gerakan sosial dan kajian terkait lainnya? Tulis dibawah ini kawan:

No	Platform	Konten



MENJADI

AKTIVIS

APA YANG HARUS DILAKUKAN?!

**Jadilah debu, maka mereka akan melemparkanmu ke udara.
Jadilah batu maka mereka akan melemparkanmu ke kaca.**
(Muh Iqbal)

**Penghormatan buta pada kekuasaan
adalah musuh besar kebenaran**
(Einstein)

Di masa silam aktivis adalah mereka yang memutar arus roda sejarah. Pada suasana otoriter para aktivis gencar menyuarakan perubahan. Baik itu melalui tulisan, aksi ataupun praktek pengorganisasian. Meski berhadapan dengan resiko yang mengancam hidup mereka tapi aktivis mirip dengan monumen yang berusaha keras untuk bertahan.

Membela mereka yang dianiaya, melindungi rakyat yang jadi korban ketidak-adilan hingga protes atas regulasi yang mengancam demokrasi. Tapi perubahan telah membawa banyak gerakan sosial tersesat di jalan keadilan: memilih untuk melakukan kompromi hingga sejumlah aktivis berubah haluan.

Ini bukan buku tapi modul yang mencoba membuat latihan 'bertahan' sebagai aktivis sekaligus bagaimana menyusun taktik perjuangan. Digarap dengan bahasa yang mudah serta dilampiri oleh komik membuat karya ini bisa jadi panduan untuk melakukan pelatihan pada banyak anak muda.

Bagaimana mengajak untuk jadi aktivis hingga bagaimana melindungi diri saat ada ancaman.

Bacaan yang ramah, menyenangkan dan praktikal.



include | protect | engage